

Balikpapan
Nyaman
HALAMAN DEPAN

LAPORAN AKHIR

Dokumen Kajian Survei
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Kota Balikpapan Tahun 2021

HASIL KERJA SAMA ANTARA





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Pedoman Pelaksanaan.....	17
1.3. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Hasil Yang Diharapkan.....	18
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan	20
BAB II KERANGKA TEORI	22
2.1. <i>New Publik Management</i>	22
2.1.1 Memahami <i>New Publik Management</i>	22
2.1.2 Karakteristik <i>New Publik Management</i>	24
2.1.3 Kritik terhadap <i>New Publik Management</i>	31
2.1.4 Penerapan <i>New Publik Management</i> di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum.....	35
2.1.5 Reformasi Birokrasi dan <i>New Publik Management</i> di Indonesia.....	41
2.2. Korupsi.....	44
2.2.1 Pengertian Korupsi.....	44
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	46
2.2.3 Jenis Tindak Pidana Korupsi	47
2.2.5 Faktor Penyebab Korupsi.....	49
2.2.6 Pengukuran Korupsi	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
3.1. Jenis Penelitian	54
3.2. Ruang Lingkup Pekerjaan.....	55
3.3. Jenis Data	61



3.4. Teknik Pengumpulan Data	61
3.5. Teknik Analisis Data	64
3.6 Cara Menghitung Indeks	74
BAB IV DESKRIPSI OBJEK KAJIAN	83
4.1. Kondisi Geografis Kota Balikpapan	83
4.2. Pemerintahan	84
4.3. Kependudukan	87
BAB V HASIL ANALISIS	93
A. Responden Lokasi Survei	93
B. Demografi Responden	94
C. Hasil Survei	101
1. Literasi Korupsi (U1)	101
2. Persepsi Terhadap Korupsi	106
3. Kejadian Korupsi / Potensi Korupsi (U5)	109
4. Penilaian Integritas Bisnis (U6)	119
5. Resiko Suap berdasarkan Lapangan Usaha (U7)	125
6. Integritas Layanan Publik Kota (U8)	133
7. Integritas Layanan Provinsi (U9)	142
8. Integritas Layanan Instansi Vertikal Daerah (U10)	148
9. Integrasi Layanan Pusat (U11)	153
10. Integritas Layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (U12)	159
11. Integritas Asosiasi Pengusaha (U13)	164
12. Sistem Integritas Lokal (U14)	169
D. Interpretasi Hasil Survei Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	177
1. Indeks Literasi Korupsi (U1)	177
2. Indeks Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2)	179



3. Indeks Daya Saing Lokal (U3)	182
4. Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4)	185
6. Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6)	191
7. Indeks Resiko Suap (U7)	196
8. Indeks Integritas Layanan Kota (U8)	199
9. Indeks Integritas Layanan Provinsi (U9)	202
10. Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10).....	205
11. Indeks Integritas Layanan Pusat (U11).....	208
12. Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12)	211
13. Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13)	214
14. Indeks Integritas Lokal (U14)	216
15. Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan 2021.....	219
BAB VI PENUTUP.....	240
6.1 Kesimpulan	240
6.2 Rekomendasi.....	243
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Alur Kendali Kualitas (Quality Control) Yang Akan Dijalankan	63
Gambar 5. 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	95
Gambar 5. 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Penyangang Difiable	96
Gambar 5. 3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	97
Gambar 5. 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	98
Gambar 5. 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Tinggal Di Balikpapan	99
Gambar 5. 6. Deskripsi Responden Lama Berdasarkan Pekerjaan	100
Gambar 5. 7. Deskripsi Responden Lama Berdasarkan Usaha	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020	13
Tabel 1. 2. Survei Indeks Persepsi Korupsi 10 (Sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020.....	14
Tabel 3. 1.Tahap Pelaksanaan Kegiatan.....	58
Tabel 3. 2. Indeks Persepsi Korupsi Skala 0-11 (Skala Sebelas).....	70
Tabel 3. 3. IPK Kota Balikpapan 2017-2021.....	72
Tabel 3. 4. IPK OPD Zona Integritas Kota Balikpapan 2017-2021	73
Tabel 3. 5. IPK OPD Non Zona Integritas Kota Balikpapan 2021.....	73
Tabel 3. 6. Tabel Interval Indeks Rumus	74
Tabel 3. 7. Tabel Interval Indeks Dalam Proses Perhitungan	75
Tabel 3. 8. Tabel Interval Indeks Hasil Perhitungan	76
Tabel 3. 9. Tabel Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) Pada OPD Zona Integritas.....	77
Tabel 3.10. Tabel Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) Pada OPD Non Zona Integritas.....	78
Tabel 3.11. Interval Indeks Literasi Korupsi (U1)	80
Tabel 3.12. Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD ZI.....	81
Tabel 3.13. IPK Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	82
Tabel 4.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kota Balikpapan Tahun 2020	85
Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Balikpapan Tahun 2020	86



Tabel 4.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	87
Tabel 4.4. Penduduk, Laju Pertumbuhan Per Tahun, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Balikpapan Tahun 2020	89
Tabel 4.5. Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2020	90
Tabel 4.6. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2020	90
Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Balikpapan Tahun 2020.....	91
Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2020	92
Tabel 5.1. Jumlah Responden Berdasarkan Lokasi Survei Zona Integritas ..	93
Tabel 5.2. Jumlah Responden Berdasarkan Lokasi Survei Non Zona Integritas.....	93
Tabel 5.3. Literasi Mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	102
Tabel 5.4. Sumber Informasi Tentang Korupsi.....	103
Tabel 5.5. Pengetahuan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).....	104
Tabel 5.6. Sumber Informasi Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).....	105
Tabel 5.7. Daya Saing Lokal.....	107
Tabel 5.8. Penghambat Kemudahan Berusaha	108
Tabel 5.9. Prevalensi Korupsi	111
Tabel 5.10. Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara	112
Tabel 5.11. Motivasi Korupsi	114



Tabel 5.12. Frekuensi Korupsi.....	116
Tabel 5.13. Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi.....	118
Tabel 5.14. Kendala Dalam Mendapatkan Pelayanan.....	119
Tabel 5.15. Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi Di Kota Balikpapan.....	120
Tabel 5.16. Keterlibatan Pribadi Dalam Melawan Korupsi.....	121
Tabel 5.17. Perusahaan Memiliki Kode Etik Yang Tegas Dalam Melarang Korupsi.....	122
Tabel 5.18. Responden Kode Etik Perusahaan.....	122
Tabel 5.19. Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat/Perusahaan Swasta Dalam Upaya Melawan Korupsi.....	123
Tabel 5.20. Kegiatan Paling Efektif Dalam Upaya Melawan Korupsi.....	124
Tabel 5.21. Pengalaman Relasi Bisnis.....	125
Tabel 5.22. Rata-Rata Resiko Suap Berdasarkan Mengamankan Dan Mempercepat Proses Bisnis.....	127
Tabel 5.23. Rata-Rata Resiko Suap Berdasarkan Sumbangan Politik Dan Pihak Swasta Lainnya.....	130
Tabel 5.24. Perkiraan Presentase Uang Suap.....	132
Tabel 5.25. Interaksi Dengan Instansi Pemerintah Kota Balikpapan.....	134
Tabel 5.26. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	136
Tabel 5.27. Kemungkinan Menyuarap Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	139
Tabel 5.28. Interaksi Dengan Instansi Layanan Publik Provinsi.....	142
Tabel 5.29. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	144
Tabel 5.30. Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	146
Tabel 5.31. Interaksi Dengan Instansi Penyedia Layanan Vertikal Daerah.....	148
Tabel 5.32. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	149
Tabel 5.33. Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	151



Tabel 5.34. Pengalaman Interaksi Dengan Instansi Pusat	153
Tabel 5.35. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	155
Tabel 5.36. Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian .	157
Tabel 5.37. Interaksi Dengan BUMN Dan BUMD	159
Tabel 5.38. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	161
Tabel 5.39. Kemungkinan Menyuaip Jika Terjadi Ketidaksesuaian	163
Tabel 5.40. Interaksi Dengan Asosiasi Pengusaha.....	165
Tabel 5.41. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian.....	166
Tabel 5.42. Kemungkinan Menyuaip Jika Terjadi Ketidaksesuaian	168
Tabel 5.43. Sistem Integritas Lokal Pentingnya Pilar	170
Tabel 5.44. Sistem Integritas Lokal Peran Pilar Saat Ini	172
Tabel 5.45. Sistem Integritas Lokal Kualitas Tata Kelola.....	174
Tabel 5.46. Sistem Integritas Lokal Kapasitas Lokal	176
Tabel 5.47. Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD ZI.....	177
Tabel 5.48. Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD NON-ZI.....	178
Tabel 5.49. Indeks Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) OPD ZI.....	179
Tabel 5.50. Indeks Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) OPD NON-ZI	180
Tabel 5.51. Indeks Daya Saing Lokal (U3) OPD ZI	182
Tabel 5.52. Indeks Daya Saing Lokal (U3) OPD NON-ZI	182
Tabel 5.53. Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4) OPD ZI.....	185
Tabel 5.54. Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4) OPD NON-ZI	185
Tabel 5.55. Indeks Potensi Korupsi (U5) OPD ZI	188
Tabel 5.56. Indeks Potensi Korupsi (U5) OPD NON-ZI	188
Tabel 5.57. Jumlah Skor Per Indikator Penilaian Integritas Bisnis (U6).....	191
Tabel 5.58. Rata-Rata Per Indikator Penilaian Integritas Bisnis (U6)	192



Tabel 5.59. Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6) OPD ZI.....	193
Tabel 5.60. Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6) OPD NON-ZI	194
Tabel 5.61. Indeks Resiko Suap (U7) OPD ZI	196
Tabel 5.62. Indeks Resiko Suap (U7) OPD NON-ZI.....	197
Tabel 5.63. Indeks Integritas Layanan Kota (U8) OPD ZI	199
Tabel 5.64. Indeks Integritas Layanan Kota (U8) OPD ZI	200
Tabel 5.65. Indeks Integritas Layanan Provinsi (U9) OPD ZI.....	202
Tabel 5.66. Indeks Integritas Layanan Provinsi (U9) OPD NON-ZI.....	203
Tabel 5.67. Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10) OPD ZI.....	205
Tabel 5.68. Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10) OPD NON - ZI	206
Tabel 5.69. Indeks Integritas Layanan Pusat (U11) OPD ZI	208
Tabel 5.70. Indeks Integritas Layanan Pusat (U11) OPD NON-ZI.....	209
Tabel 5.71. Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12) OPD ZI.....	211
Tabel 5.72. Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12) OPD ZI.....	212
Tabel 5.73. Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13) OPD ZI.....	214
Tabel 5.74. Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13) OPD NON-ZI	215
Tabel 5.75. Indeks Integritas Lokal (U14) OPD ZI.....	216
Tabel 5.76. Indeks Integritas Lokal (U14) OPD NON-ZI	217
Tabel 5.77. Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan 2021.....	219
Tabel 5.78. IPK OPD Zona Integritas Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 .	220
Tabel 5.79. IPK OPD Zona Non Integritas Kota Balikpapan Tahun 2017- 2021	221



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, dimana posisi dan letak strategis yang berbatasan dengan selat Makassar dan teluk Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032 pada Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) ruang lingkup wilayah Kota Balikpapan dengan luas kurang lebih 81.494 Ha. (ruang lingkup wilayah darat dengan luas kurang lebih 50.330 Ha, dan ruang lingkup wilayah laut dengan luas kurang lebih 31.164 Ha). Dengan komposisi topografi Kota Balikpapan adalah 85 % berbukit dan 15% datar.

Secara letak geografis Kota Balikpapan yang strategis tersebut, menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota yang sangat diminati dan menjadikan kota yang layak huni sehingga menjadikan Kota Balikpapan menjadi kota yang sangat di minati oleh investor baik skala nasional maupun skala internasional untuk menanamkan modalnya guna mempercepat pembangunan dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan. Hal ini selaras dengan Visi Kota Balikpapan “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Berkemajuan yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”.

Untuk mencapai dan mewujudkan visi Kota Balikpapan, salah satu arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai Misi “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)" yang sudah tertuang dan/atau tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, yang bertujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima. Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diukur dan dilihat dari indikator sasaran yang salah satunya dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari suatu Kota. Semakin tinggi Indeks Persepsi Korupsi suatu Kota menunjukkan semakin baik tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PPK) dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan setiap tahun sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagai bagian dari Misi Kota Balikpapan. Dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Renaksi PPK) Presiden RI secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan

Bupati/Wali Kota) untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Selaras dengan upaya percepatan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, serta melibatkan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal/akademisi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi dan mengevaluasi untuk mendorong implementasi aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keberhasilan Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota sangat penting sebagai bahan pelaporan baik Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota.

Tabel 1. 1. Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan tahun 2017 – 2020

No	Tahun	Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan	Target Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan
1	2017	6,64	6,62
2	2018	6,87	6,70
3	2019	6,89	6,75
4	2020	6,92	6,80
5	2021	?	6,90

Berdasarkan hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan dengan skor IPK Tahun 2017

sebesar 6,64 skor IPK Tahun 2018 sebesar 6,87 skor IPK Tahun 2019 sebesar 6,89 dan skor IPK Tahun 2020 sebesar 6,92. Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan menetapkan target Tahun 2017 sebesar 6,62 Tahun 2018 sebesar 6,70 Tahun 2019 sebesar 6,75 Tahun 2020 sebesar 6,80 dan Tahun 2021 sebesar 6,90. Perkembangan Realisasi Skor IPK pada tahun 2017-2020 Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan berada pada skala 0-10 dimana 0 sangat korup dan 10 sangat bersih.

Tabel 1. 2. Survei Indeks Persepsi Korupsi 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020

No	OPD	IPK Realisasi	
		2020	2021
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan	6,86	?
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan	6,93	?
3	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	7,08	?
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	7,28	?
5	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	6,69	?
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	6,82	?
7	Kecamatan Balikpapan Barat	6,73	?
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	6,91	?
9	RSKB Sayang Ibu Kota Balikpapan	6,93	?
10	SMP Negeri 1 Balikpapan	6,99	?
Realisasi IPK Kota Balikpapan (rata2)		6,92	?
Target IPK Kota Balikpapan		6,80	6,90

Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan skor IPK sebesar 6,86;
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan skor IPK sebesar 6,93;
3. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dengan skor IPK sebesar 7,08;
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dengan skor IPK 7,28;
5. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dengan skor IPK sebesar 6,69;
6. Kecamatan Balikpapan Selatan dengan skor IPK sebesar 6,82;
7. Kecamatan Balikpapan Barat dengan skor IPK sebesar 6,73;
8. RSUD Beriman Kota Balikpapan dengan skor IPK sebesar 6,91;
9. RSKB Sayang Ibu Kota Balikpapan dengan skor IPK sebesar 6,93;
10. SMP Negeri 1 Balikpapan dengan skor IPK 6,99.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi masih menantang Provinsi Kalimantan Timur telah mengimplementasikan salah satu strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Pelayanan Publik dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil Survei dari *Transparency International Indonesia* (TII) Tahun 2017 bahwa, Kota Balikpapan merupakan salah satu bagian yang dijadikan sampling Survei Indeks Persepsi Korupsi dari 12 (dua belas) Provinsi/Kota di Indonesia yang antara lain: Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang,

Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan Medan dimana Balikpapan merupakan urutan keempat dengan skor IPK sebesar 6.43 pada skala 0-10 dimana 0-9 paling korup dan 9-10 paling bersih.

Sebagai upaya tindak lanjut atas rumusan strategi dan data *Transparency International Indonesia* (TII) tersebut, sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dengan *output* (keluaran) berupa dokumen Kajian Survei Indeks Persepsi Korupsi Balikpapan. Sub Bidang Penelitian Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Bappedalitbang Kota Balikpapan sesuai RPJMD kota 2016-2021 dengan melakukan evaluasi setiap tahun sampai dengan tahun 2021.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi tentunya perlu suatu indikator (alat ukur) seberapa parah epidemik korupsi tersebut di dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berkolaborasi serta menggandeng beberapa pihak yang antara lain: Tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, Akademisi/perguruan tinggi yang sudah punya kapabilitas; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Para tokoh-tokoh daerah untuk melakukan urun rembug dalam menyusun dan merumuskan suatu indikator korupsi khususnya di Kota Balikpapan.

Indikator Persepsi Korupsi tersebut berisi beberapa hal yang ingin diukur berkaitan dengan korupsi yaitu: daya saing lokal, literasi korupsi, penghambat kemudahan berusaha, potensi korupsi/prevalensi korupsi, integritas bisnis, resiko suap berdasarkan lapangan usaha, integritas layanan pemerintah baik pusat, provinsi dan

kabupaten/kota, lintas vertikal di daerah, akuntabilitas publik, motivasi korupsi dan sektor terdampak korupsi.

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ini dapat digambarkan Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi merupakan Indikator yang di acu/sebagai dasar pengukur keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam rumusan Stranas PPK, di tingkat daerah pengukuran Indeks Persepsi Korupsi memiliki kewenangan dan aksi yang berbeda dengan nasional, yaitu dengan pengukuran indeks persepsi korupsi di perlukan untuk mengukur besarnya resiko korupsi yang terjadi. Pencegahan dan pemberantasan Korupsi daerah dinilai berhasil jika terjadi kenaikan pada Survei Indeks Persepsi Korupsi. Sehingga Program ataupun kegiatan/pekerjaan Survei Indeks Persepsi Korupsi ini sangat perlu dan penting untuk dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan dan sistematis sehingga tujuan dan target capaian tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan pelayanan publik yang prima yang bebas dari praktek-praktek pungutan liar, suap, atau KKN yang sudah merupakan Visi Misi Kota Balikpapan.

1.2. Pedoman Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
- b. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005-2025;
- d. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Kota Balikpapan;
- e. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-72/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Penetapan OPD dan Unit Kerja sebagai Zona Integritas menuju wilayah WBK/WBBM.

1.3. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Hasil Yang Diharapkan

a. Maksud

Pemerintah Kota Balikpapan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, akan melakukan dan melaksanakan "Survei Indeks Persepsi Korupsi" setiap tahun bermaksud untuk mendapatkan gambaran serta memetakan resiko korupsi dan sekaligus menilai efektifitas program pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka pencapaian target-target RPJMD Kota Balikpapan dan Stranas PPK sesuai VISI MISI Kota Balikpapan pada Misi ke-5 (lima) yaitu *Good Governance* atau Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik menuju pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Dokumen Kajian Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang indeks persepsi korupsi
2. Untuk menghitung nilai Indeks Persepsi Korupsi dan tersedianya nilai Indeks Persepsi Korupsi Balikpapan Tahun 2021.
3. Adanya gambaran/alat ukur yang dapat di gunakan untuk menera baseline resiko korupsi yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah Kota di tingkat daerah tentang daya saing dan hambatan berusaha, potensi korupsi dan integritas pelayanan publik, sistem integritas lokal dan penilaian kinerja perekonomian daerah.

c. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan formula perhitungan dan Indeks Persepsi Korupsi;
2. Terukurnya Indeks Persepsi Korupsi di Kota Balikpapan dan 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk dalam Zona Integritas (ZI) dan 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum termasuk dalam Zona Integritas (ZI) Kota Balikpapan Tahun 2021;
3. Mampu dan dapat mengukur tingkat Indeks Persepsi Korupsi Balikpapan sebagai tolak ukur peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pelayanan publik yang prima bersih dari korupsi.

d. Hasil Yang Diharapkan

Dokumen Kajian Survei Indeks Persepsi Korupsi secara substansi memuat antara lain:

1. Adanya data Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan indikator yang sudah ditentukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII);
2. Adanya nilai Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan dan 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk Zona Integritas (ZI) dan 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum termasuk dalam Zona Integritas (ZI) Kota Balikpapan Tahun 2021;
3. Analisis kebijakan dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan mengenai hasil survei yang dilakukan, bagaimana kinerja saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan oleh masyarakat dan kiat-kiat untuk menjalankan dan menyelenggarakan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan) yang merupakan *feedback* yang dibutuhkan dalam rangka menuju perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur dengan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Survei Indeks persepsi Korupsi Balikpapan di 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan wilayah Kota Balikpapan dan 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk dalam Zona Integritas (ZI) Kota Balikpapan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



(DISDUKCAPIL) Kota Balikpapan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Balikpapan, Dinas Perpustakaan dan Arsip (DISPUSTAKAR) Kota Balikpapan, Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Barat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu Kota Balikpapan dan SMP Negeri 1 Balikpapan.

Untuk kajian pada tahun 2021 ditambah 6 (enam) OPD yang belum masuk dalam Zona Integritas (ZI) Kota Balikpapan yaitu Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIK), Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara.

BAB II KERANGKA TEORI

2.1. *New Publik Management*

2.1.1 Memahami *New Publik Management*

Sebuah pengkritisan dalam menilai kinerja manajemen di sektor publik, ketika birokrasi sebagai prinsip organisasi menghasilkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Adapun yang terjadi di masyarakat yaitu, tingkat pelayanan yang rendah dan tingginya tingkat korupsi. Hal ini berimplikasi pada organisasi sektor publik selalu berusaha melakukan perubahan-perubahan untuk melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan untuk terus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Hal ini berkaitan dengan asumsi yang mengatakan bahwa superioritas sektor swasta dan teknik-teknik manajemen sektor swasta diatas sektor publik dan administrasi publik (Osborne, 2006).

Dampak dari asumsi tentang superioritas sektor privat inilah membuka jalan bagi *New Publik Management* yang pada intinya ingin mengurangi adanya perbedaan antara sektor publik dengan sektor privat. Hal ini berimplikasi pada akuntabilitas, yang awalnya berfokus pada proses bergeser menjadi berfokus pada hasil (Broadbent *et al*, 1991). Asumsi inilah yang menjadikan *New Publik Management* sebagai bentuk reformasi di sektor publik.

Konsep sektor publik, merupakan lembaga yang didukung oleh Negara dan anggaranya (J.E.Lane, 2005). Sektor publik memberikan layanan dan tidak terdapat kompetitor, namun

dapat diakses oleh setiap individu masyarakat. Adapun pemaparan Smalskys (2010), bahwa sektor publik harus dipahami sebagai sistem organisasi yang mengelola dan menggunakan sumber daya Negara, sementara Arimaviciute (2006) merumuskan bahwa sektor publik merupakan perpaduan antara publik dan individu. Hal ini pengukurannya melalui efektivitas, dimana efektivitas merupakan kriteria utama bagi evaluasi kinerja di institusi-institusi publik. Pengukuran kinerja dapat dianggap sebagai salah satu alat kunci, yang membantu menilai situasi saat ini dan untuk membuat keputusan, yang membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Organisasi sektor publik berorientasi pada penyediaan layanan yang mudah diakses dan kualitatif, untuk memenuhi kebutuhan publik dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Menurut Zeithalm dan Bitner (2003) bahwa lingkungan yang kompetitif mempengaruhi bidang ekonomi yang paling menyakitkan, ketika hasil kerjanya tidak nyata, namun tidak mengetahui dampaknya setelah berjalannya waktu yang lama. Oleh karena itu sangat penting bagi organisasi sektor publik untuk mengukur kerjanya secara sistematis dan konsisten untuk meningkatkan kinerja manajemen organisasi dan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan layanan yang disediakan dan aksesibilitas publik.

Sebuah indikator untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, maka dirasakan perlu untuk mengetahui kinerja organisasi sektor publik. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengukuran kinerja di organisasi sektor publik diantaranya

Isoraite (2008), Moxham (2009), Gimzauskiene (2006) dan Paciute (2002). Adapun temuannya bahwa model pengukuran kinerja tidaklah mudah, sebab harus menyesuaikan dengan kondisi organisasi sektor publik yang berorientasi pada proses bukan hasil.

2.1.2 Karakteristik *New Publik Management*

New Publik Management juga dikenal sebagai konsep akuntansi sektor publik. Sebuah langkah dalam perbaikan masalah buruknya pengelolaan organisasi publik yang terkesan tidak efisien dan akuntabel. Hal ini berimplikasi pada munculnya konsep *value for money*, yang merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi.

Konsep *value for money* merupakan desain dari sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen. Hal ini dapat diartikulasikan *value of money* sebagai konsep untuk mengukur ekonomi, efektifitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep *value for money* menjadi penting dalam organisasi sektor publik dalam pengukuran kinerja sektor publik. *Value for money* mengandung arti sebagai penghargaan terhadap uang. Hal ini dapat dimaknai jika setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya (Mahmudi, 2007). Namun selain *value for money*, terdapat juga pendekatan yang lebih baru dalam manajemen kinerja sektor publik yaitu konsep *best practise* atau *best value* yang merupakan perluasan dari konsep *value for money*.

Konsep *best value* merupakan perluasan dari konsep *value for money* (Mahmudi, 2007). Dalam konteks organisasi pemerintahan, konsep *best value* merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah pemberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik (*best value*). Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengelompokkan unit kerja mana yang termasuk dalam unit kerja *best value*. Unit kerja yang termasuk kategori unit kerja *best value* harus fokus memberikan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dengan cara mengombinasikan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif dalam pelayanan, serta harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan tidak didasarkan pada ketersediaan dana, melainkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Unit kerja *best value* bukan merupakan unit kerja yang menjalankan fungsi pendapatan. Hal ini berarti unit kerja tersebut tidak mendasarkan peningkatan pelayanannya pada kenaikan pendapatan yang diperolehnya. Cara berfikir unit kerja ini tidak dimulai dari bagaimana meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan pelayanan, akan tetapi bagaimana memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat baru kemudian mencari solusi bagaimana membiayai pelayanan tersebut. Salah satu negara yang menerapkan konsep *best value* adalah Inggris yang diatur dalam *Local Government Act 1999*.

Karakteristik utama konsep *best value* adalah penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit kerja pemberi layanan yang merupakan unit kerja *best value*. Indikator

kerja ditetapkan untuk menilai kinerja dan kesehatan organisasi secara keseluruhan. Indikator kerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi adalah indikator *outcome* (hasil), sedangkan indikator *input* dan *output* digunakan untuk menilai level kegiatan. Setiap unit kerja yang ditunjuk sebagai otoritas *best value* akan menyusun target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan prioritas. Untuk mengimplementasikan konsep *best value* yang berkompeten untuk menjalankan unit kerja *best value*.

Untuk mengimplementasikan konsep *value for money* pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja dikembangkan dari variabel kunci yang berhasil diidentifikasi oleh organisasi untuk unit kerja yang terkait untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya. Indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Pada dasarnya pengembangan indikator kinerja meliputi pengembangan indikator kinerja makro dan mikro. Indikator kinerja makro digunakan pada tingkat korporat atau organisasi induk, sedangkan indikator kinerja mikro digunakan pada tingkat unit kerja. Indikator kinerja untuk tiap-tiap unit kerja pada dasarnya dikembangkan secara unik atau khusus sesuai dengan karakteristik unit tersebut, akan tetapi dapat juga dikembangkan indikator yang sifatnya standar yang berlaku untuk semua unit. Namun demikian, standar kinerja untuk unit kerja tidak bisa semuanya dibuat secara seragam karena masing-masing unit kerja pasti memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda.

New Publik Management memiliki sejumlah karakteristik yang menegaskan keterkaitannya dengan semakin pentingnya pelayanan kepada pengguna pelayanan; devolusi; reformasi regulasi menuju pelayanan publik yang lebih bermutu. Menurut Hood (1991:4) konsep *New Publik Management* memiliki tujuh komponen utama, yaitu:

a. Manajemen Sektor Publik

New Publik Management menghendaki organisasi sektor publik dikelola secara profesional. Konsekuensi dilakukannya manajemen profesional di sektor publik adalah adanya kebebasan dan keleluasaan manajer publik untuk mengelola secara akuntabel organisasi yang dipimpinnya. Manajemen profesional mensyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas.

b. Adanya standar dan pengukuran kinerja

New Publik Management mensyaratkan organisasi memiliki tujuan yang jelas dan ada penetapan target kinerja. Target kinerja tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan kepada manajer atau personel untuk dicapai. Penetapan target kinerja harus dikaitkan dengan *standar* kinerja dan ukuran kinerja. Penetapan standar kinerja itu dimaksudkan untuk memberikan nilai terbaik (*best value*) dan praktik terbaik (*best practise*), sedangkan penetapan ukuran kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi.

c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian *output* dan *outcome*

Dalam konsep *New Publik Management* semua sumber daya organisasi harus dikerahkan dan diarahkan untuk mencapai target kinerja. Penekanannya adalah pada pemenuhan hasil (*outcome*), bukan pada kebijakan-kebijakan. Pengendalian *output* dan *outcome* harus menjadi fokus utama perhatian organisasi, bukan lagi sekedar pengendalian input, misalnya anggaran, jumlah staf, material dan sebagainya. Salah satu contoh perubahan ini adalah penggunaan penganggaran kinerja.

d. Pemecahan unit-unit di sektor publik

Model organisasi sektor publik tradisional sangat didominasi organisasi birokrasi. Model organisasi birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber itu pada awalnya sangat kuat untuk meningkatkan efisiensi organisasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu pola ini menjadi gagal karena semakin berkembang dan kompleksnya organisasi sektor publik sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kelembagaan organisasi karena sifat ini tersentralisasi. Konsep *New Publik Management* mengendaki organisasi dipecah-pecah dalam unit kerja. *New Publik Management* menghendaki adanya desentralisasi, devolusi dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada bawahan. Tujuan pemecahan organisasi kedalam unit-unit kerja ini adalah efisiensi dan memangkas kelambanan birokrasi.

e. Menciptakan persaingan di sektor publik

Doktrin *New Publik Management* menyatakan organisasi sektor publik perlu mengadopsi mekanisme pasar dan menciptakan persaingan. Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya. Untuk itu dilakukan mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Beberapa tugas pelayanan publik dapat diberikan kepada pihak swasta jika memang hal ini lebih menghemat biaya dan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Selain itu, manfaat lainnya adalah mendorong sektor swasta dan sektor ketiga untuk berkembang.

f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik

Konsep *New Publik Management* berasumsi bahwa praktik manajemen di sektor swasta jauh lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik. Beberapa praktik manajemen yang dianggap lebih baik antara lain penilaian kinerja, sistem kompensasi dan promosi didasarkan kinerja, manajemen biaya, struktur yang fleksibel, sistem akuntansi, dan penganggaran yang lebih maju. Diharapkan dengan diadopsinya praktik-praktik ini mampu mengembangkan manajemen sektor publik lebih baik.

g. Penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya

New Publik Management mensyaratkan organisasi sektor publik dapat memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Doktrin ini menghendaki organisasi sektor publik melakukan penghematan biaya-biaya langsung, meningkatkan disiplin pegawai, dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan harga murah. Pemerintah misalnya perlu melakukan pengendalian pengeluaran sumber daya publik seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan, pengrusakan lingkungan, salah kelola, salah alokasi dan korupsi (diadaptasi dari Boston, 1991; Butterfield et al, 2004 dalam Hayer, 2010).

Karakteristik-karakteristik di atas ini membuktikan keterkaitan antara indikator kinerja, rencana strategis dan rencana korporasi (Butterfield et al., 2004). Penekanan dari 'budaya kinerja' (Savage dan Charman, 1996) dalam *New Publik Management* memastikan bahwa para manajer tidak hanya berfokus pada aspek keuangan manajemen dan atas kepatuhan hukum, tetapi sebaliknya, terkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif (Pallot, 1991). Namun, seperti Pallot (1991) menyoroti bahwa *New Publik Management* adalah kombinasi dari manajemen keuangan dan umum dan sulit untuk memisahkan keduanya.

2.1.3 Kritik terhadap *New Publik Management*

Komponen *New Publik Management* yang diterapkan pada sektor publik telah menyebabkan perdebatan yang ketat, terutama dalam hal pengadopsian sektor publik dari prinsip sektor bisnis/ swasta. Anggapan ini didasarkan pada pandangan bahwa sektor publik sangat berbeda dari sektor swasta dan sebagai hasilnya, penerapan sikap sektor swasta dan teori tersebut tidaklah pantas (Butterfield et al., 2004). Hal ini diyakini bahwa perbedaan antara operasi lingkungan sektor swasta, tujuan bisnis, sasaran, struktur dan nilai-nilai yang sangat berbeda dengan sektor publik, "bahwa tidak mungkin untuk menerapkan teknik manajerial berhasil dalam sektor publik" dan bahwa tingkat perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan reformasi akan terlalu rumit (Butterfield et al., 2004, hal 396-7 dalam Heyer, 2010).

Seperti catatan Boston (1991), beberapa pendukung *New Publik Management* berasumsi bahwa komponen dari manajemen sektor swasta dapat diterapkan di sektor publik karena sejumlah persamaan antar kedua sektor tersebut. Namun, sektor publik dan swasta juga sangat berbeda dalam beberapa aspek fungsi dan bentuk. Sebagai akibat dari perbedaan mendasar antar sektor adalah salah jika berasumsi apriori bahwa praktik pengelolaan sektor swasta tentu lebih baik daripada orang-orang di sektor publik (Boston, 1991 dalam Heyer, 2010).

Sejumlah administrasionis publik secara sengit menyerang *New Publik Management* terutama pemerintah yang menciptakan kembali atau manifestasi-manifestasi *National*

Performance Review (NPR) Moe (1994) dalam Riccucci (2001) menunjukkan bahwa NPR gagal untuk memperhitungkan perbedaan penting antara sektor pemerintah dan swasta, dan khususnya mengabaikan premis konstitusi bahwa pemerintah didasarkan pada aturan hukum dan bukan mekanisme yang didorong pasar. Adapun kritik Dunleavy (2005) dalam de Vries (2010) adalah *New Publik Management* merupakan reaksi terhadap teori administrasi publik tradisional. Karena masalah keuangan dan kesejahteraan fiskal negara, diperlukan ide-ide baru untuk berinovasi di organisasi publik. Berdasarkan paradigma neo-liberal, set yang berbeda dari ide untuk organisasi publik dikembangkan, yang disebut 'manajemen publik baru' atau *New Publik Management*. Organisasi publik yang disamakan dengan organisasi swasta. Semangat kewirausahaan diperkenalkan ke ranah publik, namun, dimensi politik ditinggalkan. Dunleavy mengasumsikan hubungan antara *New Publik Management* tumbuhnya kompleksitas sosial, menurunnya kepercayaan birokrasi dan demokrasi keterwakilan. Berdasarkan analisisnya, adalah mungkin untuk memberikan penjelasan parsial untuk bangkitnya partai-partai populis, dari spektrum politik, yang sangat kritis terhadap manajemen publik baru, biasanya tanpa akrab dengan istilah. Kesimpulannya adalah bahwa manajemen publik baru mengarah ke lebih kompleksitas dan pada saat yang sama, tidak memecahkan masalah sosial.

Terdapat sejumlah hal yang dianggap sebagai kelemahan dari *New Publik Management*. Hal ini menurut *Economic and Social Council United Nation* (2003:9) diakibatkan oleh adanya

perbedaan besar antara kekuatan pasar dengan kepentingan publik, dan kekuatan pasar ini tidak dapat selalu memenuhi apa yang menjadi kepentingan publik. Bahkan dalam banyak hal publik sering kali tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam menentukan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambil pemerintah.

New Publik Management memang merupakan konsep yang lahir dari negara maju seperti Inggris sehingga ketika diterapkan pada negara berkembang tentu saja akan menghadapi masalah. Negara berkembang menghadapi masalah karena sistem dan karakteristik ekonomi yang berbeda dengan negara maju. Negara maju memiliki karakteristik pasar yang sudah mampu melepas sektor-sektor tertentu kepada mekanisme pasar karena didukung dari birokrasi dan aturan-aturan hukum yang kuat, sedangkan negara berkembang yang mencoba mengikuti *New Publik Management* tidak atau kurang pengalaman untuk menerapkan karakteristik ekonomi pasar ditambah kurangnya sumber daya manusia dan aturan hukum yang kuat mengakibatkan penerapan *New Publik Management* tidak dapat berlaku universal dan rentan mengalami kegagalan. Terdapat beberapa masalah dalam menerapkan konsep *New Publik Management* di negara berkembang, di antaranya:

- a. *New Publik Management* didasarkan pada penerapan prinsip/mekanisme pasar atas kebijakan publik dan manajemennya. Hal ini juga terkait dengan pengurangan peran pemerintah yang digantikan dengan pengembangan pasar, yaitu dari pendekatan pemerintah sentris (*state entire*)

menjadi pasar *sentries (market centred approach)*. Negara-negara berkembang memiliki pengalaman yang sedikit dalam ekonomi pasar. Pasar di negara berkembang relatif tidak kuat dan tidak efektif. Perekonomian pasar lebih banyak didominasi asing atau perusahaan asing, bukan pengusaha lokal atau pribumi.

- b. Terdapat permasalahan dalam privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi di negara-negara berkembang bukan merupakan tugas yang mudah. Karena pasar di negara berkembang belum kuat, maka privatisasi pada akhirnya akan berarti kepemilikan asing atau kelompok etnis tertentu yang hal ini dapat membahayakan, misalnya menciptakan keretakan sosial.
- c. Perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar apabila tidak dilakukan secara hati-hati bisa menciptakan wabah korupsi. Hal ini juga terkait dengan permasalahan budaya korupsi yang kebanyakan dialami oleh negara-negara berkembang. Pergeseran dari budaya birokrasi yang bersifat patronistik menjadi budaya pasar yang penuh dengan persaingan membutuhkan upaya yang kuat untuk mengurangi kekuasaan birokrasi.
- d. Terdapat masalah pada model pengontrakan dalam pemberian pelayanan publik jika aturan hukum dan *outcome* nya mudah ditentukan. Jika tujuan organisasi tidak jelas, atau terjadi wabah korupsi yang sudah membudaya maka penggunaan model-model kontrak kurang berhasil, terdapat permasalahan politisasi yang lebih besar di negara

berkembang dibandingkan di negara maju, termasuk dalam hal politisasi penyediaan pelayanan publik.

- e. Kesulitan penerapan *New Publik Management* di negara berkembang juga terkait dengan adanya permasalahan kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, permodalan, dan kapabilitas sumber daya manusia selain itu negara berkembang terus melakukan reformasi yang tidak terkait atau bahkan berlawanan dengan agenda *New Publik Management*.

2.1.4 Penerapan *New Publik Management* di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum

Doktrin *New Publik Management* didasarkan pengalaman reformasi pemerintahan di Amerika, Eropa, dan New Zealand, yang dipasarkan melalui kebijakan Bank Dunia ke negara-negara berkembang. *New Publik Management* dari satu sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen pemerintahan dari konservatisme administrasi klasik dengan jalan memasukkan cara bekerja sektor swasta ke dalam sektor pemerintahan. Dengan demikian sejalan dengan pandangan Osborn dan Gaebler (1993), *New Publik Management* mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi sejajar dengan sektor swasta (Denhardt dan Denhardt, 2003). *New Publik Management* bekerja dengan dipandu oleh 5 hal penting yaitu: *Pertama*, sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang ingin dilayani. *Kedua*, privatisasi yang dimaksudkan untuk mentransfer alokasi barang dan jasa dari pemerintah ke sektor swasta; *Ketiga*, *downsizing* dilakukan

dengan pengurangan dan penyederhanaan jumlah serta ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan. *Keempat*, debirokratisasi dijalankan dengan melakukan restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang akan lebih menekankan kepada hasil daripada proses. *Kelima*, manajerialisme yang merupakan pengadopsian cara kerja swasta pada organisasi pemerintahan. Perubahan dari pandangan pemerintah lokal tradisional menjadi suatu jaringan yang lebih kompleks dalam tata pemerintahan lokal (*local governance*) menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam mengatasi keterbatasan gerak pemerintah lokal. Pemerintah lokal tidak bisa lagi bekerja terisolasi dari aktor-aktor lain dalam lingkungan yang lebih luas, baik pemerintah lokal yang lain, pemerintah nasional, aktor privat maupun aktor kemasyarakatan (*civil society organization*). Dalam pandangan Rhodes (1996) konsep *governance* menegaskan keharusan adanya perubahan proses, metode dan capaian tata pemerintahan.

Dalam perkembangannya konsep *New Publik Management* mendapatkan kritikan karena terlalu berorientasi pada *profit-taking* dalam manajemen pemerintahan. Menurut para pengkritik ini seharusnya lebih menekankan kepada pemberian *service* yang baik kepada masyarakat dari kalangan manapun (prinsip demokrasi pada pelayanan publik) dan tidak melakukan diskriminasi pelayanan, karena pemerintah tidak berhadapan dengan pelanggan (*customer*) tapi warga (*citizen*). Cara pandang seperti ini muncul karena *New Publik Management* disebut dengan *New Publik Service* (NPS). Namun

demikian, konsep *governance*, *New Publik Management* dan *New Publik Service* sejalan dan seiring dalam pelaksanaan pemerintahan lokal. Ini dapat dipahami dengan munculnya peran dan hubungan yang baru di antara sektor pemerintahan dan sektor-sektor yang lain. *New Publik Managemen* dan *New Publik Service* memberikan *frame* yang menyediakan konteks bagi kerja dari birokrasi pemerintahan. Dengan *frame* ini konsep *governance* dapat dioperasionalkan. Sejak tahun 1990-an di kebanyakan negara di dunia telah terjadi transfer kekuasaan, sumber daya, dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Desentralisasi dan *governance* merupakan kombinasi yang tak dapat dipisahkan. Kiwanuka (2013):

Decentralization is sometimes regarded as an alternative to centralization, yet, when viewed from the policy angle, decentralization is a complement and not an alternative to centralization. Both local and central elements are needed in every political system. Sometimes decentralization is considered as falling exclusively within publik sektor reform, yet it is much more than publik sektor, civil service, or administrative reform. It involves the relationship of all societal actors, whether governmental, private sektor, or civil society.

Penelitian yang dilakukan Siti Zuhro, dkk. (2009) menemukan bahwa desentralisasi politik yang dilakukan sejak tahun 1999 di Indonesia memberikan tempat yang tepat bagi bangkit kembangnya lembaga-lembaga lokal seperti nagari, subak dan lain-lain. Ini menjelaskan fenomena peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembuatan, maupun

dalam mempengaruhi kebijakan publik. Secara kuantitatif peningkatan aktivitas publik ini dapat dipahami dengan melihat peningkatan jumlah CSO (*Civil Society Organization*) dari sekitar 10.000 pada tahun 1999 menjadi dua kali lipatnya setahun kemudian.

Anthony B. L. Cheung menyatakan bahwa reformasi birokrasi publik, dibawah paradigma *New Publik Management* hanya sebatas mengganti 'bungkus lama dengan yang baru tetapi secara riil watak birokrasi politik tetap eksis, dengan perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Kenyataan yang bisa diungkap adalah pada domain formulasi kebijakan di mana birokrasi menjadi kekuatan *bergaining* dengan legislatif, misalnya dalam persoalan kompromi dan lobi anggaran (*rent-seeking*). Pada level masyarakat, birokrasi publik seringkali menjadi instrumen politik (*power seeking politicians*) para calon kepala daerah, utamanya *incumbent*, dalam mempengaruhi warga dalam menentukan pilihan. Sementara pada saat yang bersamaan reformasi birokrasi dengan paradigma *New Publik Management* tengah diadopsi secara perlahan tapi menyeluruh dalam tubuh birokrasi publik di Indonesia.

Era reformasi memang merubah pola interaksi kekuasaan, dimana dominasi eksekutif selama 32 tahun terhenti dengan menguatnya lembaga legislatif dan ruang 'perlawanan' publik, seperti protes warga, gerakan *civil society*, dan sebagainya. Tetapi kerangka politik birokrasi tidak mengalami perubahan, birokrasi tetap berada sejajar dengan berbagai aktor-aktor politik, seperti legislatif, pejabat eksekutif, partai politik dan

kekuatan *civil society*, yang memainkan *bergaining positon*, loby, pengaruh sebagai representasi kepentingannya. Bahkan kooptasi partai politik di era pemerintahan pasca orde baru semakin jelas dan menguatkan tradisi birokrasi politik.

Reformasi birokrasi dengan paradigma *New Publik Management* sebagaimana dijelaskan oleh Eko Prasdjo (2007), merupakan reformasi untuk merubah paradigma administrasi publik lama, termasuk birokrasi di dalamnya, yang berbasiskan *traditional ruled based, authority driven process* dengan pendekatan baru yang berbasiskan pada *market* (mekanisme pasar) dan *competetion-driven based*. Mewujudkan birokrasi pemerintahan dengan paradigma *New Publik Management* yang berorientasi kepada pelanggan yang dioperasionalkan melalui: (a) Pelayanan lebih baik dengan tingkat pengeluaran sama atau lebih kecil. (b) Pemberian insentif dengan model mekanisme pasar untuk menghilangkan patologi birokrasi dan kebebasan memilih dalam pelayanan publik. (c) Pola manajemen yang terdesentralisasi dan bertanggung jawab. (d) Dikotomi antara penyedia dengan penyampai layanan. (e) Fokus kerja administrasi publik lebih kepada *output* dan *outcomes* ketimbang proses dan struktur.

Misi reformasi birokrasi publik oleh paradigma *New Publik Management* adalah merubah nilai politik birokrasi menjadi nilai profesional manajerial, nilai kompetisi, dan nilai kompetensi. Merubah persepsi, sikap dan perilaku birokrasi politik yang beorientasi pada kekuasaan menjadi berorientasi kepada masyarakat sebagai konsumen. Merubah kelembagaan birokrasi

politik yang kompleks, besar dan menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat menjadi model kelembagaan yang simpel, fleksibel, dan cepat merespon kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan. Misi ini memang akan menghadapi 'perlawanan' tradisi dan *status quo* birokrasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Eko Prasodjo (2007), bahwa reformasi administrasi publik dan juga birokrasi publik di Indonesia menghadapi persoalan yang krusial, yaitu ketidakjelasan batas antara negara, eksekutif dan administrasi publik atau birokrasi publik.

Implikasinya, sebagaimana dijelaskan oleh Miftah Thoha (2002) sebagaimana diungkapkan oleh M. Mas'ud Said (2007), semua organisasi birokrasi pemerintahan disamakan antara jabatan karir dan non karir serta antara jabatan birokrasi dan jabatan politik. Pendapat Thoha di atas secara eksplisit mengemukakan bagaimana watak dan perilaku birokrasi politik di Indonesia, sehingga apabila reformasi birokrasi publik dengan paradigma *New Publik Management* ingin berhasil, syarat utamanya dengan melakukan reformasi terhadap watak dan perilaku politik birokrasi. Terkait dengan kondisi tersebut, maka Miftah Thoha (2002) juga memberikan beberapa faktor yang harus dilalui terlebih untuk kelanggengan reformasi birokrasi publik di Indonesia. *Pertama*, faktor perubahan sistem politik dan kehadiran banyaknya partai politik merupakan faktor pengungkit (*leverage points*) yang harus dipertimbangkan dalam reformasi birokrasi pemerintah. *Kedua*, faktor pengungkit kedua adalah akuntabilitas publik yang disertai dengan upaya mengubah

sistem dari sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan baik politik maupun administrasi. *Ketiga*, faktor pengungkit ketiga adalah krisis ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi terpuruk. Krisis ekonomi ini mestinya ditanggapi oleh suatu kebijakan penghematan, efisiensi dan integrasi atas semua program pemerintah dan kegiatan pemerintah dan diperangnya korupsi.

Sebagai jalan pembuka untuk keberhasilan reformasi birokrasi publik di Indonesia, maka ada beberapa langkah menurut Budi Setiono (2002). *Pertama*, memperkuat kekuatan-kekuatan *civil society*, seperti partai politik, LSM, gerakan mahasiswa dan lainnya, agar kontrol semakin ketat. *Kedua*, memperkuat peran kelompok *civil society* tersebut ada birokrasi politik semakin tereliminasi. *Ketiga*, mereformasi secara terus-menerus sistem politik, sehingga tatanan interaksi antar aktor di dalamnya berjalan secara proporsional dan profesional serta tidak ada hegemoni satu dengan lainnya.

2.1.5 Reformasi Birokrasi dan *New Publik Management* di Indonesia

Di kebanyakan negara-negara berkembang yang sudah mengalami transformasi ke negara maju, reformasi administrasi negara merupakan langkah awal dan prioritas dalam pembangunan. Administrasi negara menjadi sektor pembangunan (*administrative development*) sekaligus menjadi instrumen penting pembangunan (*development administration*). Reformasi administrasi negara di negara-negara tersebut pada umumnya dilakukan melalui dua strategi yaitu; (1) merevitalisasi

kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi, dan (2) menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia (pegawai negeri) serta relasi antara negara dan masyarakat (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah: (1) modernisasi manajemen kepegawaian, (2) restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi (3) rekayasa proses administrasi pemerintahan; (3) anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, (4) serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Dalam konteks praktek pemerintahan di Indonesia, isu reformasi birokrasi ini menjadi sangat relevan utamanya dalam mempercepat krisis multidimensi yang belum selesai. Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Sebagai fakta sejarah bangsa sistem administrasi yang sekarang diterapkan adalah peninggalan pemerintah kolonial yang juga memiliki dasar-dasar hukum dan kepentingan kolonial. Struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa dari pada pemenuhan hak sipil warga negara (Thoha, 2003). Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Misi utama administrasi negara dengan paham kolonial tersebut adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu.

Ketiadaan komitmen dan paradigma tentang peran, kedudukan dan fungsi administrasi negara dalam pembangunan negara telah menjadi penyebab reformasi birokrasi di Indonesia tidak memiliki visi, kehilangan ruh dan berjalan sangat sporadis. Sampai sekarang tidak terlihat bentuk atau grand design yang diinginkan dalam rangka reformasi birokrasi karena tidak adanya kemauan politik dari pemerintah. Semua bentuk reformasi yang dijalankan di negara lain diadopsi tanpa satu tujuan yang terkait dan terintegrasi. Ketidakpahaman ini telah menyebabkan tidak saja gagalnya program pembangunan, tetapi juga marginalisasi peningkatan kapasitas administrasi negara sebagai agen pembangunan (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Reformasi birokrasi bukanlah sekadar perubahan struktur dan reposisi birokrasi. Lebih dari itu reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Harus terdapat kejelasan batas antara pejabat karir dan pejabat politik baik birokrasi pusat maupun daerah. Hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi pejabat politik dalam birokrasi (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi harus disertai monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan melembaga. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk

mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi bila terjadi kesalahan/penyimpangan arah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, perlu juga didukung oleh beberapa hal berikut:

- a. Penerapan manajemen perubahan (*change management*) agar tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Penerapan *knowledge management* agar terjadi suatu proses pembelajaran dan tukar pengalaman yang efektif bagi k/l dan pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- c. Penegakan hukum agar terwujud batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan masing-masing pihak.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

2.2. Korupsi

2.2.1 Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam

buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut: (Leden Marpaung, 2007: 5). "Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)".

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "Korupsi" (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan – badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. (Evi Hartanti: 2007: 8).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*.(Surachmin & Suhandi Cahaya: 2011: 10).

"Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran lainnya".

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya undang-undang korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderannya bahwa diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:(

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/1018030_20_file%205.pdf, Diakses pada tanggal 22 Februari 2021, Pukul 15.55 WITA).

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

2.2.3 Jenis Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi yaitu:(Komisi Pemberantasan Korupsi: 2006: 19).

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara.
 2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

- b. Suap–Menyuap
 - c. Penyalahgunaan Jabatan
 - d. Pemerasan Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
 - 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu:
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian.
 - 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.
 - e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan
 - f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
 - g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah).
- Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut:
- 1) *Discretionery corruption,*
 - 2) *Illegal corruption,*

- 3) *Mercenary corruption,*
- 4) *Ideologi corruption*

2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut: (R. Wiyono: 2005: 30)

- a. Secara melawan hukum.
- b. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2.2.5 Faktor Penyebab Korupsi

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi sangat beragam, dan saling berkaitan antara penyebab yang satu dengan penyebab lainnya, sehingga sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Dari hasil penelitian terdahulu yang sudah diterbitkan menjadi sebuah buku referensi, menyebutkan beberapa faktor dominan yang menjadi pemicu terjadinya korupsi di antaranya adalah:

- a. Sifat tamak dan keserakahan
- b. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri/pejabat negara
- c. Gaya hidup konsumtif
- d. Penghasilan yang tidak memadai
- e. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan
- f. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- g. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
- h. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

- i. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasi
- j. Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat
- k. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat itu sendiri
- l. Moral yang lemah
- m. Kebutuhan hidup yang banyak dan mendesak
- n. Malas atau tidak mau bekerja keras
- o. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar
- p. Lemahnya penegakan hukum
- q. Sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi
- r. Kurang atau tidak ada pengendalian
- s. Pendapat pakar lain penyebab korupsi
- t. Faktor politik
- u. Budaya organisasi pemerintah

Dari sekian banyak faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, penulis akan mengklasifikasinya menjadi 4 (empat) macam motif, seperti teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologne, mengatakan ada 4 (empat) akar penyebab korupsi yaitu *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*. (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13724/BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses tanggal 22 februari 2021 pukul 15.04 Wita).

a. *Corruption by Greed*

Motif korupsi karena kerakusan dan keserakahan koruptor, ia tidak pernah puas dengan keadaan dirinya.

b. *Corruption by Opportunity*

Motif korupsi karena sistem memberi lubang atau peluang terjadinya korupsi

c. *Corruption by Need*

Motif korupsi karena sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai.

d. *Corruption by Exposures*

Motif korupsi karena hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku rendah, sehingga calon korupsi dan masyarakat yang melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi sangat rendah dan tidak setimpal dengan korupsi yang dilakukannya.

2.2.6 Pengukuran Korupsi

Menurut, ada beberapa cara mengukur tingkat korupsi pada suatu negara: (Ridwan Zachrie Wijayanto: 2010:15)

1. *Corruption Perception Index (Transparency International)*

CPI merupakan agregat dari berbagai survei oleh lembaga independen mengenai tingkat korupsi dan hal – hal terkait. Pada 2008 CPI melibatkan 13 survei dari 11 lembaga independen diantaranya: ADB's Country Performance Assesment Rating, World Economic Forum's Global Competitiveness Report, African Development Bank, Bartelsmann Foundation, Global Insight, IMD Internatioanal Switzerland, Freedom House, World Bank (IDA dan IBRD), Economist Intelligence Unit, World Competitiveness Center, Political & Economic Risk Consultancy (PERC), dan Merchant International Group. Besarnya indeks persepsi korupsi antara

nol (0) untuk negara yang sangat korup sampai sepuluh (10) untuk negara yang sangat bersih dari korupsi

2. *Worldwide Governance Index – Control of Corruption (World Bank)*

Worldwide Governance Indikator (WGI) merupakan indikator yang mengukur enam komponen utama *governance* yaitu *Voice and Accountability, Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence, Rule of Law, Regulatory Quality, Control of Corruption*. WGI merupakan indeks agregat dari sekitar 35 survei independen yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen. WGI mempunyai enam skor sehingga WGI sangat bermanfaat dalam menyusun kebijakan melawan korupsi dan keenam indikator tersebut tidak langsung menunjukkan tingkat korupsi, tetapi merupakan tingkat skor *governance* dalam berbagai aspek. Skor indikatornya diantara -2.5 sangat lemah sampai 2.5 sangat kuat.

3. *Bribe Payers Index (Transparency International)*

CPI dan BPI dikeluarkan oleh transparansi Internasional tetapi dengan pendekatan yang berbeda. CPI mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi dikalangan pegawai pemerintah dan politisi suatu negara dengan menggunakan para pebisnis terutama asing, yang biasa melakukan aktivitas bisnis di negara bersangkutan. Sedangkan BPI mengukur tingkat korupsi para pebisnis dari negara tertentu, dengan responden para pebisnis senior dari 26 negara yang merupakan tujuan bisnis dan investasi utama.

Dengan kata lain BPI mengukur demand side dan CPI mengukur *supply side*.

4. *Global Integrity Index (Global Integrity)*

Global Integrity Index mengukur keberadaan, eksistensi, efektivitas, dan akses yang dimiliki publik terhadap mekanisme antikorupsi di level nasional pada masing – masing negara. *GI index* merupakan informasi untuk mengetahui mekanisme antikorupsi dan di masing–masing negara. Jadi *Global Integrity Index* tidak menggambarkan korupsi secara langsung.

5. *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*

PERC adalah sebuah konsultan berbasis di hongkong yang bergerak dibidang analisis resiko ekonomi dan politik. PERC melakukan berbagai Survei secara regular, salah satunya adalah tentang persepsi para ekspatriat tentang korupsi berbagai negara di asia. Skor indikator PERC berada antara nol (0) untuk negara sangat bersih dari korupsi sampai sepuluh (10) untuk negara yang sangat korup.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*), antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian gabungan merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan antara bentuk kualitatif dengan bentuk kuantitatif (Creswell, 2010:5), dalam arti lain metode penelitian gabungan adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, *valid*, *reliable* dan obyektif (Sugiyono, 2011).

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975 dalam Moleong, 2002), sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik (Sutedi, 2011).

Guna menggali data yang lebih akurat dan *reliable*, penelitian dilakukan melalui Survei dengan metode *purposive sampling*. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan harapan agar sampel tersebut mewakili permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Pengambilan sampel pada kelompok yang menerima layanan publik di OPD yang telah ditentukan. Pemilihan sampel akan

didasarkan pada kriteria pengamatan pada masing-masing OPD dilakukan dari **8 April 2021** sampai dengan **8 Mei 2021**.

3.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyusunan Dokumen Kajian Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan hasil Survei pada tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) OPD Zona Integritas dan 6 (enam) OPD yang belum masuk dalam Zona Integritas (ZI) di Kota Balikpapan Tahun 2021. Secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu :

1. Tahap persiapan

Kegiatan-kegiatan persiapan yang dilakukan dalam pekerjaan, terdiri dari :

- a) Koordinasi Tim Pelaksana Pekerjaan (Tim Ahli)
- b) Penelaahan/pengkajian Kerangka Acuan oleh Tim Pelaksana antara lain:
 - 1) Populasi dan Sampel.
 - 2) Kegiatan Survei ini dilakukan di wilayah Kota Balikpapan yang membawahi 6 (enam) Kecamatan yaitu: Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur.
 - 3) Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data.
 - 4) Penyusunan instrument, indikator dan kerangka sampel yang dilakukan dalam bentuk *Forum Discussion Group* (FGD).

- 5) Pengambilan sampel adalah dilakukan menggunakan metode "*purposive sampling*".
- 6) Kegiatan Survei menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan (responden) melalui wawancara tatap muka oleh enumerator/Surveier dengan panduan kuesioner.
- 7) Responden Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah pengusaha yang terpilih sebagai responden yang masih aktif minimal 1 (satu) tahun terakhir, dan minimal sudah mendapatkan pelayanan publik atau perizinan di OPD-DPMPT/Dinas/Instansi terkait.
- 8) Pengusaha yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan/DPMPT Kota Balikpapan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan serta Asosiasi Pengusaha Kota Balikpapan.
- 9) Penentuan alokasi sampel untuk masing-masing strata dilakukan dengan menggunakan metode alokasi persentase, 10% perusahaan besar, 20% perusahaan menengah, 30% perusahaan kecil, 40% masyarakat.
- 10) Jumlah sampel keseluruhan adalah 816 (delapan ratus) responden yang ada di 6 (enam) kecamatan wilayah Kota Balikpapan.
- 11) Persentase (%) sebaran responden adalah : 1) Responden terdiri dari laki-laki \pm 56% dan perempuan \pm 44%; 2) Usia responden terdiri dari Usia 18-25 tahun \pm 20%, Usia 26-40 tahun \pm 30%, Usia 41-65 tahun \pm 40%; 3) Pendidikan responden terdiri dari SMA/Sederajat \pm 40%, Sarjana \pm

60%; 4) Pekerjaan responden terdiri dari Ibu Rumah Tangga \pm 20%, Pelajar/Mahasiswa \pm 20%, Karyawan \pm 20%, Wiraswata \pm 20%, Lain-lain \pm 20%; 5) Responden Masyarakat Berkebutuhan Khusus/Difabel \pm 2%, dan Masyarakat Non Difabel \pm 98%.

- c) Penyusunan Jadwal kerja secara rinci.
- d) Pengembangan Metode Kajian beserta alat analisis yang akan digunakan.

Ruang Lingkup metode berpedoman pada ketentuan teknis yang sudah pernah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur yang sudah berkolaborasi dan bekerjasama dengan Transparansi International Indonesia dengan menggandeng tenaga ahli dan enumerator/Surveier yang sudah berpengalaman dari akademisi/perguruan tinggi.

- 1) Menjelaskan proses kegiatan secara sistematis disertai alur kerjanya
- 2) Menjelaskan tahapan pekerjaan persub item pekerjaan
- 3) Menjelaskan standart, aturan, pedoman yang akan dipakai pada pelaksanaan Survei
- 4) Menjelaskan produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan
- e) Penyusunan daftar data yang diperlukan
- f) Penyusunan rencana daftar pertanyaan/kuesioner kepada Perusahaan dan/atau Pengusaha, Masyarakat dan Dinas/Instansi terkait.
- g) Pembekalan dan Pengarahan Enumerator/Surveior.
- h) Penyusunan Laporan Pendahuluan.

2. Tahap Waktu Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan

a) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak ditanda-tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dengan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan																				
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
A.	TAHAP PERSIAPAN																					
1.	Persiapan & Mobilisasi Tenaga Ahli																					
2.	Pemilihan Metode Kerja																					
3.	Rencana Pelaksanaan Pekerjaan																					
4.	Penyusunan Laporan Pendahuluan																					
5.	Diskusi Pembahasan/ Presentasi/ Ekspose																					
6.	Perbaikan Laporan																					
7.	Penyampaian Laporan Pendahuluan																					
B.	TAHAP PELAKSANAAN																					
1.	Identifikasi Permasalahan																					
2.	Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder dan FGD																					
3.	Penyusunan Laporan Antara																					
4.	Diskusi Pembahasan/ Presentasi/ Ekspose																					
5.	Perbaikan Laporan																					
6.	Penyampaian Laporan Antara																					
C.	TAHAPAN PENYELESAIAN																					
1.	Analisa Data dan Formulasi																					

No	Kegiatan	Bulan																					
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
2.	Penyusunan Draft Laporan Akhir																						
3.	Diskusi Pembahasan/ Presentasi/ Ekspose																						
4.	Perbaikan Laporan																						
5.	Penyusunan Executive Summary																						
6.	Penyerahan Laporan Draft Final dan Laporan Final																						

b) Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan metode swakelola tipe 3 dengan tim pelaksana dari Tim Pelaksana dari Universitas Balikpapan dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan desain kuisisioner dalam bentuk lembaran maupun kuisisioner elektronik yang sesuai standar TII.
- 2) Melakukan perekrutan enumerator sesuai persyaratan yang ditentukan
- 3) Melakukan pembekalan dan pelatihan enumerator/Surveior
- 4) Pelaksanaan Survei oleh enumerator/Surveior yaitu:

Inventarisasi dan pengumpulan data yang diperlukan dalam pekerjaan bersumber dari berbagai buku laporan studi, laporan instansi (tingkat nasional dan daerah), laporan hasil penelitian dan informasi baik dari media cetak maupun media elektronik serta hasil survei lapangan.



- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja enumerator/surveior.
- 6) Melaksanakan penyelesaian permasalahan teknis maupun non teknis selama pelaksanaan survei.
- 7) Pelaksanaan Analisis data dan informasi yang meliputi:
 - a) Analisis data dari hasil survei maupun data sekunder
 - b) Verifikasi dan pengolahan data dari hasil survei sekaligus merupakan tahapan kajian yang akan merumuskan hasil dari Analisa Tim Ahli.
 - c) Melaporkan hasil pelaksanaan survei dan administrasi pelaksanaan pekerjaan kepada tim penyelenggara.
 - d) Tim Pelaksana harus menjamin kevalidan data hasil survei.
 - e) Selama melaksanakan pekerjaan harus mematuhi protokol Kesehatan.

3. Tahap Penyelesaian Pekerjaan

Tahap terakhir dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kajian Survei Indeks Persepsi Korupsi Balikpapan antara lain:

- a) Penulisan laporan dalam bentuk laporan akhir yang dilengkapi dengan draft laporan akhir;
- b) Ekspose/presentasi Laporan Akhir yang berisikan laporan pelaksanaan dan hasil kerja secara keseluruhan yang akan dipresentasikan di hadapan pemberi pekerjaan, tim pengawas dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

3.3. Jenis Data

Data yang diperoleh peneliti dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan dan melalui kuesioner. Data primer adalah hasil wawancara dan isian kuesioner persepsi korupsi dari *stakeholders* (responden) yang sudah ditentukan sebelumnya. Data primer yang didapatkan dan dihasilkan harus di verifikasi melalui validasi untuk meminimalisir data yang kurang logis, yang menunjukkan indikasi responden memberikan jawaban yang tidak sesuai atau tidak logis dan realistis

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Tersediannya data sekunder akan lebih mempermudah dan mempercepat jalannya penelitian. Namun karena umumnya data sekunder dimaksudkan untuk konsumen peneliti dalam umlah yang besar, seringkali data yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan peneliti (Kuncoro, 2011:30).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan beberapa metode sebagai berikut:

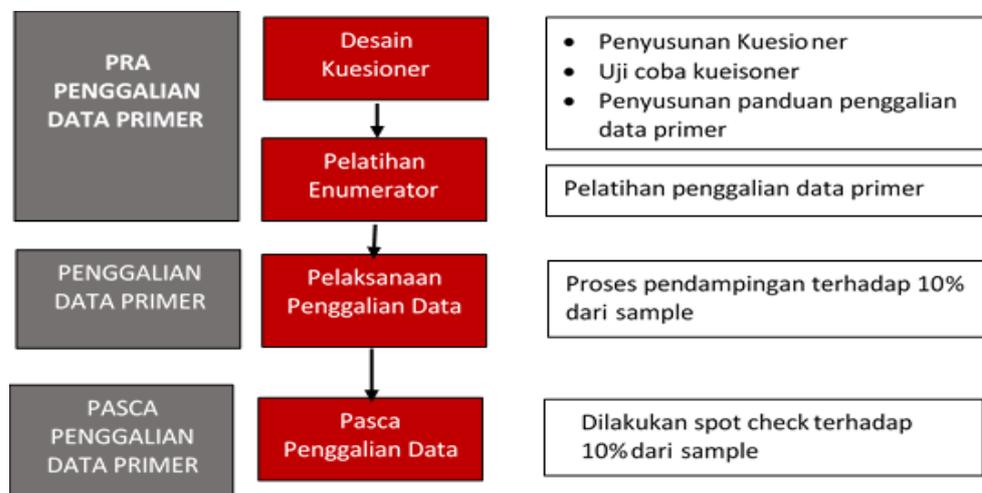
a. Wawancara

Untuk menguji apakah jawaban kuesioner tersebut logis/ sesuai atau tidak, dilakukan wawancara secara langsung dengan beberapa sumber yang sudah memiliki pemahaman yang sama atau memadai terkait dengan survei indeks persepsi korupsi.

Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face interviews*) dan jika tidak memungkinkan akan dilakukan secara jarak jauh. Pewawancara akan menghubungi responden terpilih. Kontrol yang ketat agar proses wawancara dilakukan dengan benar. Pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa langkah:

1. Melakukan workshop kepada semua tenaga pewawancara lapangan. Ini supaya mereka memahami maksud dan item-item yang ingin ditanyakan dalam wawancara. Dalam pelatihan (*workshop*) itu akan diberikan materi soal penarikan sampel dan pembahasan materi pertanyaan riset.
2. Kepada pewawancara akan disediakan panduan yang rinci. Panduan tersebut meliputi prosedur dalam memilih narasumber, prosedur dalam melakukan wawancara dan sebagainya. Panduan itu menekankan apa yang harus dilakukan oleh pewawancara, sehingga semua responden akan mendapat perlakuan yang sama.
3. Pilot wawancara (*try out*) akan dilakukan untuk mengukur daya serap pewawancara tentang materi kuesioner dan menganalisa kesulitan di lapangan (termasuk di dalamnya bahasa kuesioner, kendala dalam menemukan responden dan sebagainya).

4. Melakukan proses pendampingan (*witness*) sebanyak 10% dari total responden yang akan diwawancarai. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan agar wawancara telah dilakukan dengan benar.
5. Melakukan *spot chek* sebesar 10% dari total responden. Hasil wawancara tenaga lapangan akan diambil secara acak dan dicek kebenarannya oleh petugas *quality control*. Jika hasil pengecekan menunjukkan indikasi yang tidak valid maka hasil wawancara akan dibuang (di *drop*) dan akan dilakukan wawancara ulang kepada responden yang baru.



Gambar 3. 1. Alur Kendali Kualitas (Quality Control) Yang Akan Dijalankan

b. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi, akan dilakukan pengumpulan dan analisis terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan berbagai data sekunder yang terkait dengan perkembangan dinamika terkini (kontemporer).

c. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, Metode FGD yang bersifat kualitatif, berupa eksploratori atau pendalaman terhadap suatu masalah. FGD sebagai teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

d. Kuesioner

Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yaitu dengan cara responden memberikan jawaban pada daftar pertanyaan yang diberikan. Responden dipilih berdasarkan pertimbangan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang dipergunakan dalam kajian ini meliputi:

- a. Analisis Deskriptif**, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kualitatif dari hasil diskusi kelompok terfokus.
- b. Analisis Kualitatif**, yaitu analisis terhadap data yang berupa pernyataan atau data yang tidak berupa angka.
- c. Analisis Indeks Persepsi Korupsi**

Adapun alat analisis yang digunakan adalah:

a. Analisis Statistika Deskriptif

Metode ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode ini sehingga dapat diperoleh gambaran karakteristik responden, serta persepsi, preferensi, dan perilaku responden. Data disajikan dalam bentuk tabulasi dan diagram.

b. Metode *Purposive Sampling*

Metode *purposive sampling* digunakan dalam pengamatan ini untuk memilih responden dengan metode Survei. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan harapan agar sampel tersebut mewakili permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Pengambilan sampel pada kelompok yang menerima layanan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditentukan. Pemilihan sampel akan didasarkan pada kriteria pengamatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dari **8 April 2021** sampai dengan **8 Mei 2021**.

c. Nilai Indeks Persepsi Korupsi

Penyusunan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) didasarkan pada hasil survei persepsi korupsi masyarakat di Kota Balikpapan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan oleh Transparansi International Indonesia (TII). Metode ini meliputi unsur layanan, teknik pengumpulan data dan analisis data. Skala numerik yang mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah Kota Balikpapan. Disusun berdasarkan jawaban dari pelaku bisnis.

Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10, 0 berarti sangat korup, 10 sangat bersih. Indikator penilaian persepsi korupsi terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. Literasi Korupsi

Literasi Mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Stranas PPK).

Literasi mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tingkat pengetahuan masyarakat terkait kebijakan pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Indikator ini digunakan untuk mengukur pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dibuat oleh Pemerintah.

2. Daya saing lokal

Daya saing lokal merupakan kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah. Daya saing lokal diukur dengan indikator kapasitas birokrasi, kapasitas infrastruktur, Kualitas pengendalian inflasi, Kualitas kesehatan, Kualitas pendidikan tinggi, Efisiensi pasar barang, Serapan tenaga kerja, Ketersediaan pasar keuangan, Kesiapan teknologi, Kematangan sektor bisnis, dan Inovasi bisnis. Indikator-indikator ini digunakan untuk menentukan keunggulan kompetitif kota Balikpapan.

3. Penghambat kemudahan berusaha

Faktor penghambat kemudahan berusaha merupakan faktor-faktor yang disinyalir selama ini mempengaruhi dan dianggap menghambat masyarakat dalam berusaha. Adapun faktor – faktor tersebut adalah Akses permodalan, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Stabilitas politik, Akses infrastruktur, Birokrasi, Korupsi, Tarif pajak, Inflasi, Kriminalitas, Pembebasan lahan.

4. Potensi korupsi

Potensi korupsi adalah potensi kemungkinan terjadinya korupsi di wilayah Kota Balikpapan. Adapun faktor-faktor yang merupakan indikator untuk menghitung potensi kejadian korupsi adalah:

- a) Prevalensi korupsi: mengukur sebesar apa dan seberapa sering penyalahgunaan wewenang yang terjadi antara lembaga pelayanan publik dengan pelaku usaha di kota Balikpapan
- b) Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara: melihat bentuk pertanggungjawaban dana publik yang digunakan oleh pemerintah
- c) Motivasi korupsi : dorongan yang timbul terhadap pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi
- d) Dampak Korupsi pada masing-masing instansi
- e) Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi

5. Penilaian integritas bisnis

Penilaian integritas bisnis merupakan indikator untuk menilai seberapa besar risiko suap dan sistem pencegahan suap yang

efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif dan menguntungkan.

6. Resiko suap

Resiko suap merupakan dampak yang bisa muncul sebagai akibat adanya ketidaksesuaian dalam interaksi masyarakat dengan instansi pemerintah.

7. Integritas layanan kota

Integritas layanan kota adalah sebuah ukuran akan potensi resiko kejadian suap di instansi penyedia layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan penyedia pelayanan publik yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif.

8. Integritas layanan provinsi

Integritas layanan provinsi adalah sebuah ukuran akan potensi resiko kejadian suap di instansi penyedia layanan publik provinsi. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan penyedia pelayanan publik yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif.

9. Integritas layanan instansi vertikal di daerah

Integritas layanan instansi vertikal di daerah adalah sebuah ukuran akan potensi resiko kejadian suap di instansi penyedia layanan publik instansi vertikal di daerah. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan penyedia pelayanan publik yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem

pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif.

10. Integritas layanan pusat

Integritas layanan pusat adalah sebuah ukuran akan potensi resiko kejadian suap di instansi penyedia layanan publik pusat. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan penyedia pelayanan publik yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif.

11. Integritas BUMN dan BUMD

Integritas BUMN dan BUMD adalah sebuah ukuran akan potensi resiko kejadian suap di instansi BUMN dan BUMD. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan BUMN dan BUMD yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif.

12. Integritas asosiasi pengusaha

Integritas asosiasi pengusaha adalah sebuah ukuran akan potensi resiko kejadian suap paada asosiasi pengusaha. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan asosiasi yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif

13. Sistem integritas lokal

Sistem integritas lokal adalah sistem yang dibangun oleh pilar-pilar pemerintahan di daerah dalam upaya pencegahan dan korupsi yang komprehensif ditingkat lokal. Indikator ini diukur

dari peran pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kualitas tata kelola pilar dalam upaya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Kapasitas pilar dalam upaya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survei persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Setiap indikator penilaian persepsi terdiri dari 11 pilihan dengan konversi nilai 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10. Rentang indeks persepsi adalah dari 0 sampai dengan 10. 0 berarti sangat korup, 10 sangat bersih.

Tabel 3. 2. Indeks Persepsi Korupsi Skala 0-11 (skala sebelas)

Interval	Indeks untuk item positif	Indeks untuk item negatif
$M + 2,25 SD < \bar{x}$	10	0
$M + 1,75 SD \leq \bar{x} < M + 2,25 SD$	9	1
$M + 1,25 SD \leq \bar{x} < M + 1,75 SD$	8	2
$M + 0,75 SD \leq \bar{x} < M + 1,25 SD$	7	3
$M + 0,25 SD \leq \bar{x} < M + 0,75 SD$	6	4
$M - 0,25 SD \leq \bar{x} < M + 0,25 SD$	5	5
$M - 0,75 SD \leq \bar{x} < M - 0,25 SD$	4	6
$M - 1,25 SD \leq \bar{x} < M - 0,75 SD$	3	7
$M - 1,75 SD \leq \bar{x} < M - 1,25 SD$	2	8
$M - 2,25 SD \leq \bar{x} < M - 1,75 SD$	1	9
$\bar{x} < M - 2,25 SD$	0	10



Keterangan:

- M = Rata-rata ideal
- $M = \frac{1}{2}$ (skor max ideal + skor min ideal)
- SD = Simpangan baku ideal
- $SD = \frac{1}{6}$ (skor max ideal - skor min ideal)

(Sunardi Suryabrata, 1989: 59)

b) Jumlah nilai total persepsi korupsi dijumlahkan dan dianalisis sebagai Indeks Persepsi Korupsi dengan cara berikut:

$$NPU = \frac{\sum PU}{N} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- NPU = Nilai Persepsi Tiap Unsur
- PU = Persepsi tiap Unsur
- N = Banyak responden

$$IPK = \frac{\sum NPU}{BU} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- IPK = Indek Persepsi Korupsi
- NPU = Nilai Persepsi Unsur
- BU = Banyak unsur

Atau dengan perhitungan Rumus, sebagai berikut:

Nilai Persepsi Tiap Unsur = $\frac{\text{Jumlah Total Nilai Persepsi Tian Unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$...1

Nilai Persepsi Korupsi Tiap Unsur = $\frac{\text{Jumlah Persepsi Tiap Unsur}}{2}$...2

Indeks Persepsi Korupsi = $\frac{\text{Jumlah Total Nilai Persepsi Korupsi Tiap Unsur}}{\text{Jumlah responden}}$...3

Tabel 3. 3. IPK Kota Balikpapan 2017-2021

No	Indikator	IPK Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Literasi Korupsi	5	6,32	6	7	?
	Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6				
2	Daya Saing lokal	7	7,66	7	7	?
3	Penghambat Kemudahan Berusaha	6	7,52	8	8	?
4	Potensi Korupsi	5	7,33	4,73	6,93	?
5	Penilaian Integritas Bisnis	7	7,01	6,83	7,8	?
6	Risiko Suap	6	6,57	7	7	?
7	Integritas Layanan Kota	8	6,06	7	7	?
8	Integritas Layanan Provinsi	7		8	6	?
9	Integritas Layanan Instansi Vertikal di Daerah	7		7	6	?
10	Integritas Layanan Pusat	7		7	7	?
11	Integritas BUMN dan BUMD	8	6,47	7	7	?
12	Integritas Asosiasi Pengusaha	6	7,02	7	6	?
13	Sistem Integritas Lokal	8	6,75	7	7,25	?
Realisasi IPK Kota Balikpapan (rata2)		6,64	6,87	6,89	6,92	?
Target IPK Kota Balikpapan		6,62	6,70	6,75	6,80	6,90

Tabel 3. 4. IPK OPD Zona Integritas Kota Balikpapan 2017-2021

No	OPD	IPK Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan		6,83	6,85	6,86	?
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan		6,92	6,94	6,93	?
3	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan		7,02	7,01	7,08	?
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan		6,52	7,09	7,28	?
5	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan		6,72	6,73	6,69	?
6	Kecamatan Balikpapan Selatan		6,97	6,87	6,82	?
7	Kecamatan Balikpapan Barat		6,82	6,79	6,73	?
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan		6,84	6,93	6,91	?
9	RSKB Sayang Ibu Kota Balikpapan		6,85	6,95	6,93	?
10	SMP Negeri 1 Balikpapan		7,02	7,02	6,99	?
Realisasi IPK Kota Balikpapan (rata2)		6,64	6,87	6,89	6,92	?
Target IPK Kota Balikpapan		6,62	6,70	6,75	6,80	6,90

Tabel 3. 5. IPK OPD Non Zona Integritas Kota Balikpapan 2021

No	OPD	IPK Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD)					?
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan					?
3	Kecamatan Balikpapan Tengah					?
4	Kecamatan Balikpapan Kota					?
5	Kecamatan Balikpapan Timur					?
6	Kecamatan Balikpapan Utara					?
Realisasi IPK Kota Balikpapan (rata2)						?
Target IPK Kota Balikpapan						?

3.6 Cara Menghitung Indeks

a. Menghitung Indeks

1. Sebelum menghitung indeks per unsur, terlebih dahulu kita mencari interval berdasarkan jumlah item pertanyaan, jumlah skor tertinggi dan skor terendah, berdasarkan rumus yang sudah diajukan, sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Tabel Interval Indeks Rumus

INTERVAL	Indeks	
	-	+
$M + 2,25 \quad SD < \chi$	0	10
$M + 1,75 \quad SD < \chi < M + 2,25 \quad SD$	1	9
$M + 1,25 \quad SD < \chi < M + 1,75 \quad SD$	2	8
$M + 0,75 \quad SD < \chi < M + 1,25 \quad SD$	3	7
$M + 0,25 \quad SD < \chi < M + 0,75 \quad SD$	4	6
$M - 0,25 \quad SD < \chi < M + 0,25 \quad SD$	5	5
$M - 0,75 \quad SD < \chi < M - 0,25 \quad SD$	6	4
$M - 1,25 \quad SD < \chi < M - 0,75 \quad SD$	7	3
$M - 1,75 \quad SD < \chi < M - 1,25 \quad SD$	8	2
$M - 2,25 \quad SD < \chi < M - 1,75 \quad SD$	9	1
$\chi < M - 2,25 \quad SD$	10	0

Sumber: Suryadi Suryabrata

2. Setelah rumus diketahui, barulah kita mencari nilai M (Mean), dan SD (Standar Deviasi) = $1/6(\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah})$ untuk menentukan nilai interval. Sebagai contoh Unsur Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) "Apakah anda pernah mendengar tentang adanya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)? a. Tidak b. Ya,

3. Dalam kuesioner tersebut, terdapat ada 1 item pertanyaan, skor tertinggi 2 (Ya), dan skor terendah 1 (Tidak), maka tabel interval indeks adalah sebagai berikut:

$$M (\text{Mean}) = 1/2(\text{skor tertinggi} + \text{skor terendah})$$

$$M (\text{Mean}) = \frac{1}{2}(2+1)$$

$$M (\text{Mean}) = 1/2(3)$$

$$M (\text{Mean}) = 1,50$$

$$SD (\text{Standar Deviasi}) = 1/6(\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah})$$

$$SD (\text{Standar Deviasi}) = 1/6(2 - 1)$$

$$SD (\text{Standar Deviasi}) = 1/6(1)$$

$$SD (\text{Standar Deviasi}) = 0,17$$

4. Sehingga Nilai M (mean) dan SD (Standar Deviasi) dapat dimasukkan dalam interval indeks.
5. Kemudian kita masukan Nilai M (Mean) dan SD (Standar Deviasi) sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Tabel Interval Indeks dalam proses perhitungan

INTERVAL	Indeks	
	-	+
1,50 + 2,25 0,17 ≤ <i>x</i>	0	10
1,50 + 1,75 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 + 2,25 0,17	1	9
1,50 + 1,25 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 + 1,75 0,17	2	8
1,50 + 0,75 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 + 1,25 0,17	3	7
1,50 + 0,25 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 + 0,75 0,17	4	6
1,50 - 0,25 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 + 0,25 0,17	5	5
1,50 - 0,75 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 - 0,25 0,17	6	4
1,50 - 1,25 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 - 0,75 0,17	7	3
1,50 - 1,75 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 - 1,25 0,17	8	2
1,50 - 2,25 0,17 ≤ <i>x</i> < 1,50 - 1,75 0,17	9	1
<i>x</i> < 1,50 - 2,25 0,17	10	0

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

6. Sehingga tabel Interval Indeks dapat disusun menjadi sebagai berikut:

Tabel 3. 8. Tabel Interval Indeks hasil perhitungan

INTERVAL	Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2)	Indeks	
		-	+
1,875	$\leq \chi$	0	10
1,792	$\leq \chi < 1,875$	1	9
1,708	$\leq \chi < 1,792$	2	8
1,625	$\leq \chi < 1,708$	3	7
1,542	$\leq \chi < 1,625$	4	6
1,458	$\leq \chi < 1,542$	5	5
1,375	$\leq \chi < 1,458$	6	4
1,292	$\leq \chi < 1,375$	7	3
1,208	$\leq \chi < 1,292$	8	2
1,125	$\leq \chi < 1,208$	9	1
	$\chi < 1,125$	10	0

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

7. Setelah kita mengetahui Nilai Interval Indeks, barulah kita mencari nilai rata-rata dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berdasarkan jumlah skor dibagi jumlah responden, dalam menjawab kuesioner pertama untuk unsur kedua (U2), yaitu Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2), berdasarkan hasil survei diketahui bahwa:

Tabel 3. 9. Tabel Indeks Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2) pada OPD Zona Integritas

No	Nama OPD ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	50	1,640	7
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	88	54	1,630	7
3	Dinas Perhubungan	82	50	1,640	7
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	83	51	1,627	7
5	Dinas Ketenagakerjaan	82	50	1,640	7
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	85	52	1,635	7
7	Kecamatan Balikpapan Barat	79	52	1,519	6
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	94	56	1,679	7
9	RSIA Sayang Ibu	82	50	1,640	7
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	69	42	1,643	7
Rata-rata Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) OPD ZI					6,90

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

8. Dalam tabel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, misal diketahui Jumlah Skor sebesar 82 yang berasal dari jumlah kumulatif perhitungan pernyataan (U2), dengan jumlah responden yang disurvei sebanyak 50 Responden, sehingga dapat diketahui nilai rata-rata (χ) = $82/50 = 1,640$, untuk mencari indeks dari nilai tersebut maka dilihatlah table interval Indeks, direntangan berapa nilai rata-rata (χ) = 1,640. Setelah melihat interval indeks, bahwa nilai 1,640 diantara nilai interval $1,625 \leq \chi = 1,640 < 1,708$, masuk dalam indeks positif sebesar 7. Dikatan indeks positif karena item pertanyaanya positif, artinya

bahwa semakin baik responden memberikan respon jawaban positif, maka nilai indeks akan semakin tinggi.

Tabel 3. 10. Tabel Indeks Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2) pada OPD Non Zona Integritas

No	Nama OPD Non-ZI	Jumlah	R	\bar{X}	Indeks+
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83	51	1,627	7
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	82	50	1,640	7
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	82	50	1,640	7
4	Kecamatan Balikpapan Kota	82	53	1,547	6
5	Kecamatan Balikpapan Timur	90	55	1,636	7
6	Kecamatan Balikpapan Utara	82	50	1,640	7
Rata-rata Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) OPD Non-ZI					6,83

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

9. Dalam tabel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non-Zona Integritas (ZI) Kecamatan Balikpapan Kota, dimana diketahui Jumlah Skor sebesar 82, dengan jumlah responden yang disurvei sebanyak 53 Responden, sehingga dapat diketahui nilai rata-rata (\bar{x}) = $82/50 = 1,547$, untuk mencari indeks dari nilai tersebut maka dilihatlah table interval Indeks, direntangan berapa nilai rata-rata (\bar{x}) = $1,547$. Setelah melihat interval indeks, bahwa nilai $1,547$ diantara nilai interval $1,542 \leq \bar{x} < 1,625$ atau $1,542 \leq \bar{x} = 1,547 < 1,625$, masuk dalam indeks positif sebesar 6. Dikatakan indeks positif karena item pertanyaanya positif, artinya bahwa semakin baik responden memberikan respon jawaban positif, maka nilai indeks akan semakin tinggi.

10. Dalam menghitung Rata-rata Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) adalah jumlah seluruh Indeks dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) dibagi jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI), berdasarkan hasil perhitungan diketahui Rata-rata Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) = $(7+7+7+7+7+7+6+7+7+7)/10=69/10 = 6,90$
11. Dalam menghitung Rata-rata Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non- Zona Integritas (ZI) adalah jumlah seluruh Indeks dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non- Zona Integritas (ZI) dibagi jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non- Zona Integritas (ZI), berdasarkan hasil perhitungan diketahui Rata-rata Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non- Zona Integritas (ZI) = $(7+7+7+6+7+7)/10=41/6 = 6,83$
12. Demikian cara perhitungan indeks ini dibuat, semoga dapat membantu dalam memahami isi dari hasil analisis dan pembahasan IPK Kota Balikpapan Tahun 2021.

b. Contoh Penghitungan Indeks OPD

Tabel 3. 11. Interval Indeks Literasi Korupsi (U1)

INTERVAL	Indeks Literasi Korupsi (U1)	Indeks	
		-	+
	$1,875 \leq \chi$	0	10
	$1,792 \leq \chi < 1,875$	1	9
	$1,708 \leq \chi < 1,792$	2	8
	$1,625 \leq \chi < 1,708$	3	7
	$1,542 \leq \chi < 1,625$	4	6
	$1,458 \leq \chi < 1,542$	5	5
	$1,375 \leq \chi < 1,458$	6	4
	$1,292 \leq \chi < 1,375$	7	3
	$1,208 \leq \chi < 1,292$	8	2
	$1,125 \leq \chi < 1,208$	9	1
	$\chi < 1,125$	10	0

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 3. 12. Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99	50	1,980	10
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	103	54	1,907	10
3	Dinas Perhubungan	94	50	1,880	10
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	97	51	1,902	10
5	Dinas Ketenagakerjaan	96	50	1,920	10
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	100	52	1,923	10
7	Kecamatan Balikpapan Barat	98	52	1,885	10
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	105	56	1,875	10
9	RSIA Sayang Ibu	97	50	1,940	10
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	79	42	1,881	10
Rata-rata Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD ZI					10,00

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 3. 13. IPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD ZI)		1
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
NO	Responden	50
U1	Literasi Korupsi	10,00
U2	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	7,00
U3	Daya Saing Lokal	7,00
U4	Penghambat Kemudahan Berusaha	6,00
U5	Potensi Korupsi	6,00
U6	Penilaian Integritas Bisnis	6,83
U7	Risiko Suap	8,00
U8	Integritas Layanan Kota	7,50
U9	Integritas Layanan Provinsi	6,00
U10	Integritas Layanan Vertikal Daerah	8,00
U11	Integritas Layanan Pusat	5,00
U12	Integritas Layanan BUMN/BUMD	5,00
U13	Integritas Asosiasi Pengusaha	10,00
U14	Sistem integritas Lokal	7,00
Jumlah		99,33
Realisasi IPK 2021 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		7,10
IPK 2020 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		6,86
SELISIH		0,24
Target IPK 2021		6,90

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK KAJIAN

4.1. Kondisi Geografis Kota Balikpapan

Kota Balikpapan secara astronomis terletak antara 1,0'- 1,5' Lintang Selatan dan antara 116,5' – 117' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Balikpapan memiliki batas-batas: Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara; Selatan dan Timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Balikpapan berada pada bagian timur Pulau Kalimantan, dan berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan Selat Makassar. Secara administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (*Lima*) Kecamatan dan 27 (*Dua Puluh Tujuh*) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan 7 (*Tujuh*) Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan, kini Balikpapan terdiri dari 6 (*Enam*) Kecamatan dan 34 (*Tiga Puluh Empat*) Kelurahan. Enam kecamatan tersebut antara lain: Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Kota.

4.2. Pemerintahan

Kota Balikpapan terdiri dari 6 (*Enam*) Kecamatan dan 34 (*Tiga Puluh Empat*) Kelurahan. Dari 34 (*Tiga Puluh Empat*) Kelurahan tersebut, didasarkan pada kepadatan penduduk, presentase rumah tangga pertanian, serta keberadaan atau akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu Kelurahan, 32 (*Tiga Puluh Dua*) Kelurahan diklasifikasikan sebagai urban dan 2 (*Dua*) Kelurahan sebagai rural.

Kota Balikpapan memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi Daerah. Pada tahun 2020 tercatat Kota Balikpapan memiliki 4.704 (*Empat Ribu Tujuh Ratus Empat*) ASN, dengan 1.938 (*Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan*) laki-laki dan 2.768 (*Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan*) perempuan. Jumlah ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, dimana Kota Balikpapan memiliki 4.895 (*Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima*) Aparatur Sipil Negara. Mayoritas Aparatur Sipil Negara di Kota Balikpapan memiliki pendidikan tingkat sarjana atau lebih tinggi, yang mencapai 56,37% atau hampir separuh dari keseluruhan Aparatur Sipil Negara Kota Balikpapan.

Tabel 4. 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	2020		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sampai dengan Sekolah Dasar	42	1	43
2	SLTP/Sederajat	93	5	98
3	SLTA/Sederajat	744	359	1103
4	Diploma I, II/Akta I, II	11	35	46
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	185	623	808
6	Sarjana/Magister/Doktor	872	1780	2652
Jumlah		1936	2768	4704

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Jika dirata-rata jumlah Aparatur Sipil Negara sebesar 4.704 (*Empat Ribu Tujuh Ratus Empat*) dan dengan jumlah penduduk sebesar 688.318 (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas*) jiwa maka dapat diasumsikan 1 (*Satu*) orang Aparatur Sipil Negara di Kota Balikpapan melayani sekitar 146 (*Seratus Empat Puluh Enam*) orang.

Dari total 4.704 (*Empat Ribu Tujuh Ratus Empat*) Aparatur Sipil Negara yang bekerja di instansi pemerintahan Kota Balikpapan 2.768 (*Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan*) diantaranya adalah perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah pegawai laki-laki.

Sedangkan dilihat dari tingkat kepangkatan, jumlah pegawai dengan kepangkatan terbanyak adalah pegawai dengan golongan III yang berjumlah 2.329 (*Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan*) pegawai, kemudian diikuti dengan pegawai golongan IV sebanyak 1.219 (*Seribu Dua Ratus Sembilan Belas*) pegawai, dan selanjutnya

diikuti pegawai dengan tingkat golongan II dan I. Data selengkapnya mengenai Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Pangkat/Golongan/Ruang (1)	2020		Jumlah (4)
		Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	
1	I/A (Juru Muda)			
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	18	1	19
3	I/C (Juru)	7	-	7
4	I/D (Juru Tingkat I)	51	3	54
Golongan I		76	4	80
5	II/A (Pengatur Muda)	50	3	53
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	123	69	192
7	II/C (Pengatur)	196	127	322
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	333	176	509
Golongan II		701	375	1076
9	III/A (Penata Muda)	179	368	547
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	203	461	664
11	III/C (Penata)	183	383	566
12	III/D (Penata Tingkat I)	207	345	552
Golongan III		772	1557	2329
13	IV/A (Pembina)	237	548	785
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	130	276	406
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	19	8	27
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	-	1
17	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
Golongan IV		387	832	1219
Jumlah		1936	2768	4704

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Tabel 4. 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Dinas/Instansi Pemerintah (1)	2020		Jumlah (4)
		Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22	12	34
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	26	30	56
3	Dinas Perhubungan	107	11	118
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	10	15	25
5	Dinas Ketenagakerjaan	8	15	23
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	528	1506	2034
7	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	54	17	71
8	Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan	30	82	112
9	Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Tipe "B"	6	47	53
10	Kecamatan Balikpapan Utara	13	5	18
11	Kecamatan Balikpapan Selatan	10	10	20
12	Kecamatan Balikpapan Barat	10	9	19
13	Kecamatan Balikpapan Timur	11	4	15
14	Kecamatan Balikpapan Tengah	8	11	19
15	Kecamatan Balikpapan Kota	9	9	18
16	SMPN 1 Balikpapan	15	28	43
Jumlah				2678

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

4.3. Kependudukan

Kota Balikpapan merupakan Kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebesar 688.318 (Enam

Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas) jiwa. Dari jumlah tersebut, 352.802 (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua*) jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 335.516 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Belas*) jiwa berjenis kelamin perempuan.

Kecamatan Balikpapan Utara memiliki jumlah penduduk terbesar, sebesar 169.150 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh*) jiwa, Kecamatan Balikpapan Selatan sebesar 145.007 (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh*) jiwa dan Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar 106.121 (*Seratus Enam Ribu Seratus Dua Puluh Satu*) jiwa. Selanjutnya, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur masing-masing 94.123 (*Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga*) jiwa dan 90.243 (*Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga*) jiwa. Dan yang terakhir Kecamatan Balikpapan Kota dengan jumlah penduduk sebesar 82.843 (*Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga*) jiwa.

Tabel 4. 4. Penduduk, Laju Pertumbuhan per Tahun, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk (Ribuk)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010 - 2020
	(1)	(2)	(3)
1	Balikpapan Selatan	145.007	2.51
2	Balikpapan Kota	82.843	0.40
3	Balikpapan Timur	90.243	3.92
4	Balikpapan Utara	169.150	3.11
5	Balikpapan Tengah	106.952	0.79
6	Balikpapan Barat	94.123	1.18
Kota Balikpapan		688.318	2.06

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Data di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan per Tahun 2010 sampai dengan 2020 paling tinggi terdapat pada Kecamatan Balikpapan Timur dengan rasio 3.92 (*Tiga Koma Sembialn Puluh Dua*), kemudian ditempati oleh Kecamatan Balikpapan Utara dengan rasio 3.11 (*Tiga Koma Sebelas*). Dan disusul oleh Kecamatan Balikpapan Selatan dengan rasio 2.51 (*Dua Koma Lima Puluh Satu*). Sementara Kecamatan Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki rasio dengan masing-masing adalah 1.18 (*Satu Koma Delapan Belas*), dan 0.79 (*Nol Koma Tujuh Puluh Sembilan*). Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dengan pertahun 2010 sampai dengan 2020 dengan rasio terendah ditempati oleh Kecamatan Balikpapan Kota dengan rasio 0.40 (*Nol Koma Empat Puluh*).

Tabel 4. 5. Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
	(1)	(2)	(3)
1	Balikpapan Selatan	21.07	3.858
2	Balikpapan Kota	12.04	7.714
3	Balikpapan Timur	13.11	691
4	Balikpapan Utara	24.57	1.273
5	Balikpapan Tengah	15.54	9.931
6	Balikpapan Barat	13.67	521
Kota Balikpapan		100.00	1.368

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Data di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2020 Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki jumlah penduduk dengan kepadatan tertinggi sebesar 9.931 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu) jiwa/km² dan untuk tingkat kepadatan penduduk terendah, terdapat pada wilayah Kecamatan Balikpapan sebesar 691 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) jiwa/km².

Tabel 4. 6. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
	(1)	(2)
1	Balikpapan Selatan	105.23
2	Balikpapan Kota	104.05
3	Balikpapan Timur	106.91
4	Balikpapan Utara	104.78
5	Balikpapan Tengah	103.31
6	Balikpapan Barat	107.15
Kota Balikpapan		105.15

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Tabel 4. 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0-4	30.494	29.059	59.553
2	5-9	28.050	26.797	54.847
3	10-14	29.740	27.401	57.141
4	15-19	29.547	26.938	56.485
5	20-24	30.980	28.243	59.223
6	25-29	30.428	28.963	59.391
7	30-34	29.895	28.659	58.554
8	35-39	28.552	27.546	56.098
9	40-44	26.946	26.034	52.980
10	45-49	23.315	22.450	45.765
11	50-54	18.941	18.616	37.557
12	55-59	15.824	15.742	31.556
13	60-64	12.093	11.562	23.665
14	65-69	8.816	8.303	17.119
15	70-74	5.306	4.941	10.247
16	75+	3.875	4.262	8137
Kota Balikpapan		352.802	335.516	688.318

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk dengan kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Balikpapan tahun 2020 paling banyak ditempati oleh kelompok umur 20 sampai dengan 24 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 30.980 (*Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh*) jiwa, sementara pada jenis kelamin perempuan paling banyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 28.963 (*Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam*

Puluh Tiga) jiwa. Sementara untuk jumlah penduduk dengan kelompok umur dan jenis kelamin terendah di Kota Balikpapan berada pada kelompok umur 75 tahun ke atas dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 3.875 (*Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima*) jiwa dan jenis kelamin perempuan sebesar 4.262 (*Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua*) jiwa.

Tabel 4. 8. Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Balikpapan Selatan	74.350	70.657	145.007
2	Balikpapan Kota	42.243	40.600	82.843
3	Balikpapan Timur	46.628	43.615	90.243
4	Balikpapan Utara	86.550	82.600	169.150
5	Balikpapan Tengah	54.346	52.606	106.952
6	Balikpapan Barat	48.685	45.438	94.123
Kota Balikpapan		352.802	335.516	688.318

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

BAB V

HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap responden, yang telah dilakukan dari 8 April 2021 – 8 Mei 2021. Responden dari survei indeks persepsi Kota Balikpapan tahun 2021, melibatkan 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) dan 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI). Berikut responden 816 (delapan ratus enam belas) telah diperoleh dari lokasi survei sebagai berikut:

A. Responden Lokasi Survei

Tabel 5. 1. Jumlah Responden Berdasarkan Lokasi Survei Zona Integritas

No	Lokasi Survei	Jumlah	Persentase
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	6,1%
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	54	6,6%
3	Dinas Perhubungan	50	6,1%
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	51	6,3%
5	Dinas Ketenagakerjaan	50	6,1%
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	52	6,4%
7	Kecamatan Balikpapan Barat	52	6,4%
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	56	6,9%
9	RSIA Sayang Ibu	50	6,1%
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	42	5,1%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Tabel 5. 2. Jumlah Responden Berdasarkan Lokasi Survei Non Zona Integritas

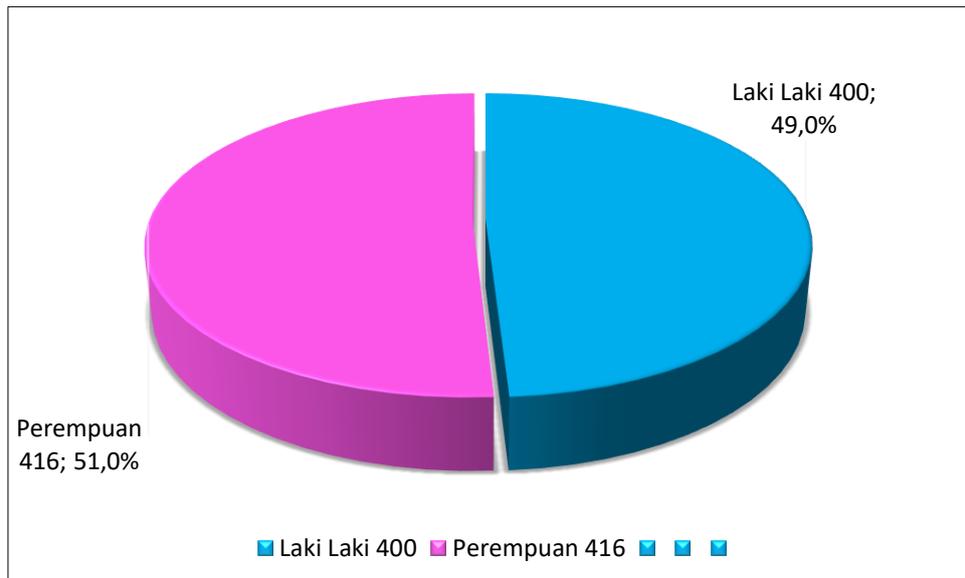
No	Lokasi Survei	Jumlah	Persentase
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51	6,3%
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD)	50	6,1%
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	50	6,1%
4	Kecamatan Balikpapan Kota	53	6,5%
5	Kecamatan Balikpapan Timur	55	6,7%
6	Kecamatan Balikpapan Utara	50	6,1%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

B. Demografi Responden

1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

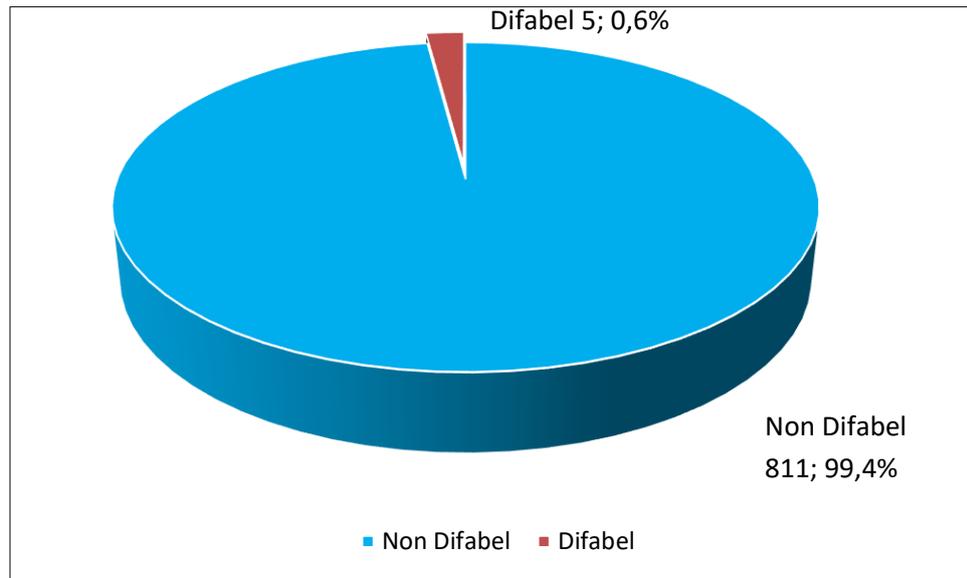
Berdasarkan 816 (delapan ratus enam belas) responden yang terlibat dalam survei indeks perspsi korupsi Kota Balikpapan tahun 2021 ini, didominasi oleh responden perempuan sebesar 416 responden (51,0%) dan laki-laki sebesar 400 responden (49%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada survei pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang mana jumlah responden laki-laki lebih banyak dari pada jumlah responden perempuan yang terbagi yang terbagi atas responden laki-laki sebesar 62% dan responden perempuan sebesar 38%.



Gambar 5.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Responden berdasarkan Penyandang Difabel

Penyandang Difabel merupakan bagian dari responden dalam survei indeks persepsi korupsi Kota Balikpapan tahun 2021 ini. Responden dari 816 (delapan ratus enam belas) yang terlibat dalam survei terkategori penyandang Difabel sebesar 5 responden (0,6%) dan non Difabel sebesar 811 responden (99,4%). Responden Difabel merupakan karyawan perusahaan 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang pengajar.



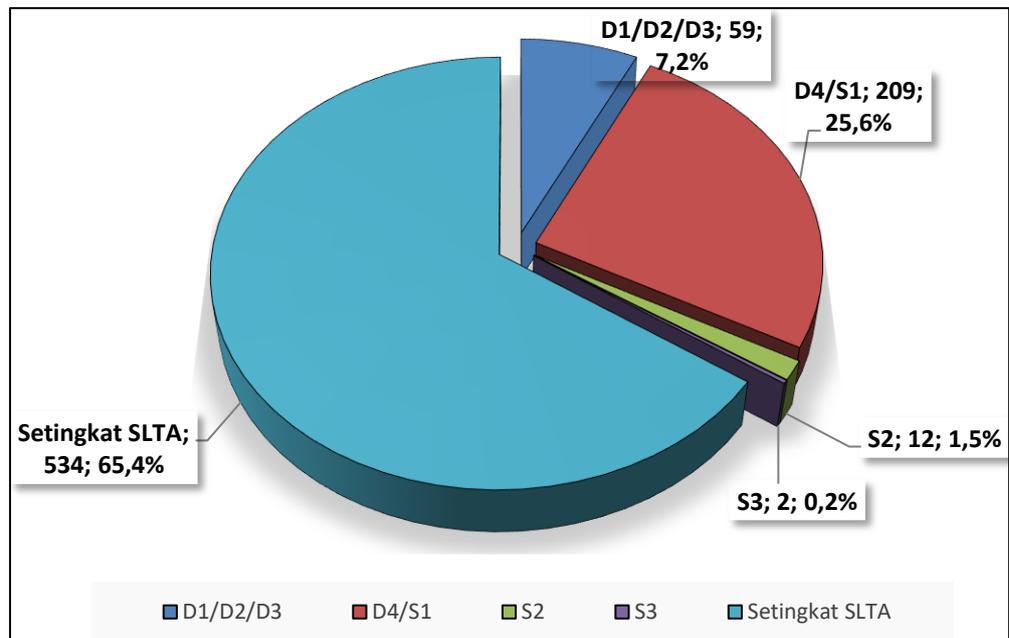
Gambar 5.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Penyandang Difabel

3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan kategori responden dengan tingkat pendidikan terakhir, responden dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat merupakan responden yang paling banyak terlibat dalam survei indeks persepsi korupsi Kota Balikpapan tahun 2021 sebesar 534 responden (65,4%), tingkat pendidikan D4/S1 sebesar 209 responden (25,6%), tingkat pendidikan D1/D2/D3 sebesar 59 responden (7,2%), tingkat pendidikan S2 sebesar 12 responden (1,5%), dan S3 sebesar 2 responden (0,2%).

Hal ini jika dibandingkan dengan survei indeks persepsi korupsi Kota Balikpapan tahun 2020, maka jumlah responden untuk tingkat pendidikan S2/S3 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 4 responden menjadi 12 responden, begitu pula untuk jenjang pendidikan SLTA juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 472 responden menjadi 534 responden,

sedangkan responden SLTP pada tahun 2021 tidak masuk dalam kategori tingkat pendidikan.

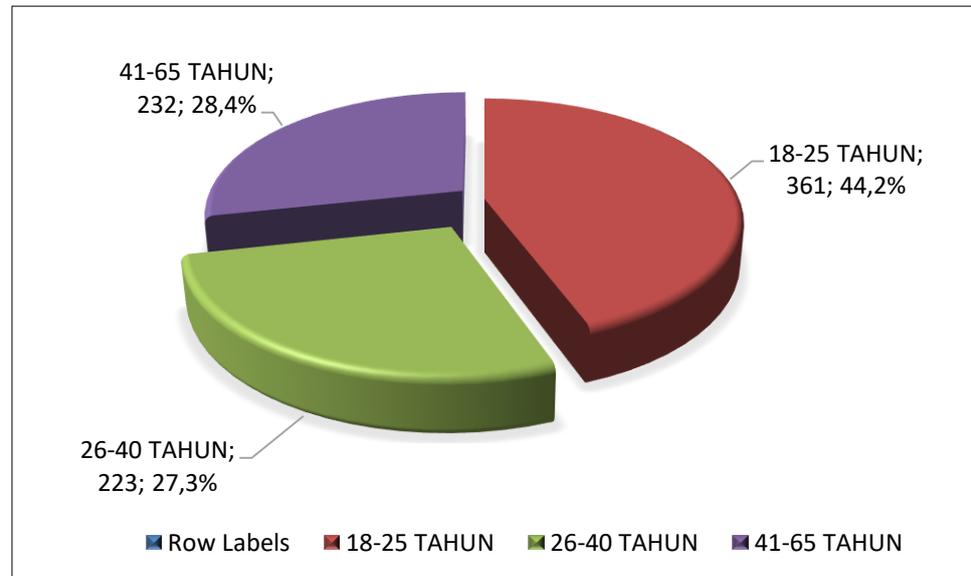


Gambar 5. 3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

4. Responden Berdasarkan Usia

Kategori responden berdasarkan kelompok usia, pada survei indeks persepsi korupsi tahun 2021 membagi responden dengan dengan 3 (tiga) kategori kelompok usia yang terdiri dari kelompok usia 18-25 tahun, 26-40 tahun, dan 41-65 tahun. Pembagian 3 (tiga) kelompok usia ini berbeda pada survei tahun 2020 yang melakukan pembagian kelompok usia responden dengan 4 (empat) kelompok usia yang terdiri dari kelompok usia 17-21 tahun, 21-35 tahun, 35-50 tahun dan kelompok usia 50 tahun keatas. Pada 3 (tiga) pembagian kelompok usia ini dari hasil survei yang dilakukan diperoleh jumlah responden dengan kelompok usia 18-25 tahun merupakan responden terbesar dengan jumlah sebesar 361 responden (44,3%), kelompok usia 41-65 tahun

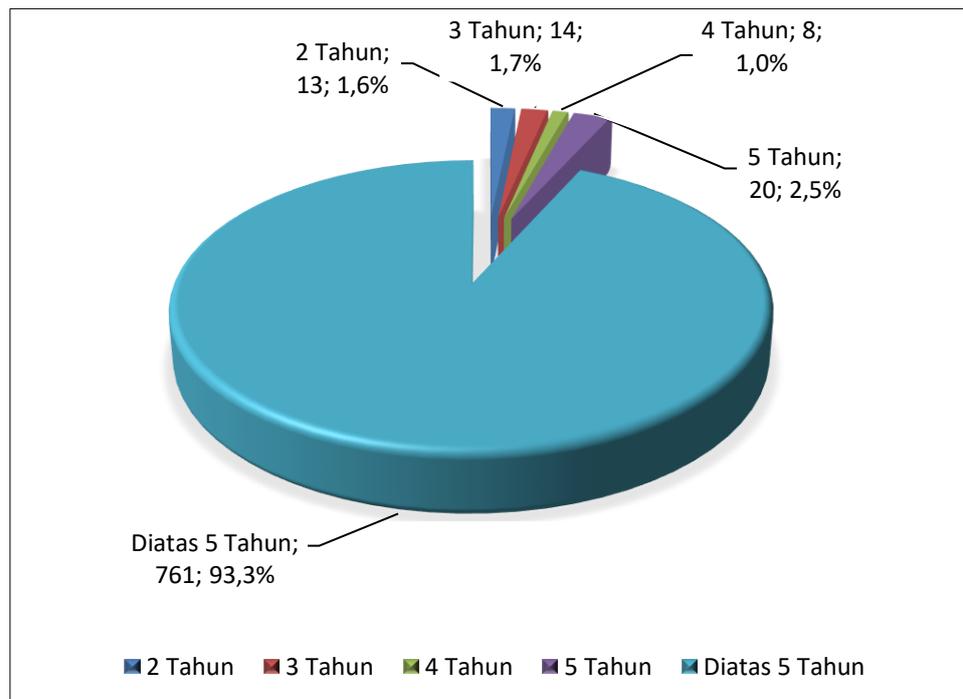
sebesar 232 responden (28,4%), dan kelompok usia 26-40 tahun sebesar 223 responden (27,3%).



Gambar 5. 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

5. Responden Berdasarkan Lama Tinggal di Balikpapan

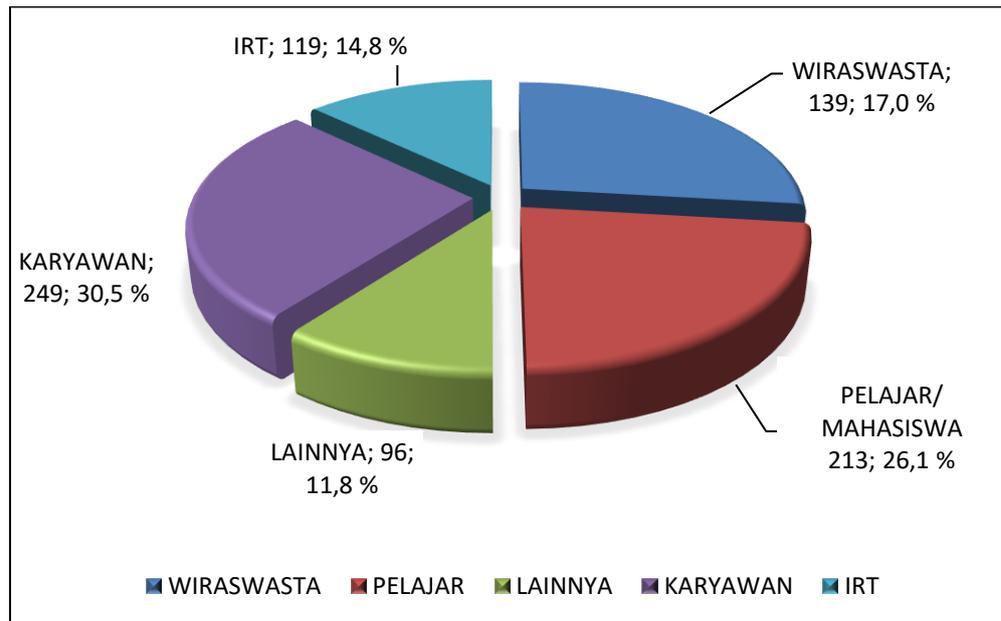
Kategori responden berdasarkan lama tinggal di Balikpapan, pada survei indeks persepsi korupsi tahun 2021 membagi responden dengan 5 (lima) kategori yaitu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan diatas 5 tahun. Dari 816 (delapan ratus enam belas) responden yang terlibat dalam survei ini yang lama tinggalnya diatas 5 tahun sebesar 761 responden (93,3%), lama tinggal 5 tahun 20 responden (2,5%), lama tinggal 3 tahun 14 responden (1,7%), lama tinggal 2 tahun sebesar 13 responden (1,6%) dan dengan lama tinggal 4 tahun 8 responden (1,0%).



Gambar 5. 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Tinggal di Balikpapan

6. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

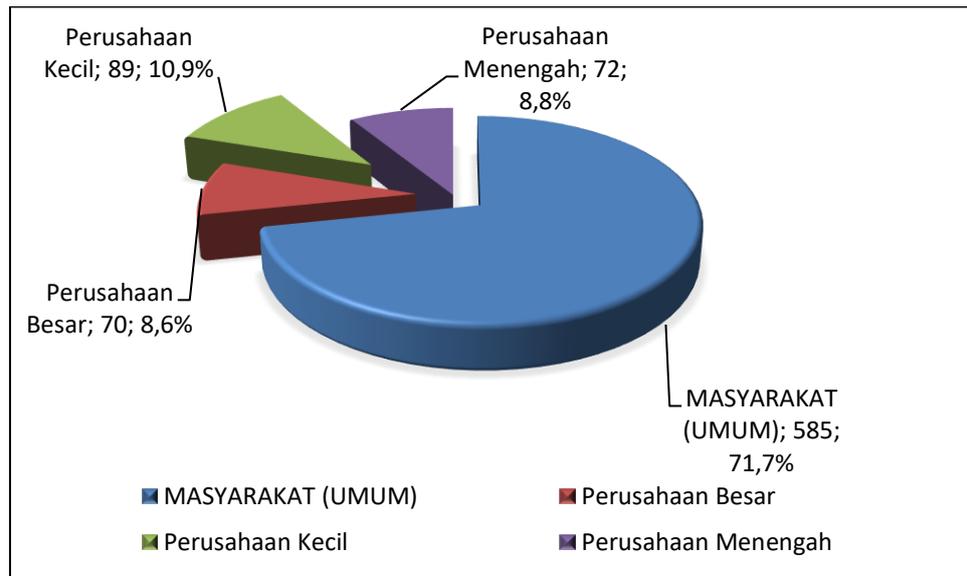
Kategori pekerjaan dari 816 (delapan ratus enam belas) responden terdiri dari wiraswasta, pelajar, karyawan, ibu rumah tangga dan lainnya. Adapun jumlah responden tertinggi ke terendah yaitu karyawan sebesar 249 responden (30,5%); pelajar/mahasiswa sebesar 213 responden (26,1%); wiraswasta sebesar 139 responden (17,0%), IRT sebesar 119 responden (14,8%) dan lainnya sebesar 96 responden (11,8%).



Gambar 5. 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

7. Distribusi Responden Berdasarkan Usaha/Alokasi Responden

Kategori berdasarkan usaha/alokasi responden yang digunakan dalam survei indeks persepsi korupsi Kota Balikpapan tahun 2021 dibagi menjadi 4 (empat) kelompok usaha yang terdiri dari masyarakat (umum), perusahaan besar, perusahaan menengah (sedang), dan perusahaan kecil. Dari 816 (delapan ratus enam belas) responden yang masuk dalam kelompok masyarakat (umum) sebesar 585 responden (71,7%), kelompok usaha perusahaan kecil sebesar 89 responden (10,9%), kelompok usaha perusahaan menengah sebesar 72 responden (8,8%), dan kelompok usaha perusahaan besar sebesar 70 responden (8,6%).



Gambar 5. 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Usaha/Alokasi Responden

C. Hasil Survei

I. Perhitungan Tiap Unsur Pertanyaan

1. Literasi Korupsi (U1)

Tolak ukur literasi korupsi di Kota Balikpapan menggunakan 2 (dua) unsur yaitu Literasi mengenai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Literasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PPK). Berikut hasil olah data dari ke 2 (dua) unsur di atas.

- a. Literasi Korupsi mengenai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Pernah tidaknya responden mendengar tentang adanya undang-undang tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil survei disajikan pada table 5.3. sebagai berikut:

Tabel 5.3. Literasi mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	Tidak	80	9,80%
2	Ya	736	90,20%
Jumlah		816	100,00%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 816 (delapan ratus enam belas) responden yang mengetahui Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebesar 73 responden (90,20%), sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 80 responden (9,80%). Tentunya pengetahuan akan Undang-Undang Tipikor ini memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, akan tetapi tingkat pemahaman akan hal ini tidak menjadi salah satu alat ukur dalam survei indeks persepsi Kota Balikpapan tahun 2021. Berdasarkan hasil survei didapatkan data sumber informasi tentang korupsi sebagaimana tersajikan dalam tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4. Sumber Informasi tentang Korupsi

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	Ya, Brosur (Flyer)	2	0,25%
2	Ya, Lainnya	13	1,59%
3	Ya, Media Elektronik	604	74,02%
4	Ya, Media Massa	107	13,11%
5	Ya, Web Pemerintah Kota	10	1,23%
Jumlah		736	90,20%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.4, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat akan literasi mengenai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari sumber informasi tentang korupsi yang diperoleh dari 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) responden bahwa media elektronik merupakan media paling tinggi untuk mendapatkan informasi tentang korupsi dengan sebesar 604 responden (74,02%), selanjutnya diikuti dengan media massa sebesar 107 responden (13,11%), media lainnya sebesar 13 responden (1,59%), *website* Pemerintah Kota Balikpapan sebesar 10 responden (1,23%), dan yang paling terendah adalah brosur sebesar 2 responden (0,25%).

- b. Literasi Korupsi mengenai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PPK) (U2).

Pernah tidaknya responden mendengar tentang adanya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Tabel 5.5. Pengetahuan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	Tidak	305	37,38%
2	Ya	511	62,62%
Jumlah		816	100,00%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Sama halnya dengan pengetahuan terhadap literasi korupsi mengenai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari 816 (delapan ratus enam belas) responden yang mengetahui literasi korupsi mengenai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PPK) sebesar 511 responden (62,62%), sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 305 responden (37,38%).

Tabel 5.6. Sumber Informasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	Ya, Brosur (Flyer)	2	0,25%
2	Ya, Lainnya	7	0,86%
3	Ya, Media Elektronik	419	51,35%
4	Ya, Media Massa	70	8,58%
5	Ya, Web Pemerintah Kota	13	1,59%
Jumlah		511	62,62 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Mengenai pengetahuan masyarakat akan literasi korupsi mengenai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PPK) dari sumber informasi tentang korupsi yang diperoleh dari 511 (lima ratus sebelas) responden bahwa media elektronik merupakan media paling tinggi untuk mendapatkan informasi tentang korupsi dengan sebesar 419 responden (51,35%), selanjutnya diikuti dengan media massa sebesar 70 responden (8,58%), *website* Pemerintah Kota Balikpapan sebesar 13 responden (1,59%), media lainnya sebesar 7 responden (0,86%), dan yang paling terendah adalah brosur sebesar 2 responden (0,25%). Berdasarkan ke 2 (dua) unsur literasi korupsi di atas, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Kota Balikpapan akan literasi korupsi sudah bagus karena melebihi 50% responden.

2. Persepsi Terhadap Korupsi

a. Daya saing lokal (U3)

Pada unsur daya saing lokal ini, merupakan kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah. Berdasarkan hasil survei tentang kualitas daya saing lokal di kota Balikpapan. Adapun penilaian yang diberikan kepada responden terdiri dari pilihan: sangat buruk, buruk, biasa, baik, dan sangat baik. Perhitungan dalam pemberian skor yang tertinggi yaitu sangat baik. Namun sesuai hasil survei responden lebih banyak menilai sangat baik daripada sangat buruk.

Hasil dari tabel 5.7, menunjukkan bahwa penilaian buruk pada Kota Balikpapan yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan sebesar 86 responden (10,54%) dan kualitas pengendalian sebesar (9,31%). Penilaian baik pada Kota Balikpapan adalah kualitas kesehatan sebesar 539 responden (66,05%), sementara penilaian sangat baik pada Kota Balikpapan adalah ketersediaan layanan perbankan sebesar 166 responden (20,34%).

Tabel 5.7. Daya Saing Lokal

No	Daya Saing Lokal	Sangat Buruk		Buruk		Biasa		Baik		Sangat Baik	
		Jumlah Responden	Presentase								
1	Kapasitas Birokrasi	3	0,37%	23	2,82%	262	32,11%	482	59,07%	46	5,64%
2	Kapasitas Infrastruktur	2	0,25%	26	3,19%	180	22,06%	535	65,56%	73	8,95%
3	Kualitas Pengendalian Inflasi	2	0,25%	76	9,31%	294	36,03%	390	47,79%	54	6,62%
4	Kualitas Kesehatan	2	0,25%	23	2,82%	146	17,89%	539	66,05%	106	12,99%
5	Kualitas Pendidikan	0	0,00	27	3,31%	153	18,75%	536	65,69%	100	12,25%
6	Kondisi dan Kenyamanan Pasar Tradisional	2	0,25%	71	8,70%	199	24,39%	455	55,76%	89	10,91%
7	Ketersediaan Lapangan Pekerjaan	6	0,74%	86	10,54%	264	32,35%	384	47,06%	76	9,31%
8	Ketersediaan Layanan Perbankan Bank Nasional, Pemerintah, Swasta	0	0 %	13	1,59%	102	12,50%	535	65,56%	166	20,34%
9	Kesiapan Teknologi	2	0,25%	42	5,15%	212	25,98%	486	59,56%	74	9,07%
10	Kematangan Sektor Bisnis	1	0,12%	18	2,21%	242	29,66%	480	58,82%	75	9,19%
11	Inovasi Bisnis	1	0,12%	26	3,19%	229	28,06%	475	58,21%	85	10,42%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

b. Penghambat Kemudahan Berusaha (U4)

Tabel 5.8. Penghambat Kemudahan Berusaha

No	Penghambat Kemudahan Berusaha	Sangat Buruk		Buruk		Biasa		Baik		Sangat Baik	
		Jumlah Responden	Presentase								
1	Akses permodalan	0	0 %	33	4,04%	271	33,21%	456	55,88%	56	6,86%
2	Penyelesaian perselisihan antara karyawan dan perusahaan	4	0,49%	25	3,06%	297	36,40%	430	52,70%	60	7,35%
3	Stabilisasi politik (kondisi keamanan, konflik sosial dan politik)	2	0,25%	31	3,80%	286	35,05%	443	54,29%	54	6,62%
4	Akses infrastruktur (ketersediaan air, listrik, jalan, telepon, transportasi umum)	1	0,12%	24	2,94%	214	26,23%	515	63,11%	62	7,60%
5	Birokrasi (prosedur pelayanan)	2	0,25%	32	3,92%	270	33,09%	457	56,00%	55	6,74%
6	Korupsi (tip/biaya tambahan)	18	2,21%	148	18,14%	312	38,24%	297	36,40%	41	5,02%
7	Tarif pajak dan retribusi daerah	2	0,25%	30	3,68%	269	32,97%	469	57,48%	46	5,64%
8	Inflasi (kenaikan harga barang)	2	0,25%	87	10,66%	295	36,15%	383	46,94%	49	6,00%
9	Kriminalitas	12	1,47%	118	14,46%	279	34,19%	352	43,14%	55	6,74%
10	Pembebasan lahan (kemudahan pembebasan lahan dan kejelasan status lahan)	9	1,10%	72	8,82%	315	38,60%	375	45,96%	45	5,51%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.8 menunjukkan bahwa faktor yang paling menghambat kegiatan berusaha di Kota Balikpapan adalah faktor sangat buruk yaitu korupsi/pemberian biaya tambahan sebesar 18 responden (2,21%), selanjutnya faktor kriminalitas sebesar 11 responden (1,47%), yang berikutnya adalah pembebasan lahan sebesar 9 responden (1,10 %). Namun secara keseluruhan dalam segala bidang pada faktor penghambat kemudahan berusaha, jumlah responden yang memberikan penilaian sangat buruk sebanyak 52 (6,39%) dibandingkan penilaian sangat baik mencapai 523 (64,08%). Artinya Kota Balikpapan cukup mampu dalam menghadapi atau menurunkan faktor penghambat kemudahan berusaha pada masa yang akan datang.

3. Kejadian Korupsi / Potensi Korupsi (U5)

Pada bagian ini akan diuraikan pendapat responden tentang kejadian korupsi atau potensi korupsi di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Pengukuran kejadian korupsi atau potensi korupsi ini dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) indikator yaitu prevalensi korupsi, mekanisme akuntabilitas keuangan Negara, motivasi korupsi, frekuensi korupsi, dan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

a. Prevalensi Korupsi

Mengukur seberapa besar dan seberapa sering penyalahgunaan wewenang yang terjadi antara lembaga pelayanan publik dengan pelaku usaha di Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil survei kejadian korupsi atau potensi korupsi di Kota Balikpapan.

Hasil survei berdasarkan tabel 5.9 Prevalensi Korupsi, dapat dijelaskan bahwa pengukuran kejadian korupsi atau potensi korupsi ini dilakukan dengan indikator prevalensi korupsi, yang menggunakan 6 (enam) unsur. Berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa sebesar 313 responden (38,36%) memberikan penilaian paling tinggi dengan kategori **pernah** yaitu terjadi pada unsur kejadian suap dan korupsi. Sedangkan penilaian paling rendah sebesar 20 responden (2,45%) terdapat pada kategori **sangat sering** yaitu terjadi pada unsur pejabat meminta atau menerima suap.

Berikut tabel 5.9 Prevalensi korupsi, berdasarkan hasil survei dari responden.

Tabel 5.9. Prevalensi Korupsi

No	Prevalensi Korupsi	Sangat Sering		Sering		Pernah		Jarang		Tidak Pernah	
		Jumlah Responden	Presentase								
1	Kejadian suap dan korupsi	39	4,78 %	111	13,6 %	313	38,36 %	196	24,02 %	157	19,24 %
2	Pejabat meminta atau menerima suap	20	2,45 %	105	12,87 %	302	37,01 %	216	26,47 %	173	21,2 %
3	Penyalahgunaan keuangan publik untuk kepentingan pribadi	37	4,53 %	98	12,01 %	258	31,62 %	226	27,7 %	197	24,14 %
4	Korupsi oleh institusi lokal	24	2,94 %	83	10,17 %	258	31,62 %	255	31,25%	196	24,02 %
5	Korupsi oleh pegawai publik di tingkat nasional	39	4,78 %	89	10,91 %	266	32,6 %	225	27,57%	197	24,14 %
6	Korupsi oleh pegawai publik di tingkat lokal	26	3,19 %	77	9,44 %	272	33,33 %	229	28,06%	212	25,98 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



b. Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara

Tabel 5.10. Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara

No	Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara	Sangat Sering		Sering		Pernah		Jarang		Tidak Pernah	
		Jumlah Responden	Presentase								
1	Tidak adanya prosedur yang jelas dan akuntabel dalam alokasi keuangan publik	7	0,86 %	79	9,68 %	196	24,02 %	220	26,96 %	314	38,48 %
2	Banyak dana khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	27	3,31 %	95	11,64 %	231	28,31 %	177	21,69 %	286	35,05 %
3	Banyak penunjukan pejabat negara (pimpinan OPD) oleh Kepala Daerah	19	2,33 %	90	11,03 %	247	30,27 %	175	21,45 %	285	34,93 %
4	Tidak adanya audit keuangan publik oleh lembaga independen	11	1,35 %	55	6,74 %	221	27,08 %	227	27,82 %	302	37,01 %
5	Tidak adanya pengendalian independen untuk mengawasi pejabat yang korup	13	1,59 %	64	7,84 %	232	28,43 %	202	24,75 %	305	37,38 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Dari tabel 5.10, dapat dijelaskan bahwa pengukuran kejadian korupsi atau potensi korupsi ini dilakukan dengan indikator Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dana publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dengan menggunakan 5 (lima) unsur. Berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa sebesar 314 responden (38,48%) memberikan penilaian paling tinggi dengan kategori **tidak pernah** yaitu terjadi pada unsur tidak adanya prosedur yang jelas dan akuntabel dalam alokasi keuangan publik. Sedangkan penilaian paling rendah sebesar 7 responden (0,86%) terdapat pada kategori **sangat sering** yaitu terjadi pada unsur tidak adanya prosedur yang jelas dan akuntabel dalam alokasi keuangan publik.

c. Motivasi Korupsi

Tabel 5.11. Motivasi Korupsi

No	Motivasi Korupsi	Sangat Sering		Sering		Pernah		Jarang		Tidak Pernah	
		Jumlah Responden	Presentase								
1	Korupsi untuk memperoleh dukungan politik berlebih.	49	6,00 %	180	22,06 %	291	35,66%	135	16,54%	161	19,73%
2	Korupsi akibat adanya perlakuan istimewa.	51	6,25 %	173	21,2 %	307	37,62%	129	15,81%	156	19,12%
3	Korupsi akibat adanya pengamanan proyek pemerintah.	48	5,88 %	152	18,63%	281	34,44%	140	17,16%	195	23,9%
4	Korupsi akibat jual beli pengaruh	39	4,78 %	155	19,0%	281	34,44%	155	19%	186	22,79%
5	Korupsi untuk pendanaan tak tercatat untuk partai politik	39	4,78 %	132	16,18%	251	30,76%	181	22,18%	213	26,1%

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Dari tabel 5.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa pengukuran kejadian korupsi atau potensi korupsi ini dilakukan dengan indikator motivasi korupsi dengan menggunakan 5 (lima) unsur. Berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa sebesar 307 responden (37,62%) memberikan penilaian paling tinggi dengan kategori **pernah** terjadi pada unsur korupsi akibat adanya perlakuan istimewa. Sedangkan penilaian paling rendah terjadi pada 2 (unsur), masing-masing sebesar 39 responden (4,78%) terdapat pada kategori **sangat sering** yaitu unsur korupsi akibat jual beli pengaruh dan korupsi untuk pendanaan tak tercatat untuk partai politik.

d. Frekuensi Korupsi

Tabel 5.12. Frekuensi Korupsi

No	Frekuensi Korupsi	Sangat Sering		Sering		Pernah		Jarang		Tidak Pernah	
		Jumlah Responden	Presentase								
1	Korupsi di perizinan	55	6,74%	79	9,681%	237	29,04%	204	25%	241	29,53%
2	Korupsi di pelayanan dasar (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang)	27	3,31%	120	14,71%	217	26,59%	236	28,92%	216	26,47%
3	Korupsi di perpajakan	12	1,47%	83	10,17%	223	27,33%	256	31,37%	242	29,66%
4	Korupsi di pengadaan barang/ jasa	31	3,80%	73	8,946%	240	29,41%	243	29,78%	229	28,06%
5	Korupsi di peradilan	23	2,82%	91	11,15%	237	29,04%	230	28,19%	235	28,8%
6	Korupsi di penerbitan kuota perdagangan	22	2,70%	61	7,475%	243	29,78%	223	27,33%	267	32,72%
7	Korupsi di kepolisian	52	6,37%	159	19,49%	282	34,56%	171	20,96%	152	18,63%
8	Korupsi di perkreditan	13	1,59%	72	8,824%	260	31,86%	216	26,47%	255	31,25%
9	Korupsi di bea cukai	15	1,84%	70	8,578%	242	29,66%	227	27,82%	262	32,11%
10	Korupsi di instansi pengawas dan pemeriksa	20	2,45%	66	8,088%	226	27,7%	245	30,02%	259	31,74%
11	Korupsi di militer	3	0,37%	47	5,76%	203	24,88%	235	28,8%	328	40,2%
12	Korupsi di eksekutif (Pemerintah Kota)	28	3,43%	82	10,05%	288	35,29%	209	25,61%	209	25,61%
13	Korupsi di legislatif (DPRD)	45	5,51%	101	12,38%	288	35,29%	176	21,57%	206	25,25%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.12, dapat dijelaskan bahwa pengukuran kejadian korupsi atau potensi korupsi yang dilakukan dengan indikator frekuensi Korupsi selama 12 bulan terakhir di Kota Balikpapan dengan menggunakan 13 (tigabelas) unsur. Berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa sebesar 328 responden (40,2%) memberikan penilaian paling tinggi dengan kategori **tidak pernah** yaitu terjadi pada unsur korupsi di militer. Sedangkan penilaian paling rendah sebanyak 3 responden (0,37%) terdapat pada kategori **sangat sering** juga terjadi pada unsur Korupsi di militer.

e. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

Tentang upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Kota Balikpapan. Penilaian terhadap beberapa upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dibawah ini, pada masing-masing periode waktu. Berdasarkan hasil survei upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Kota Balikpapan, disajikan pada tabel 5.13 sebagai berikut:

Tabel 5.13. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

No	Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	Sangat Tidak Efektif		Tidak Efektif		Cukup Efektif		Efektif		Sangat Efektif	
		Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase
1	Penegakan hukum terhadap pejabat publik yang korupsi	0	0%	0	0%	473	57,97%	253	31,00%	90	11,03%
2	Pencegahan korupsi oleh pemerintah	0	0%	0	0%	492	60,29%	244	29,90%	80	9,84%

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.13, menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Kota Balikpapan selama 12 bulan terakhir yang paling tinggi dengan predikat cukup efektif yaitu tindakan pencegahan korupsi oleh pemerintah sebesar 492 responden (60,29%). Sedangkan penilaian paling rendah dengan predikat cukup efektif yaitu Penegakan hukum terhadap pejabat publik yang korupsi sebesar 473 responden (57,97%).

4. Penilaian Integritas Bisnis (U6)

Penilaian terhadap integritas bisnis dalam kurun waktu selama 12 bulan terakhir di Kota Balikpapan diukur dengan kendala dalam mendapatkan pelayanan di instansi karena adanya pihak lain yang menyuap, faktor penghambat pemberantasan korupsi, keterlibatan pribadi dalam melawan korupsi, kode etik yang tegas dalam melarang korupsi, persepsi terhadap perilaku masyarakat/perusahaan swasta dalam upaya melawan korupsi, kegiatan paling efektif dalam upaya melawan korupsi

- a. Selama 12 bulan terakhir responden mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan di instansi ini karena adanya pihak lain yang menyuap.

Tabel 5.14. Kendala dalam Mendapatkan Pelayanan

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	Ya	217	26,6 %
2	Tidak	599	73,4 %
Jumlah		816	100 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kendala yang mereka hadapi dalam mendapatkan pelayanan pada instansi terkait karena adanya pihak lain yang menyuap selama 12 bulan terakhir cukup rendah, karena sebesar 599 responden (73,4%) menilai bahwa tidak ada praktek suap saat ingin mendapatkan pelayanan pada instansi terkait.

b. Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi di Kota Balikpapan

Tabel 5.15. Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi di Kota Balikpapan

No	Penghambat Korupsi	Sangat Setuju		Setuju		Cukup Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase						
1	Tidak di Pidana dengan Tegas	140	17,2 %	257	31,5 %	72	8,8 %	92	11,3 %	255	31,3 %
2	Bukan Masalah Penting di Kota ini	55	6,7 %	201	24,6 %	102	12,5 %	158	19,4 %	300	36,8 %
3	Tidak Menjadi Prioritas Kebijakan	77	9,4 %	209	25,6 %	129	15,8 %	125	15,3 %	276	33,8 %
4	Dibiarkan	86	10,5 %	214	26,2 %	101	12,4 %	102	12,5 %	313	38,4 %
5	Dianggap sebagai Kebiasaan	118	14,5 %	228	27,9 %	97	11,9 %	79	9,7 %	294	36,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.15, menunjukkan bahwa penilaian responden dari lima faktor penghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Balikpapan selama 12 bulan terakhir. Penilaian terkategori sangat setuju yaitu tidak dipidana dengan tegas sebesar 140 responden (17,2%).

c. Keterlibatan Pribadi dalam Melawan Korupsi

Tabel 5.16. Keterlibatan Pribadi dalam Melawan Korupsi

No	Keterlibatan Pribadi	Sangat Setuju		Setuju		Cukup Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
		Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase						
1	Mendukung Kolega Melawan Korupsi	425	52,1 %	302	37,0 %	36	4,4 %	17	2,1 %	36	4,4 %
2	Terlibat Langsung Melawan Korupsi	352	43,1 %	333	40,8 %	90	11,0 %	30	3,7 %	11	1,3 %
3	Melaporkan Adanya Kejadian Korupsi	370	45,3 %	340	41,7 %	71	8,7 %	24	2,9 %	11	1,3 %
4	Mengimplementasikan Sistem Pencegahan Korupsi	364	44,6 %	347	42,5 %	76	9,3 %	20	2,5 %	9	1,1 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.16, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat Kota Balikpapan secara pribadi sebagai upaya untuk melawan korupsi sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian dukungan kepada kolega untuk melawan korupsi dengan penilaian sangat setuju sebesar 425 responden (52,1%).

d. Perusahaan Tempat Bapak/Ibu Bekerja Memiliki Kode Etik yang Tegas dalam Melarang Korupsi

Tabel 5.17. Perusahaan Memiliki Kode Etik yang Tegas dalam Melarang Korupsi

No	Kode Etik	Tidak Ada		Ada, Tapi Sangat Sedikit		Ada, Tapi Sedikit		Ada, Agak Banyak		Ada, Sangat Banyak	
		Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase
1	Praktik Suap	173	35,74 %	69	14,26 %	82	16,94 %	98	20,25 %	62	12,81 %
2	Praktik Gratifikasi	189	39,05 %	55	11,36 %	112	23,14 %	74	15,29 %	54	11,16 %
3	Praktik Uang Pelicin	181	37,40 %	64	13,22 %	96	19,38 %	83	17,15 %	60	12,40 %
4	Praktik Konflik Kepentingan	179	36,98 %	65	13,43 %	103	21,28 %	81	16,74 %	56	11,57 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.17, menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab bahwa ditempat perusahaan mereka bekerja tidak memiliki kode etik yang tegas untuk praktik gratifikasi sebesar 189 responden (39,05%).

Tabel 5.18. Responden Kode Etik Perusahaan

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	IRT / Pelajar/Mahasiswa	332	40,69 %
2	Karyawan	484	59,31 %
Jumlah		816	100 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

e. Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat/Perusahaan Swasta dalam Upaya Melawan Korupsi

Tabel 5.19. Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat/Perusahaan Swasta dalam Upaya Melawan Korupsi

No	Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat/Perusahaan Swasta Dalam Upaya Melawan Korupsi	Tidak Ada		Ada, Tapi Sangat Sedikit		Ada, Tapi Sedikit		Ada, Agak Banyak		Ada, Sangat Banyak	
		Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase
1	Kebijakan/Perilaku Anti Korupsi yang Konsisten	147	18,0 %	158	19,4 %	313	38,4 %	176	21,6 %	22	2,7 %
2	Pelatihan Anti Korupsi yang Kontinu	199	24,4 %	148	18,1 %	303	37,1 %	148	18,1 %	18	2,2 %
3	Sistem Pencegahan Korupsi Terinternalisasi dalam Manajemen Resiko	181	22,2 %	130	15,9 %	323	39,6 %	153	18,8 %	29	3,6 %
4	Sistem Pengintaian (<i>Whistle Blowing System</i>) Untuk Melaporkan Kasus Korupsi	185	22,7 %	140	17,2 %	320	39,2 %	146	17,9 %	25	3,1 %
5	Penanganan Pengaduan/Keberatan (<i>Complaint Handling Mechanism</i>)	191	23,4 %	151	18,5 %	294	36,0 %	156	19,1 %	24	2,9 %
6	Laporan Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	191	23,4 %	133	16,3 %	326	40,0 %	144	17,6 %	22	2,7 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.19, menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap perilaku masyarakat atau perusahaan swasta dalam melakukan upaya melawan korupsi, dengan penilaian predikat tidak ada yaitu pelatihan anti korupsi yang kontinu sebesar 199 responden (24,4%).

f. Kegiatan Paling Efektif dalam Upaya Melawan Korupsi

Tabel 5.20. Kegiatan Paling Efektif Dalam Upaya Melawan Korupsi

No	Kegiatan Paling Efektif Dalam Upaya Melawan Korupsi	Sangat Tidak Efektif		Tidak Efektif		Cukup Efektif		Efektif		Sangat Efektif	
		Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase
1	Aksi Bersama Melawan Korupsi	15	1,8 %	115	14,1 %	265	32,5 %	289	35,4 %	132	16,2 %
2	Audit Program Anti Korupsi	12	1,5 %	63	7,7 %	263	32,2 %	345	42,3 %	133	16,3 %
3	Sertifikasi terhadap Mitra Bisnis	16	2,0 %	96	11,8 %	271	33,2 %	323	39,6 %	110	13,5 %
4	Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi	13	1,6 %	86	10,5 %	246	30,1 %	331	40,6 %	140	17,2 %
5	Standar Anti Korupsi bagi Perusahaan	13	1,6 %	82	10,0 %	241	29,5 %	335	41,1 %	145	17,8 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.20, menunjukkan bahwa penilaian tertinggi terhadap penilaian sangat tidak efektif, yaitu adanya sertifikasi terhadap mitra bisnis sebesar 16 responden (2,0%).

5. Resiko Suap berdasarkan Lapangan Usaha (U7)

- a. Responden yang memiliki relasi dengan pengusaha bergerak di sektor/lapangan usaha berikut di Kota Balikpapan.

Tabel 5.21. Pengalaman Relasi Bisnis

No	Lapangan Usaha	Ya		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1	Perbankan	379	46,4 %	437	53,6 %
2	Perumahan	213	26,1 %	603	73,9 %
3	Industri	275	33,7 %	541	66,3 %
4	Konstruksi	237	29,0 %	579	71,0 %
5	Telekomunikasi	283	34,7 %	533	65,3 %
6	Perdagangan	347	42,5 %	469	57,5 %
7	Perkebunan	136	16,7 %	680	83,3 %
8	Pertambangan	266	32,6 %	550	67,4 %
9	Pertanian	140	17,2 %	676	82,8 %
10	Perikanan	136	16,7 %	680	83,3 %
11	Kehutanan	121	14,8 %	695	85,2 %
12	Farmasi	256	31,4 %	560	68,6 %
13	Minyak dan Gas	263	32,2 %	553	67,8 %
14	Perhotelan dan Restoran	273	33,5 %	543	66,5 %
15	Kelistrikan	278	34,1 %	538	65,9 %
16	Air Minum	244	29,9 %	572	70,1 %
17	Transportasi	298	36,5 %	518	63,5 %
18	Jasa-Jasa	290	35,5 %	526	64,5 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Berdasarkan hasil survei, bahwa tidak semua responden memiliki relasi berdasarkan 18 lapangan usaha sesuai yang tercantum di kuisisioner. Namun dari 816 responden telah diperoleh lebih banyak yang tidak memiliki relasi lapangan usaha tersebut, dibandingkan responden yang memiliki relasi. Pada tabel 5.21, menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki relasi bisnis yang paling banyak terkait disektor perbankan sebesar 379 responden (46,4%). Adapun jumlah responden dengan relasi bisnis paling sedikit ada pada sektor kehutanan sebesar 121 responden (14,8%).

b. Rata-rata resiko suap berdasarkan lapangan usaha

Tabel 5.22. Rata-rata resiko suap berdasarkan mengamankan dan mempercepat proses bisnis

No	Lapangan Usaha	Suap Mengamankan Bisnis						Suap Mempercepat Administratif						Tidak	
		Besar		Sedang		Kecil		Besar		Sedang		Kecil			
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	Perbankan	61	7,5 %	73	8,9 %	245	30,0 %	61	7,5 %	76	9,3 %	242	29,7 %	437	53,6 %
2	Perumahan	47	5,8 %	48	5,9 %	118	14,5 %	46	5,6 %	47	5,8 %	120	14,7 %	603	73,9 %
3	Industri	63	7,7 %	71	8,7 %	141	17,3 %	52	6,4 %	76	9,3 %	147	18,0 %	541	66,3 %
4	Konstruksi	41	5,0 %	57	7,0 %	139	17,0 %	38	4,7 %	57	7,0 %	142	17,4 %	579	71,0 %
5	Telekomunikasi	16	2,0 %	69	8,5 %	198	24,3 %	16	2,0 %	66	8,1 %	201	24,6 %	533	65,3 %
6	Perdagangan	59	7,2 %	82	10,0 %	206	25,2 %	48	5,9 %	83	10,2 %	216	26,5 %	469	57,5 %
7	Perkebunan	9	1,1 %	26	3,2 %	101	12,4 %	9	1,1 %	26	3,2 %	101	12,4 %	680	83,3 %
8	Pertambangan	85	10,4 %	49	6,0 %	132	16,2 %	76	9,3 %	55	6,7 %	135	16,5 %	550	67,4 %
9	Pertanian	17	2,1 %	19	2,3 %	104	12,7 %	13	1,6 %	21	2,6 %	106	13,0 %	676	82,8 %
10	Perikanan	7	0,9 %	31	3,8 %	98	12,0 %	5	0,6 %	29	3,6 %	102	12,5 %	680	83,3 %
11	Kehutanan	14	1,7 %	19	2,3 %	88	10,8 %	14	1,7 %	13	1,6 %	94	11,5 %	695	85,2 %
12	Farmasi	28	3,4 %	47	5,8 %	181	22,2 %	29	3,6 %	57	7,0 %	170	20,8 %	560	68,6 %
13	Minyak dan Gas	55	6,7 %	62	7,6 %	146	17,9 %	52	6,4 %	63	7,7 %	148	18,1 %	553	67,8 %
14	Perhotelan dan Restoran	43	5,3 %	71	8,7 %	159	19,5 %	40	4,9 %	70	8,6 %	163	20,0 %	543	66,5 %
15	Kelistrikan	39	4,8 %	51	6,3 %	188	23,0 %	36	4,4 %	66	8,1 %	176	21,6 %	538	65,9 %
16	Air Minum	30	3,7 %	49	6,0 %	165	20,2 %	30	3,7 %	49	6,0 %	165	20,2 %	572	70,1 %
17	Transportasi	34	4,2 %	82	10,0 %	182	22,3 %	32	3,9 %	78	9,6 %	188	23,0 %	518	63,5 %
18	Jasa-Jasa	47	5,8 %	58	7,1 %	185	22,7 %	38	4,7 %	62	7,6 %	190	23,3 %	526	64,5 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.22, menunjukkan bahwa rata-rata resiko suap berdasarkan lapangan usaha untuk mengamankan bisnis dengan kategori besar ada pada lapangan usaha pertambangan dengan penilaian sebesar 108 responden (13,2%), sedangkan untuk kategori sedang ada pada lapangan usaha transportasi dengan penilaian sebesar 122 responden (15,0%), serta untuk kategori kecil ada pada lapangan usaha perkebunan dengan penilaian sebesar 729 responden (89,3%). Sementara rata-rata resiko suap untuk mempercepat administratif dengan kategori besar ada pada lapangan usahan pertambangan sebesar 99 responden (12,1%), dan untuk kategori sedang ada pada lapangan usaha perdagangan dengan penilaian sebesar 122 responden (15,0%), serta untuk kategori kecil ada pada lapangan usaha perkebunan sebesar 727 responden (89,1%).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penilaian masyarakat terhadap resiko suap pada aspek lapangan usaha baik untuk mengamankan bisnis maupun untuk mempercepat proses administrasi masih cukup tinggi khususnya pada lapangan usaha di bidang pertambangan. Sebuah temuan yang cukup diperhatikan, meskipun secara operasional pertambangan tidak ada di lokasi Kota Balikpapan, namun kantor-kantor perwakilan secara administratif masih banyak beroperasi atau berdiri di Kota Balikpapan.

Tabel 5.23. Rata-rata resiko suap berdasarkan sumbangan politik dan pihak swasta lainnya

No	Lapangan Usaha	Suap Sumbangan Politik						Suap Terhadap Pihak Swasta						Tidak	
		Besar		Sedang		Kecil		Besar		Sedang		Kecil			
		Jumlah	Presentase	Presentase	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	Perbankan	38	4,7 %	78	9,6 %	263	32,2 %	37	4,5 %	89	10,9 %	253	31,0 %	437	53,6 %
2	Perumahan	31	3,8 %	43	5,3 %	139	17,0 %	28	3,4 %	52	6,4 %	133	16,3 %	603	73,9 %
3	Industri	44	5,4 %	66	8,1 %	165	20,2 %	43	5,3 %	72	8,8 %	160	19,6 %	541	66,3 %
4	Konstruksi	29	3,6 %	58	7,1 %	150	18,4 %	26	3,2 %	60	7,4 %	151	18,5 %	579	71,0 %
5	Telekomunikasi	18	2,2 %	70	8,6 %	195	23,9 %	15	1,8 %	70	8,6 %	198	24,3 %	533	65,3 %
6	Perdagangan	41	5,0 %	87	10,7 %	219	26,8 %	34	4,2 %	82	10,0 %	231	28,3 %	469	57,5 %
7	Perkebunan	9	1,1 %	24	2,9 %	103	12,6 %	6	0,7 %	25	3,1 %	105	12,9 %	680	83,3 %
8	Pertambangan	55	6,7 %	63	7,7 %	148	18,1 %	53	6,5 %	54	6,6 %	159	19,5 %	550	67,4 %
9	Pertanian	9	1,1 %	24	2,9 %	107	13,1 %	8	1,0 %	19	2,3 %	113	13,8 %	676	82,8 %
10	Perikanan	9	1,1 %	27	3,3 %	100	12,3 %	8	1,0 %	27	3,3 %	101	12,4 %	680	83,3 %
11	Kehutanan	10	1,2 %	20	2,5 %	91	11,2 %	10	1,2 %	18	2,2 %	93	11,4 %	695	85,2 %
12	Farmasi	25	3,1 %	57	7,0 %	174	21,3 %	22	2,7 %	56	6,9 %	178	21,8 %	560	68,6 %
13	Minyak dan Gas	34	4,2 %	75	9,2 %	154	18,9 %	36	4,4 %	67	8,2 %	160	19,6 %	553	67,8 %
14	Perhotelan dan Restoran	34	4,2 %	72	8,8 %	167	20,5 %	28	6,4 %	70	8,6 %	175	21,4 %	543	66,5 %
15	Kelistrikan	28	3,4 %	63	7,7 %	187	22,9 %	29	3,6 %	58	7,1 %	191	23,4 %	538	65,9
16	Air Minum	22	2,7 %	49	6,0 %	173	21,2 %	21	2,6 %	49	6,0 %	174	21,3 %	572	70,1 %
17	Transportasi	30	3,7 %	71	8,7 %	197	24,1 %	27	3,3 %	72	8,8 %	199	24,4 %	518	63,5 %
18	Jasa-Jasa	36	4,4 %	62	7,6 %	192	23,5 %	28	3,4 %	62	7,6 %	200	24,5 %	526	64,5 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.23, menunjukkan bahwa rata-rata resiko suap berdasarkan sumbangan politik dengan kategori besar ada pada lapangan usaha pertambangan dengan penilaian sebesar 77 responden (9,4%), sedangkan untuk kategori sedang ada pada lapangan usaha perdagangan dengan penilaian sebesar 125 responden (15,3%), dan untuk ketegori kecil ada pada lapangan usaha kehutanan dengan penilaian sebesar 727 responden (89,1%). Sementara untuk rata-rata resiko suap terhadap pihak swasta dengan kategori besar ada pada lapangan usaha pertambangan dengan penilaian sebesar 72 responden (8,8%), dan untuk kategori sedang pada pada lapangan usaha perbankan dengan penilaian sebesar 133 responden (16,3%), serta untuk kategori kecil ada pada lapangan usaha perkebunan & perikanan dengan penilaian sebesar 727 responden (89,1%).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penilaian masyarakat terhadap resiko suap terhadap aspek lapangan usaha baik untuk sumbangan politik maupun untuk pihak swasta masih cukup tinggi khususnya pada lapangan usaha di bidang pertambangan.

c. Perkiraan dalam presentase uang suap yang diberikan dari total biaya produksi.

Tabel 5.24. Perkiraan Presentase Uang Suap

No	Lapangan Usaha	0% - 10%		11% - 50%		>50%	
		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1	Perbankan	220	27,0 %	137	16,8 %	22	2,7 %
2	Perumahan	134	16,4 %	63	7,7 %	16	2,0 %
3	Industri	178	21,8 %	88	10,8 %	9	1,1 %
4	Konstruksi	144	17,6 %	81	9,9 %	12	1,5 %
5	Telekomunikasi	283	34,7 %	0	0 %	0	0 %
6	Perdagangan	214	26,2 %	118	14,5 %	15	1,8 %
7	Perkebunan	106	13,0 %	26	3,2 %	4	0,5 %
8	Pertambangan	145	17,8 %	100	12,3 %	21	2,6 %
9	Pertanian	104	12,7 %	31	3,8 %	5	0,6 %
10	Perikanan	136	16,7 %	0	0 %	0	0 %
11	Kehutanan	96	11,8 %	23	2,8 %	2	0,2 %
12	Farmasi	164	20,1 %	80	9,8 %	12	1,5 %
13	Minyak dan Gas	148	18,1 %	95	11,6 %	20	2,5 %
14	Perhotelan dan Restoran	163	20,0 %	89	10,9 %	21	2,6 %
15	Kelistrikan	145	17,8 %	122	15,0 %	11	1,3 %
16	Air Minum	159	19,5 %	74	9,1 %	11	1,3 %
17	Transportasi	188	23,0 %	103	12,6 %	7	0,9 %
18	Jasa-Jasa	175	21,4 %	104	12,7 %	11	1,3 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.24 di atas, menunjukkan bahwa perkiraan dalam presentase uang suap yang diberikan dari total biaya produksi terbagi menjadi 3 level yaitu kisaran 0 - 10% dengan penilaian

tertinggi ada pada lapangan usaha telekomunikasi sebesar 816 responden (100%), sedangkan untuk kategori 11% - 50% ada pada lapangan usaha perbankan dengan penilaian sebesar 143 responden (17,5%), dan untuk kategori di atas 50% ada pada lapangan usaha perbankan dengan penilaian sebesar 26 responden (3,2%).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan masih menilai bahwa uang suap terbanyak ada pada lapangan usaha perbankan.

6. Integritas Layanan Publik Kota (U8)

Sebagai salah satu indikator untuk menilai resiko terjadinya suap di instansi penyedia layanan publik, integritas layanan kota diukur dengan menggunakan unsur-unsur pengalaman berinteraksi dengan instansi penyedia layanan publik kota, dan adanya ketidaksesuaian serta adanya indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

- a. Responden pernah berinteraksi dengan instansi penyedia layanan publik kota.

Tabel 5.25. Interaksi dengan Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Kota	Ya		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	214	26,2 %	602	73,8 %
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89	10,9 %	727	89,1 %
3	Dinas Perdagangan	133	16,3 %	683	83,7 %
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	267	32,7 %	549	67,3 %
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	132	16,2 %	684	83,8 %
6	Kepolisian	633	77,6 %	183	22,4 %
7	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	247	30,3 %	569	69,7 %
8	Dinas Pekerjaan Umum	156	19,1 %	660	80,9 %
9	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	135	16,5 %	681	83,5 %
10	Dinas Lingkungan Hidup	127	15,6 %	689	84,4 %
11	Dinas Perhubungan	215	26,3 %	601	73,7 %
12	Dinas Perumahan dan Permukiman	112	13,7 %	704	86,3 %
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	703	86,2 %	113	13,8 %
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	296	36,3 %	520	63,7 %
15	Dinas Ketenagakerjaan	331	40,6 %	485	59,4 %
16	Kecamatan Balikpapan Selatan	216	26,5 %	600	73,5 %
17	Kecamatan Balikpapan Barat	216	26,5 %	600	73,5 %
18	RSUD Beriman Kota Balikpapan	281	34,4 %	535	65,5 %
19	RSIA Sayang Ibu	281	34,4 %	535	65,6 %
20	SMPN 1 Kota Balikpapan	97	11,9 %	719	88,1 %
21	Kecamatan Balikpapan Utara	149	18,3 %	667	81,7 %
22	Kecamatan Balikpapan Timur	118	14,5 %	698	85,5 %
23	Kecamatan Balikpapan Kota	113	13,8 %	703	86,2 %
24	Kecamatan Balikpapan Tengah	148	18,1 %	668	81,9 %
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82	10,0 %	734	90,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Dari tabel 5.25, menunjukkan bahwa intensitas interaksi masyarakat Kota Balikpapan dengan instansi penyedia layanan publik kota, sangat bervariasi antara responden yang memberikan jawaban "Ya" dan responden yang memberikan jawaban "Tidak". Adapun kesimpulan yang diperoleh, hasil survei yang paling tinggi berinteraksi di layanan kota adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun jumlah responden yang memiliki interaksi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, mencapai 703 (86,2%).

b. Ketidaksesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.26. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Lapor		Tidak Melapor								Tidak Tahu		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Tidak Tahu Kemana Harus Melapor		(2) Takut Konsekuensi Buruk atas Laporan Tersebut		(3) Tidak Merubah Apapun		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban Total		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase				
1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	34	4,2 %	64	7,8 %	31	3,8 %	39	4,8 %	21	2,6 %	25	3,1 %	602	73,8 %
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	33	4,0 %	16	2,0 %	10	1,2 %	7	0,9 %	0	0,0 %	23	2,8 %	727	89,1 %
3	Dinas Perdagangan	60	7,4 %	29	3,6 %	15	1,8 %	22	2,7 %	0	0,0 %	7	0,9 %	683	83,7 %
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	50	6,1 %	56	6,9 %	10	1,2 %	11	1,3 %	0	0,0 %	140	17,2 %	549	67,3 %
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	33	4,0 %	26	3,2 %	7	0,9 %	7	0,9 %	0	0,0 %	59	7,2 %	684	83,8 %
6	Kepolisian	336	41,2 %	106	13,0 %	28	3,4 %	72	8,8 %	4	0,5 %	87	10,7 %	183	22,4 %
7	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	77	9,4 %	31	3,8 %	12	1,5 %	14	1,7 %	1	0,1 %	112	13,7 %	569	69,7 %
8	Dinas Pekerjaan Umum	40	4,9 %	13	1,6 %	8	1,0 %	10	1,2 %	0	0,0 %	85	10,4 %	660	80,9 %
9	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	24	2,9 %	9	1,1 %	6	0,7 %	8	1,0 %	0	0,0 %	88	10,8 %	681	83,5 %
10	Dinas Lingkungan Hidup	37	4,5 %	10	1,2 %	7	0,9 %	9	1,1 %	0	0,0 %	64	7,8 %	689	84,4 %
11	Dinas Perhubungan	56	6,9 %	24	2,9 %	11	1,3 %	15	1,8 %	0	0,0 %	109	13,4 %	601	73,7 %
12	Dinas Perumahan dan Permukiman	25	3,1 %	14	1,7 %	6	0,7 %	8	1,0 %	0	0,0 %	59	7,2 %	704	86,3 %
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	322	39,5 %	123	15,1 %	77	9,4 %	68	8,3 %	14	1,7 %	99	12,1 %	113	13,8 %
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	70	8,6 %	59	7,2 %	38	4,7 %	29	3,6 %	0	0,0 %	100	12,3 %	520	63,7 %



No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Lapor		Tidak Melapor								Tidak Tahu		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Tidak Tahu Kemana Harus Melapor		(2) Takut Konsekuensi Buruk atas Laporan Tersebut		(3) Tidak Merubah Apapun		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban Total		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase				
15	Dinas Ketenagakerjaan	94	11,5 %	58	7,1 %	44	5,4 %	45	5,5 %	1	0,1 %	89	10,9 %	485	59,4 %
16	Kecamatan Balikpapan Selatan	90	11,0 %	67	8,2 %	42	5,1 %	3	0,4 %	0	0,0 %	14	1,7 %	600	73,5 %
17	Kecamatan Balikpapan Barat	90	11,0 %	51	6,3 %	40	4,9 %	29	3,6 %	0	0,0 %	6	0,7 %	600	73,5 %
18	RSUD Beriman Kota Balikpapan	67	8,2 %	101	12,4 %	57	7,0 %	11	1,3 %	3	0,4 %	42	5,1 %	535	65,6 %
19	RSIA Sayang Ibu	79	9,7 %	58	7,1 %	52	6,4 %	33	4,0 %	1	0,1 %	58	7,1 %	535	65,6 %
20	SMPN 1 Kota Balikpapan	25	3,1 %	24	2,9 %	16	2,0 %	18	2,2 %	0	0,0 %	14	1,7 %	719	88,1 %
21	Kecamatan Balikpapan Utara	55	6,7 %	24	2,9 %	11	1,3 %	17	2,1 %	0	0,0 %	42	5,1 %	667	81,7 %
22	Kecamatan Balikpapan Timur	21	2,6 %	9	1,1 %	9	1,1 %	8	1,0 %	0	0,0 %	71	8,7 %	698	85,5 %
23	Kecamatan Balikpapan Kota	24	2,9 %	24	2,9 %	19	2,3 %	22	2,7 %	0	0,0 %	24	2,9 %	703	86,2 %
24	Kecamatan Balikpapan Tengah	55	6,7 %	27	3,3 %	15	1,8 %	16	2,0 %	1	0,1 %	34	4,2 %	668	81,9 %
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19	2,3 %	19	2,3 %	9	1,1 %	14	1,7 %	0	0,0 %	21	2,6 %	734	90,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Dari tabel 5.26, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan sehingga masyarakat Kota Balikpapan tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian yaitu disebabkan karena tidak tahu harus melapor kemana, takut konsekuensi buruk atas laporan tersebut, tidak merubah apapun. Dari ke tiga alasan tersebut, mayoritas masyarakat Kota Balikpapan menjawab alasan untuk tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian disebabkan karena tidak tahu kemana harus melapor ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penilaian sebesar 123 responden (15,1%). Sementara alasan tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian terendah karena dianggap tidak akan merubah apapun ada pada Kecamatan Balikpapan Selatan dengan penilaian sebesar 3 responden (0,4%).

Berdasarkan hal tersebut di atas, masyarakat Kota Balikpapan menilai tingkat ketidaksesuaian dan adanya indikasi untuk terjadi tindak pidana korupsi pada instansi penyedia layanan publik kota masih cukup tinggi hanya saja masyarakat masih enggan untuk melaporkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak tahu kemana harus melapor atas laporan yang mereka adukan.

c. Ketidaksesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi

Tabel 5.27. Kemungkinan Menyuaup Jika terjadi Ketidaksesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Kota	Tidak Menyuaup		Menyuaup										Tidak Tahu	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Sebagai hadiah/bentuk terima kasih		(2) Untuk mendapatkan layanan lebih murah		(3) Mempercepat urusan		(4) Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban		Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase		
1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	147	18,0 %	20	2,5 %	1	0,1 %	4	0,5 %	1	0,1 %	0	0,0 %	41	5,0 %
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	19	2,3 %	19	2,3 %	14	1,7 %	2	0,2 %	1	0,1 %	0	0,0 %	34	4,2 %
3	Dinas Perdagangan	59	7,2 %	5	0,6 %	2	0,2 %	4	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	63	7,7 %
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	41	5,0 %	40	4,9 %	55	6,7 %	65	8,0 %	3	0,4 %	2	0,2 %	61	7,5 %
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	4	0,5 %	26	3,2 %	33	4,0 %	35	4,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	34	4,2 %
6	Kepolisian	176	21,6 %	35	4,3 %	66	8,1 %	31	3,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	325	39,8 %
7	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18	2,2 %	53	6,5 %	45	5,5 %	44	5,4 %	1	0,1 %	0	0,0 %	86	10,5 %
8	Dinas Pekerjaan Umum	7	0,9 %	45	5,5 %	40	4,9 %	22	2,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	42	5,1 %
9	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	10	1,2 %	33	4,0 %	22	2,7 %	44	5,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	26	3,2 %
10	Dinas Lingkungan Hidup	7	0,9 %	29	3,6 %	27	3,3 %	25	3,1 %	1	0,1 %	0	0,0 %	38	4,7 %
11	Dinas Perhubungan	18	2,2 %	49	6,0 %	65	8,0 %	19	2,3 %	2	0,2 %	0	0,0 %	62	7,6 %
12	Dinas Perumahan dan Permukiman	14	1,7 %	35	4,3 %	24	2,9 %	9	1,1 %	1	0,1 %	0	0,0 %	29	3,6 %
13	Dinas Kependudukan dan	217	26,6 %	32	3,9 %	85	10,4 %	24	2,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %	345	42,3 %



No	Instansi Penyedia Layanan Publik Kota	Tidak Menyuaip		Menyuaip										Tidak Tahu	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Sebagai hadiah/bentuk terima kasih		(2) Untuk mendapatkan layanan lebih murah		(3) Mempercepat urusan		(4) Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban		Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase		
	Pencatatan Sipil														
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	81	9,9 %	37	4,5 %	59	7,2 %	33	4,0 %	1	0,1 %	1	0,1 %	84	10,3 %
15	Dinas Ketenagakerjaan	129	15,8 %	28	3,4 %	25	3,1 %	47	5,8 %	1	0,1 %	0	0,0 %	101	12,4 %
16	Kecamatan Balikpapan Selatan	71	8,7 %	7	0,9 %	32	3,9 %	4	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	102	12,5 %
17	Kecamatan Balikpapan Barat	83	10,2 %	5	0,6 %	25	3,1 %	2	0,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	101	12,4 %
18	RSUD Beriman Kota Balikpapan	122	15,0 %	21	2,6 %	44	5,4 %	16	2,0 %	1	0,1 %	0	0,0 %	77	9,4 %
19	RSIA Sayang Ibu	100	12,3 %	30	3,7 %	25	3,1 %	25	3,1 %	1	0,1 %	1	0,1 %	99	12,1 %
20	SMPN 1 Kota Balikpapan	28	3,4 %	10	1,2 %	21	2,6 %	1	0,1 %	0	0,0 %	1	0,1 %	36	4,4 %
21	Kecamatan Balikpapan Utara	37	4,5 %	11	1,3 %	29	3,6 %	17	2,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	55	6,7 %
22	Kecamatan Balikpapan Timur	25	3,1 %	25	3,1 %	44	5,4 %	2	0,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	22	2,7 %
23	Kecamatan Balikpapan Kota	28	3,4 %	11	1,3 %	29	3,6 %	11	1,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	34	4,2 %
24	Kecamatan Balikpapan Tengah	26	3,2 %	18	2,2 %	29	3,6 %	18	2,2 %	1	0,1 %	0	0,0 %	56	6,9 %
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24	2,9 %	4	0,5 %	22	2,7 %	3	0,4 %	0	0,0 %	1	0,1 %	28	3,4 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.27, menunjukkan bahwa ada 4 (empat) alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian yaitu sebagai hadiah/bentuk terima kasih, untuk mendapatkan layanan yang lebih murah, mempercepat urusan, dan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan. Alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian tertinggi yang disebabkan untuk mendapatkan layanan lebih murah oleh mayoritas masyarakat Kota Balikpapan pada instansi layanan publik kota ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 responden (10,4%).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Balikpapan menilai bahwa membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan alasan untuk mendapatkan layanan lebih murah cukup tinggi khususnya yang terjadi pada instansi penyedia layanan kota seperti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Integritas Layanan Provinsi (U9)

Sebagai salah satu indikator untuk menilai resiko terjadinya suap di instansi penyedia layanan publik pada tingkat provinsi, integritas layanan provinsi diukur dengan menggunakan unsur-unsur pengalaman berinteraksi dengan instansi penyedia layanan publik kota, dan adanya ketidaksesuaian serta adanya indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

- a. Responden pernah berinteraksi dengan instansi penyedia layanan publik provinsi

Tabel 5.28. Interaksi dengan Instansi Layanan Publik Provinsi

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Ya		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135	16,5%	681	83,5%
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	74	9,1%	742	90,9%
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27	3,3%	789	96,7%
4	Badan Pendapatan Daerah	83	10,2%	733	89,8%
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	80	9,8%	736	90,2%
6	Dinas Lingkungan Hidup	85	10,4%	731	89,6%

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Dari tabel 5.28, menunjukkan bahwa intensitas interaksi masyarakat Kota Balikpapan dengan instansi instansi penyedia layanan public di tingkat Provinsi sangat bervariasi antara responden yang memberikan jawaban "Ya" dan responden yang memberikan jawaban "Tidak". Adapun kesimpulan yang diperoleh, hasil survei yang paling tinggi berinteraksi di layanan provinsi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan intensitas interaksi sebesar 135 responden (16,5%).

b. Ketidaksesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.29. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Lapor		Tidak Melapor								Tidak Tahu		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Tidak Tahu Kemana Harus Melapor		(2) Takut Konsekuensi Buruk atas Laporan Tersebut		(3) Tidak Merubah Apapun		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban Total		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase				
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59	7,2 %	4	0,5 %	1	0,1 %	13	1,6 %	40	4,9 %	18	2,2 %	681	83,5 %
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	15	1,8 %	25	3,1 %	21	2,6 %	7	0,9 %	0	0,0 %	6	0,7 %	742	90,9 %
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9	1,1 %	6	0,7 %	6	0,7 %	5	0,6 %	0	0,0 %	1	0,1 %	789	96,7 %
4	Badan Pendapatan Daerah	47	5,8 %	9	1,1 %	18	2,2 %	8	1,0 %	0	0,0 %	1	0,1 %	733	89,8 %
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	38	4,7 %	15	1,8 %	11	1,3 %	2	0,2 %	1	0,1 %	13	1,6 %	736	90,2 %
6	Dinas Lingkungan Hidup	38	4,7 %	19	2,3 %	9	1,1 %	8	1,0 %	1	0,1 %	10	1,2 %	731	89,6 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.29, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan sehingga masyarakat Kota Balikpapan tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian yaitu disebabkan karena tidak tahu harus melapor kemana, takut konsekuensi buruk atas laporan tersebut, tidak merubah apapun. Dari ke tiga alasan tersebut, mayoritas masyarakat Kota Balikpapan menjawab alasan untuk tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian disebabkan karena tidak tahu harus melapor kemana ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan penilaian sebesar 25 responden (3,1%). Sementara alasan tidak melapor jika terjadi ketidak sesuaian dengan penilaian terendah karena takut konsekuensi buruk atas laporan tersebut ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penilaian sebesar 1 responden (0,1%).

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa masyarakat Kota Balikpapan menilai tingkat ketidaksesuaian dan adanya indikasi untuk terjadi tindak pidana korupsi pada instansi penyedia layanan publik provinsi masih cukup tinggi hanya saja masyarakat masih enggan untuk melaporkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak tahu harus melapor kemana.

c. Jika terjadi Ketidaksiesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.30. Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksiesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Tidak Menyupap		Menyupap										Tidak Tahu	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Sebagai hadiah/bentuk terima kasih		(2) Untuk mendapatkan layanan lebih murah		(3) Mempercepat urusan		(4) Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban		Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase		
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78	9,6 %	0	0,0 %	4	0,5 %	18	2,2 %	3	0,4 %	0	0,0 %	32	3,9 %
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	41	5,0 %	0	0 %	11	1,3 %	4	0,5 %	1	0,1 %	0	0,0 %	17	2,1 %
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9	1,1 %	0	0 %	4	0,5 %	1	0,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	13	1,6 %
4	Badan Pendapatan Daerah	54	6,6 %	2	0,2 %	5	0,6 %	15	1,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	7	0,9 %
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	52	6,4 %	5	0,6 %	9	1,1 %	6	0,7 %	1	0,1 %	0	0,0 %	7	0,9 %
6	Dinas Lingkungan Hidup	54	6,6 %	2	0,2 %	4	0,5 %	15	1,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	10	1,2 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.30 di atas, menunjukkan bahwa ada 4 (empat) alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian yaitu sebagai hadiah/bentuk terima kasih, untuk mendapatkan layanan yang lebih murah, mempercepat urusan, dan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan. Alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian tertinggi yang disebabkan untuk mempercepat urusan ada pada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 18 responden (2,2%).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menilai bahwa membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan alasan untuk mempercepat urusan cukup tinggi khususnya yang terjadi pada instansi penyedia layanan provinsi seperti pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Integritas Layanan Instansi Vertikal Daerah (U10)

Sebagai salah satu indikator untuk menilai resiko terjadinya suap di instansi penyedia layanan publik pada instansi vertikal di daerah, integritas layanan vertikal di daerah diukur dengan menggunakan unsur-unsur pengalaman berinteraksi dengan instansi penyedia layanan publik kota, dan adanya ketidaksesuaian serta adanya indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

- a. Responden pernah berinteraksi dengan instansi penyedia layanan vertikal daerah.

Tabel 5.31. Interaksi dengan Instansi Penyedia Layanan Vertikal Daerah

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Vertikal Daerah	Ya		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1	Kanwil Dirjen Pajak Provinsi	225	27,6 %	591	72,4 %
2	Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi	67	8,2 %	749	91,8 %
3	Kanwil Dirjen Pengelolaan Kekayaan Negara Provinsi	32	3,9 %	784	96,1 %
4	Kepolisian Daerah	320	39,2 %	496	60,8 %
5	Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi	129	15,8 %	687	84,2 %
6	Pengadilan Negeri	132	16,2 %	684	83,8 %
7	Kejaksaan Negeri	81	9,9 %	735	90,1 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa intensitas interaksi masyarakat Kota Balikpapan dengan instansi penyedia layanan publik vertikal daerah, paling tinggi intensitas interaksinya ada pada Kepolisian Daerah dengan intensitas interaksi sebesar 320 responden (39,2%).

b. Ketidaksiesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.32. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksiesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Lapor		Tidak Melapor								Tidak Tahu		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Tidak Tahu Kemana Harus Melapor		(2) Takut Konsekuensi Buruk atas Laporan Tersebut		(3) Tidak Merubah Apapun		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban Total		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase				
1	Kanwil Ditjen Pajak	120	14,7 %	14	1,7 %	28	3,4 %	16	2,0 %	0	0,0 %	47	5,8 %	591	72,4 %
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara	38	4,7 %	10	1,2 %	5	0,6 %	10	1,2 %	0	0,0 %	4	0,5 %	749	91,8 %
3	Kanwil Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara	23	2,8 %	2	0,2 %	4	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	3	0,4 %	784	96,1 %
4	Kepolisian Daerah	159	19,5 %	21	2,6 %	58	7,1 %	41	5,0 %	0	0,0 %	41	5,0 %	496	60,8 %
5	Kancab Badan Pertanahan Nasional	58	7,1 %	8	1,0 %	23	2,8 %	31	3,8 %	0	0,0 %	9	1,1 %	687	84,2 %
6	Pengadilan Negeri	53	6,5 %	12	1,5 %	26	3,2 %	36	4,4 %	0	0,0 %	5	0,6 %	684	83,8 %
7	Kejaksaan Negeri	47	5,8 %	7	0,9 %	18	2,2 %	1	0,1 %	0	0,0 %	8	1,0 %	735	90,1 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.32, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan sehingga masyarakat Kota Balikpapan tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian yaitu disebabkan karena tidak tahu harus melapor kemana, takut konsekuensi buruk atas laporan tersebut, tidak merubah apapun. Dari ke tiga alasan tersebut, mayoritas masyarakat Kota Balikpapan menjawab alasan untuk tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian disebabkan karena takut akan konsekuensi buruk atas laporan tersebut ada pada Kepolisian Daerah dengan penilaian sebesar 58 responden (7,1%). Sementara alasan tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian terendah karena dianggap tidak akan merubah apapun juga ada pada Kejaksaan Negeri dengan penilaian sebesar 1 responden (0.1%).

Berdasarkan pemamaparan diatas, bahwa masyarakat Kota Balikpapan menilai tingkat ketidaksesuaian dan adanya indikasi untuk terjadi tindak pidana korupsi pada instansi penyedia layanan publik vertikal daerah masih cukup tinggi hanya saja masyarakat masih enggan untuk melaporkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa takut akan konsekuensi buruk yang mereka terima dari laporan yang mereka sampaikan.

c. Ketidaksesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.33. Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Vertikal Daerah	Tidak Menyuaip		Menyuaip										Tidak Tahu	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Sebagai hadiah/bentuk terima kasih		(2) Untuk mendapatkan layanan lebih murah		(3) Mempercepat urusan		(4) Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban		Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase		
1	Kanwil Ditjen Pajak	137	16,8 %	16	2,0 %	28	3,4 %	3	0,4 %	1	0,1 %	0	0,0 %	40	4,9 %
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara	50	6,1 %	3	0,4 %	11	1,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	3	0,4 %
3	Kanwil Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara	29	3,6 %	1	0,1 %	1	0,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,1 %
4	Kepolisian Daerah	158	19,4 %	19	2,3 %	61	7,5 %	7	0,9 %	1	0,1 %	2	0,2 %	72	8,8 %
5	Kancab Badan Pertanahan Nasional	52	6,4 %	13	1,6 %	55	6,7 %	2	0,2 %	0	0,0 %	1	0,1 %	6	0,7 %
6	Pengadilan Negeri	85	10,4 %	13	1,6 %	23	2,8 %	2	0,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	9	1,1 %
7	Kejaksaan Negeri	42	5,1 %	8	1,0 %	26	3,2 %	1	0,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4	0,5 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.33, menunjukkan bahwa ada 4 (empat) alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian yaitu sebagai hadiah/bentuk terima kasih, untuk mendapatkan layanan yang lebih murah, mempercepat urusan, dan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan. Alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian tertinggi yang disebabkan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih murah ada pada instansi layanan publik vertikal daerah di Kepolisian Daerah sebesar 61 responden (7,5%).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menilai bahwa membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan alasan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih murah cukup tinggi khususnya yang terjadi pada instansi penyedia layanan vertikal daerah seperti pada Kepolisian Daerah.

9. Integrasi Layanan Pusat (U11)

Sebagai salah satu indikator untuk menilai resiko terjadinya suap di instansi penyedia layanan pusat, integritas layanan pusat di daerah di diukur menggunakan unsur-unsur pengalaman berinteraksi dengan instansi penyedia layanan publik kota, dan adanya ketidaksesuaian serta adanya indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

- b. Responden pernah berinteraksi dengan instansi penyedia layanan pusat

Tabel 5.34. Pengalaman Interaksi dengan Instansi Pusat

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Pusat	Ya		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1	Badan Kordinasi Penanaman Modal	59	7,2 %	757	92,8 %
2	Kementerian Keuangan	63	7,7 %	753	92,3 %
3	Kementerian Perdagangan	47	5,8 %	769	94,2 %
4	Kementerian Perindustrian	25	3,1 %	791	96,9 %
5	Kementrian ESDM	31	3,8 %	785	96,2 %
6	Kepolisian	274	33,6 %	542	66,4 %
7	Kementerian agrarian dan tata ruang/BPN	87	10,7 %	729	89,3 %
8	Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat	56	6,9 %	760	93,1 %
9	Kejaksaan Agung	54	6,6 %	762	93,4 %
10	Kementerian Perhubungan	77	9,4 %	739	90,6 %
11	Kementerian Hukum dan HAM	91	11,2 %	725	88,8 %
12	Kementerian Tenaga Kerja	108	13,2 %	708	86,8 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Dari tabel 5.34, menunjukkan bahwa intensitas interaksi masyarakat Kota Balikpapan dengan layanan instansi pusat sangat bervariasi antara responden yang memberikan jawaban "Ya" dan responden yang memberikan jawaban "Tidak". Namun sesuai survey jawaban responden "Ya" lebih rendah daripada "Tidak". Sehingga telah kami simpulkan bahwa, hasil survei yang paling tinggi berinteraksi di layanan pusat yaitu Kepolisian dengan intensitas interaksi sebesar 274 responden (33,6%).

b. Ketidaksiesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.35. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksiesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Lapor		Tidak Melapor								Tidak Tahu		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Tidak Tahu Kemana Harus Melapor		(2) Takut Konsekuensi Buruk atas Laporan Tersebut		(3) Tidak Merubah Apapun		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban Total		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase				
1	Badan Kordinasi Penanaman Modal	30	3,7 %	2	0,2 %	9	1,1 %	8	1,0 %	0	0,0 %	10	1,2 %	757	92,8 %
2	Kementerian Keuangan	15	1,8 %	2	0,2 %	14	1,7 %	17	2,1 %	0	0,0 %	15	1,8 %	753	92,3 %
3	Kementerian Perdagangan	11	1,3 %	0	0,0 %	25	3,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	11	1,3 %	769	94,2 %
4	Kementerian Perindustrian	13	1,6 %	1	0,1 %	8	1,0 %	1	0,1 %	0	0,0 %	2	0,2 %	791	96,9 %
5	Kementrian ESDM	11	1,3 %	2	0,2 %	12	1,5 %	5	0,6 %	0	0,0 %	1	0,1 %	785	96,2 %
6	Kepolisian	131	16,1 %	11	1,3 %	38	4,7 %	41	5,0 %	0	0,0 %	53	6,5 %	542	66,4 %
7	Kementerian agrarian dan tata ruang/BPN	52	6,4 %	6	0,7 %	13	1,6 %	6	0,7 %	0	0,0 %	10	1,2 %	729	89,3 %
8	Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat	12	1,5 %	6	0,7 %	16	2,0 %	14	1,7 %	0	0,0 %	8	1,0 %	760	93,1 %
9	Kejaksaan Agung	23	2,8 %	4	0,5 %	10	1,2 %	16	2,0 %	0	0,0 %	1	0,1 %	762	93,4 %
10	Kementerian Perhubungan	25	3,1 %	4	0,5 %	12	1,5 %	26	3,2 %	0	0,0 %	10	1,2 %	739	90,6 %
11	Kementerian Hukum dan HAM	33	4,0 %	4	0,5 %	12	1,5 %	24	2,9 %	0	0,0 %	18	2,2 %	725	88,8 %
12	Kementerian Tenaga Kerja	26	3,2 %	7	0,9 %	25	3,1 %	32	3,9 %	0	0,0 %	18	2,2 %	708	86,8 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.35, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan sehingga masyarakat Kota Balikpapan tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian di layanan pusat yaitu disebabkan karena tidak tahu harus melapor kemana, takut konsekuensi buruk atas laporan tersebut, tidak merubah apapun. Dari ke tiga alasan tersebut, mayoritas masyarakat Kota Balikpapan menjawab alasan untuk tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian disebabkan karena tidak tahu kemana harus melapor ada pada Kepolisian dengan penilaian sebesar 11 responden (1,3%). Sedangkan alasan takut akan konsekuensi buruk atas laporan tersebut ada pada Kepolisian dengan penilaian sebesar 38 responden (4,7%). Sementara alasan tidak melapor jika terjadi ketidak sesuaian dengan penilaian terendah karena dianggap tidak akan merubah apapun juga ada pada Kepolisian dengan penilaian sebesar 41 responden (5,0%).

Berdasarkan pemaparandi atas, masyarakat Kota Balikpapan menilai tingkat ketidaksesuaian dan adanya indikasi untuk terjadi tindak pidana korupsi pada instansi penyedia layanan publik pusat cukup rendah hanya saja masyarakat masih enggan untuk melaporkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa takut akan konsekuensi buruk yang mereka terima dari laporan yang mereka sampaikan.

Walaupun demikian bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam pelayanan di Layanan Pusat, masyarakat lebih memilih untuk melapor, dari pada tidak melapor ataupun tidak tahu.

c. Ketidaksiesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.36. Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksiesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Pusat	Tidak Menyuaip		Menyuaip										Tidak Tahu	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Sebagai hadiah/bentuk terima kasih		2) Untuk mendapatkan layanan lebih murah		3) Mempercepat urusan		4) Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan		4) Lainnya, Tuliskan jawaban		Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase		
1	Badan Kordinasi Penanaman Modal	18	2,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	3	0,4 %	2	0,2 %	2	0,2 %	34	4,2 %
2	Kementerian Keuangan	25	3,1 %	4	0,5 %	1	0,1 %	8	1,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	25	3,1 %
3	Kementerian Perdagangan	22	2,7 %	1	0,1 %	1	0,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	23	2,8 %
4	Kementerian Perindustrian	8	1,0 %	2	0,2 %	3	0,4 %	3	0,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	9	1,1 %
5	Kementrian ESDM	10	1,2 %	3	0,4 %	0	0,0 %	8	1,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	10	1,2 %
6	Kepolisian	130	15,9 %	8	1,0 %	25	3,1 %	22	2,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	89	10,9 %
7	Kementerian agrarian dan tata ruang/BPN	35	4,3 %	5	0,6 %	9	1,1 %	25	3,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	13	1,6 %
8	Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat	37	4,5 %	1	0,1 %	5	0,6 %	2	0,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	11	1,3 %
9	Kejaksaaan Agung	32	3,9 %	2	0,2 %	7	0,9 %	1	0,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	12	1,5 %
10	Kementerian Perhubungan	41	5,0 %	0	0,0 %	10	1,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	26	3,2 %
11	Kementerian Hukum dan HAM	51	6,3 %	2	0,2 %	7	0,9 %	4	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	27	3,3 %
12	Kementerian Tenaga Kerja	47	5,8 %	2	0,2 %	4	0,5 %	1	0,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	54	6,6 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.36, menunjukkan bahwa ada 4 (empat) alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian yaitu sebagai hadiah/bentuk terima kasih, untuk mendapatkan layanan yang lebih murah, mempercepat urusan, dan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan. Alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian tertinggi yang disebabkan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih murah ada pada instansi layanan publik pusat ada pada Kepolisian sebesar 25 responden (3,1%).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menilai bahwa membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan alasan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih murah cukup rendah khususnya yang terjadi pada instansi penyedia layanan pusat seperti pada Kepolisian. Walaupun demikian bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam pelayanan di Layanan Pusat, masyarakat lebih memilih untuk tidak menyuap, dari pada menyuap ataupun tidak tahu.

10. Integritas Layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (U12)

Sebagai salah satu indikator untuk menilai resiko terjadinya suap di instansi penyedia layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), integritas layanan BUMN dan BUMD diukur dengan menggunakan unsur-unsur pengalaman berinteraksi dengan instansi penyedia layanan publik kota, dan adanya ketidaksesuaian adanya indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

- a. Responden pernah berinteraksi dengan instansi Layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Tabel 5.37. Interaksi dengan BUMN dan BUMD

No	Instansi Penyedia Layanan BUMN dan BUMD	Ya		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1	PLN	479	58,7 %	337	41,3 %
2	TELKOM	474	58,1 %	342	41,9 %
3	BANK MANDIRI	424	52,0 %	392	48,0 %
4	BNI	451	55,3 %	365	44,7 %
5	BRI	512	62,7 %	304	37,3 %
6	BTN	188	23,0 %	628	77,0 %
7	Jasa Marga	141	17,3 %	675	82,7 %
8	Angkasa Pura	217	26,6 %	599	73,4 %
9	Garuda Indonesia	222	27,2 %	594	72,8 %
10	PELINDO	107	13,1 %	709	86,9 %
11	PELNI	171	21,0 %	645	79,0 %
12	BPJS Kesehatan	561	68,8 %	255	31,3 %
13	BPJS Ketenagakerjaan	381	46,7 %	435	53,3 %
14	BUMD Bidang Perbankan	132	16,2 %	684	83,8 %
15	PDAM	441	54,0 %	375	46,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Dari tabel 5.37, menunjukkan bahwa intensitas interaksi masyarakat Kota Balikpapan dengan layanan instansi penyedia layanan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah sangat bervariasi antara responden yang memberikan jawaban "Ya" dan responden yang memberikan jawaban "Tidak". Namun sesuai survey jawaban responden "Ya" lebih rendah daripada "Tidak". Sehingga kami simpulkan bahwa, hasil survei yang paling tinggi berinteraksi di layanan layanan instansi penyedia layanan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yaitu BPJS kesehatan dengan intensitas interaksi sebesar 561 responden (68,8%).

b. Ketidaksesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.38. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Lapor		Tidak Melapor								Tidak Tahu		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Tidak Tahu Kemana Harus Melapor		(2) Takut Konsekuensi Buruk atas Laporan Tersebut		(3) Tidak Merubah Apapun		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban Total		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase				
1	PLN	277	33,9 %	34	4,2 %	51	6,3 %	41	5,0 %	1	0,1 %	75	9,2 %	337	41,3 %
2	TELKOM	270	33,1 %	20	2,5 %	50	6,1 %	40	4,9 %	0	0,0 %	94	11,5 %	342	41,9 %
3	BANK MANDIRI	236	28,9 %	30	3,7 %	38	4,7 %	17	2,1 %	1	0,1 %	102	12,5 %	392	48,0 %
4	BNI	283	34,7 %	33	4,0 %	30	3,7 %	19	2,3 %	0	0,0 %	86	10,5 %	365	44,7 %
5	BRI	323	39,6 %	31	3,8 %	31	3,8 %	33	4,0 %	7	0,9 %	87	10,7 %	304	37,3 %
6	BTN	117	14,3 %	16	2,0 %	17	2,1 %	8	1,0 %	0	0,0 %	30	3,7 %	628	77,0 %
7	Jasa Marga	88	10,8 %	17	2,1 %	11	1,3 %	6	0,7 %	0	0,0 %	19	2,3 %	675	82,7 %
8	Angkasa Pura	133	16,3 %	4	0,5 %	23	2,8 %	22	2,7 %	0	0,0 %	35	4,3 %	599	73,4 %
9	Garuda Indonesia	162	19,9 %	7	0,9 %	20	2,5 %	6	0,7 %	1	0,1 %	26	3,2 %	594	72,8 %
10	PELINDO	57	7,0 %	12	1,5 %	10	1,2 %	6	0,7 %	0	0,0 %	22	2,7 %	709	86,9 %
11	PELNI	113	13,8 %	7	0,9 %	14	1,7 %	18	2,2 %	0	0,0 %	19	2,3 %	645	79,0 %
12	BPJS Kesehatan	275	33,7 %	51	6,3 %	36	4,4 %	28	3,4 %	1	0,1 %	170	20,8 %	255	31,3 %
13	BPJS Ketenagakerjaan	233	28,6 %	25	3,1 %	29	3,6 %	8	1,0 %	0	0,0 %	86	10,5 %	435	53,3 %
14	BUMD Bidang Perbankan	90	11,0 %	9	1,1 %	16	2,0 %	11	1,3 %	0	0,0 %	6	0,7 %	684	83,8 %
15	PDAM	247	30,2 %	57	7,0 %	31	3,8 %	20	2,5 %	0	0,0 %	86	10,5	375	46,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.38, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan sehingga masyarakat Kota Balikpapan tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian yaitu disebabkan karena tidak tahu harus melapor kemana, takut konsekuensi buruk atas laporan tersebut, tidak merubah apapun. Dari ke tiga alasan tersebut, mayoritas masyarakat Kota Balikpapan menjawab alasan untuk tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian disebabkan karena tidak tahu kemana harus melapor ada pada PDAM dengan penilaian sebesar 57 responden (7,0%). Sedangkan alasan takut akan konsekuensi buruk atas laporan tersebut ada pada Kepolisian dengan penilaian sebesar 51 responden (6,3%). Sementara alasan tidak melapor jika terjadi ketidak sesuaian dengan penilaian terendah karena dianggap tidak akan merubah apapun juga ada pada PLN dengan penilaian sebesar 41 responden (5,0%). Sedangkan masyarakat yang melapor jika terjadi ketidak sesuai ada pada BRI dengan penilaian sebesar 323 responden (39,6%), dan masyarakat yang tidak tahu jika terjadi ketidaksesuain ada pada BJS Kesehatan dengan penilaian sebesar 170 responden (20,8%).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa masyarakat Kota Balikpapan menilai tingkat ketidaksesuaian dan adanya indikasi untuk terjadi tindak pidana korupsi pada instansi penyedia layanan Badan Usaha Milik Negara masih cukup rendah hanya saja masyarakat masih enggan untuk melaporkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa takut akan konsekuensi buruk yang mereka terima dari laporan yang mereka sampaikan. Rata-rata masyarakat jika terjadi ketidak sesuaian pada Layanan Badan Usaha Milik Negara, masyarakat lebih memilih melaporkan dari pada tidak lapor ataupun tidak tahu.

c. Ketidaksiesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.39. Kemungkinan Menyuiap Jika Terjadi Ketidaksiesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan BUMN/BUMD	Tidak Menyuiap		Menyuiap										Tidak Tahu	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Sebagai hadiah/bentuk terima kasih		(2) Untuk mendapatkan layanan lebih murah		(3) Mempercepat urusan		(4) Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban		Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase		
1	PLN	257	31, %	0	0,0 %	2	0,2 %	60	7,4 %	1	0,1 %	0	0,0 %	159	19,5 %
2	TELKOM	279	34,2 %	1	0,1 %	2	0,2 %	102	12,5 %	1	0,1 %	0	0,0 %	89	10,9 %
3	BANK MANDIRI	245	30,0 %	4	0,5 %	3	0,4 %	74	9,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	98	12,0 %
4	BNI	286	35,0 %	1	0,1 %	77	9,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	87	10,7 %
5	BRI	321	39,3 %	0	0,0 %	32	3,9 %	48	5,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %	111	13,6 %
6	BTN	127	15,6 %	0	0,0 %	36	4,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	25	3,1 %
7	Jasa Marga	102	12,5 %	0	0,0 %	22	2,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	17	2,1 %
8	Angkasa Pura	134	16,4 %	2	0,2 %	3	0,4 %	43	5,3 %	1	0,1 %	0	0,0 %	34	4,2 %
9	Garuda Indonesia	163	20,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	34	4,2 %	1	0,1 %	0	0,0 %	24	2,9 %
10	PELINDO	62	7,6 %	0	0,0 %	5	0,6 %	10	1,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	30	3,7 %
11	PELNI	111	13,6 %	0	0,0 %	6	0,7 %	30	3,7 %	1	0,1 %	0	0,0 %	23	2,8 %
12	BPJS Kesehatan	317	38,8 %	1	0,1 %	32	3,9 %	40	4,9 %	3	0,4 %	0	0,0 %	168	20,6 %
13	BPJS Ketenagakerjaan	249	30,5 %	3	0,4 %	27	3,3 %	31	3,8 %	1	0,1 %	0	0,0 %	70	8,6 %
14	BUMD Bidang Perbankan	91	11,2 %	0	0,0 %	18	2,2 %	19	2,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4	0,5 %
15	PDAM	260	31,9 %	0	0,0 %	28	3,4 %	52	6,4 %	3	0,4 %	0	0,0 %	98	12,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.39, menunjukkan bahwa ada 4 (empat) alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian yaitu sebagai hadiah/bentuk terima kasih, untuk mendapatkan layanan yang lebih murah, mempercepat urusan, dan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan. Alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian tertinggi yang disebabkan untuk mempercepat urusan ada pada instansi layanan publik badan usaha milik daerah (BUMD)/ BUMN ada pada TELKOM sebesar 102 responden (12,5%). Sedangkan alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian tertinggi yang disebabkan untuk mendapatkan layanan lebih murah ada pada instansi layanan publik badan usaha milik daerah ada pada BNI sebesar 77 responden (9,4%). Walaupun demikian kecenderungan masyarakat jika terjadi ketidaksesuaian pada layanan publik badan usaha milik daerah (BUMD)/ BUMN lebih memilih tidak menyuap, tertinggi ada pada BRI dengan penilaian sebesar 321 responden (39,3%).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menilai bahwa membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan alasan untuk mempercepat urusan, masih cukup rendah khususnya yang terjadi pada instansi penyedia layanan public badan usaha milik daerah seperti pada TELKOM dan BNI.

11. Integritas Asosiasi Pengusaha (U13)

Sebagai salah satu indikator untuk menilai resiko terjadinya suap di instansi penyedia layanan publik, integritas asosiasi pengusaha di diukur dengan menggunakan unsur-unsur pengalaman berinteraksi dengan instansi penyedia layanan publik kota, dan

adanya ketidaksesuaian serta adanya indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

c. Responden pernah berinteraksi dengan instansi Asosiasi

Pengusaha

Tabel 5.40. Interaksi dengan Asosiasi Pengusaha

No	Instansi Penyedia Layanan Asosiasi Pengusaha	Ya		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
1	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	93	11,4 %	723	88,6 %
2	Asosiasi Logistik Indonesia	83	10,2 %	733	89,8 %
3	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia	55	6,7 %	761	93,3 %
4	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	22	2,7 %	794	97,3 %
5	Asosiasi Pengusaha Indonesia	59	7,2 %	757	92,8 %
6	Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia	49	6,0 %	767	94,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.40, menunjukkan bahwa intensitas interaksi masyarakat Kota Balikpapan dengan instansi penyedia layanan publik untuk asosiasi pengusaha, paling tinggi intensitas interaksinya ada pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan intensitas interaksi sebesar 93 responden (11,4%).

b. Ketidaksiesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.41. Alasan Tidak Melapor Jika Terjadi Ketidaksiesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Publik Provinsi	Lapor		Tidak Melapor								Tidak Tahu		Tidak	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Tidak Tahu Kemana Harus Melapor		(2) Takut Konsekuensi Buruk atas Laporan Tersebut		(3) Tidak Merubah Apapun		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban Total		Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase				
1	Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi	71	8,7 %	2	0,2 %	17	2,1 %	2	0,2 %	0	0,0 %	1	0,1 %	723	88,6 %
2	Asosiasi Logistik Indonesia	43	5,3 %	17	2,1 %	10	1,2 %	1	0,1 %	0	0,0 %	12	1,5 %	733	89,8 %
3	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia	34	4,2 %	1	0,1 %	15	1,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	5	0,6 %	761	93,3 %
4	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	3	0,4 %	0	0,0 %	17	2,1 %	1	0,1 %	0	0,0 %	1	0,1 %	794	97,3 %
5	Asosiasi Pengusaha Indonesia	33	4,0 %	3	0,4 %	18	2,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	5	0,6 %	757	92,8 %
6	Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia	24	2,9 %	11	1,3 %	13	1,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,1 %	767	94,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.41, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan sehingga masyarakat Kota Balikpapan tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian yaitu disebabkan karena tidak tahu harus melapor kemana, takut konsekuensi buruk atas laporan tersebut, tidak merubah apapun. Dari alasan tersebut, mayoritas masyarakat Kota Balikpapan menjawab alasan untuk tidak melapor jika terjadi ketidaksesuaian disebabkan karena tidak tahu kemana harus melapor ada pada Asosiasi Logistik Indonesia dengan penilaian sebesar 17 responden (2,1%). Alasan takut akan konsekuensi buruk atas laporan tersebut ada pada Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan penilaian sebesar 18 responden (2,2%). Alasan tidak melapor jika terjadi ketidak sesuaian dengan penilaian terendah karena dianggap tidak akan merubah apapun juga ada pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi dengan penilaian sebesar 2 responden (0,2%). Sedangkan masyarakat yang melapor jika terjadi ketidaksesuaian ada pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi dengan penilaian sebesar 71 responden (8,7%), dan masyarakat yang tidak tahu jika terjadi ketidaksesuain ada pada Asosiasi Logistik Indonesia dengan penilaian sebesar 12 responden (1,5%).

Berdasarkan hal tersebut, bahwa masyarakat Kota Balikpapan menilai tingkat ketidaksesuaian dan adanya indikasi terjadi tindak pidana korupsi pada instansi penyedia layanan publik untuk asosiasi pengusaha cukup rendah tetapi masyarakat masih enggan untuk melaporkan. Rata-rata masyarakat jika terjadi ketidak sesuaian pada instansi penyedia layanan publik untuk asosiasi pengusaha, masyarakat lebih memilih melaporkan dari pada tidak lapor.

c. Ketidaksesuaian dan ada indikasi untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 5.42. Kemungkinan Menyuiap Jika Terjadi Ketidaksesuaian

No	Instansi Penyedia Layanan Asosiasi Pengusaha	Tidak Menyuiap		Menyuiap										Tidak Tahu	
		Jumlah Responden	Persentase	1) Sebagai hadiah/bentuk terima kasih		(2) Untuk mendapatkan layanan lebih murah		(3) Mempercepat urusan		(4) Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan		(4) Lainnya, Tuliskan jawaban		Jumlah Responden	Persentase
				Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase	Jumlah Responden	Persentase		
1	Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi	57	7,0 %	0	0,0 %	10	1,2 %	18	2,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	8	1,0 %
2	Asosiasi Logistik Indonesia	59	7,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	14	1,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	10	1,2 %
3	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia	44	5,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	0,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	9	1,1 %
4	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	18	2,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
5	Asosiasi Pengusaha Indonesia	54	6,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1	0,1 %
6	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia	43	5,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6	0,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.42, menunjukkan bahwa ada 4 (empat) alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian yaitu sebagai hadiah/bentuk terima kasih, untuk mendapatkan layanan yang lebih murah, mempercepat urusan, dan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan. Alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian tertinggi yang disebabkan untuk mempercepat urusan ada pada penyedia layanan publik untuk asosiasi pengusaha ada pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi sebesar 18 (2,2%) responden. Sedangkan alasan membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan penilaian tertinggi yang disebabkan untuk mendapatkan layanan lebih murah ada pada penyedia layanan publik untuk asosiasi pengusaha ada pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi sebesar 10 (1,2%) responden. Walaupun demikian kecenderungan masyarakat jika terjadi ketidaksesuaian pada penyedia layanan publik untuk asosiasi pengusaha lebih memilih tidak menyuap, tertinggi ada pada Asosiasi Logistik Indonesia dengan penilaian sebesar 59 (7,2%) responden.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menilai bahwa membayar suap jika terjadi ketidaksesuaian dengan alasan untuk mempercepat urusan, masih cukup rendah khususnya yang terjadi pada penyedia layanan publik untuk asosiasi pengusaha seperti pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi.

12. Sistem Integritas Lokal (U14)

Indikator yang digunakan untuk mengukur system integrasi local di kota balikpapan adalah ekspektasi dari pentingnya pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota, peran pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota, kualitas tata kelola pilar

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota, kapasitas pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota.

- a. Ekspektasi dari pentingnya Pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota

Tabel 5.43. Sistem Integritas Lokal Pentingnya Pilar

No	OPD	Sangat Tidak Penting		Tidak Penting		Cukup Penting		Penting		Sangat Penting	
		Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase
1	Kepala Daerah	3	0,4 %	10	1,2 %	85	10,4 %	279	34,2 %	349	53,8 %
2	DPRD	7	0,9 %	28	3,4 %	77	9,4 %	235	28,8 %	469	57,5 %
3	Partai Politik	4	0,5 %	51	6,3 %	128	15,7 %	263	32,2 %	370	45,3 %
4	Pelayanan Publik	7	0,9 %	14	1,7 %	90	11,0 %	309	37,9 %	396	48,5 %
5	Pengadaan Publik	3	0,4 %	16	2,0 %	99	12,1 %	333	40,8 %	365	44,7 %
6	Pengadilan	2	0,2 %	4	0,5 %	61	7,5 %	299	36,6 %	450	55,1 %
7	Badan Pemeriksa Keuangan	2	0,2 %	5	0,6 %	35	4,3 %	288	35,3 %	486	59,6 %
8	Ombudsman	3	0,4 %	44	5,4 %	79	9,7 %	307	37,6 %	383	46,9 %
9	Media	8	1,0 %	16	2,0 %	50	6,1 %	308	37,7 %	434	53,2 %
10	Organisasi Masyarakat Sipil	8	1,0 %	51	6,4 %	113	13,8 %	293	25,9 %	350	42,9 %
11	Lembaga Anti Korupsi	2	0,2 %	3	0,4 %	41	5,0 %	274	33,6 %	496	60,8 %
12	Asosiasi Bisnis	4	0,5 %	36	4,4 %	113	13,8 %	309	37,9 %	354	43,4 %
13	Pemerintah Pusat	3	0,4 %	2	0,2 %	43	5,3 %	293	35,9%	475	58,2 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Berdasarkan tabel 5.43, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pentingnya pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Balikpapan. Ekspektasi yang mendapatkan penilaian tertinggi ada pada Lembaga Anti Korupsi sebesar 496 responden (60,8%) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, demikian halnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ekspektasi masyarakat terhadap lembaga ini juga cukup tinggi sebesar 486 responden (59,6%).

b. Peran Pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota

Tabel 5.44. Sistem Integritas Lokal Peran Pilar Saat Ini

No	OPD	Sangat Tidak Baik		Tidak Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase
1	Kepala Daerah	0	0 %	63	7,7 %	345	42,3 %	356	43,6 %	52	6,4 %
2	DPRD	12	1,5 %	106	13,0 %	308	37,7 %	331	40,6 %	59	7,2 %
3	Partai Politik	19	2,3 %	134	16,4 %	318	39,0 %	306	37,5 %	39	4,8 %
4	Pelayanan Publik	0	0 %	58	7,1 %	307	37,6 %	412	50,5 %	39	4,8 %
5	Pengadaan Publik	0	0 %	65	8,0 %	284	34,8 %	419	51,3 %	48	5,9 %
6	Pengadilan	3	0,4 %	46	5,6 %	247	30,3 %	452	55,4 %	68	8,3 %
7	Badan Pemeriksa Keuangan	3	0,4 %	28	3,4 %	206	25,2 %	458	56,1 %	121	14,8 %
8	Ombudsman	5	0,6 %	70	8,6 %	250	30,6 %	418	51,2 %	73	8,9 %
9	Media	2	0,2 %	30	3,7 %	207	25,4 %	460	56,4 %	117	14,3 %
10	Organisasi Masyarakat Sipil	14	1,7 %	77	9,4 %	274	33,6 %	376	46,1 %	75	9,2 %
11	Lembaga Anti Korupsi	0	0 %	36	4,4 %	237	29,0 %	422	51,7 %	121	14,8 %
12	Asosiasi Bisnis	6	0,7 %	53	6,5 %	289	35,4 %	398	48,8 %	70	8,6 %
13	Pemerintah Pusat	3	0,4 %	65	8,0 %	265	32,5 %	415	50,9 %	68	8,3 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Berdasarkan tabel 5.44, tentang sistem integritas lokal peran pilar saat ini di atas, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kota Balikpapan terhadap peran pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Balikpapan sudah cukup menyenangkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang memberikan jawaban "Baik" sangat tinggi di bandingkan dengan jawaban 'sangat tidak baik'. Hal ini mengindikasikan jika persepsi yang mendapatkan penilaian tertinggi untuk kategori sangat baik ada pada Lembaga Anti Korupsi dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) yang mendapatkan penilaian yang sama sebesar 121 responden (14,8%).

c. Kualitas Tata Kelola Pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota

Tabel 5.45. Sistem Integritas Lokal Kualitas Tata Kelola

No	OPD	Sangat Tidak Baik		Tidak Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase
1	Kepala Daerah	0	0 %	73	8,9 %	320	39,2 %	399	48,9 %	24	2,9 %
2	DPRD	13	1,6 %	100	12,3 %	330	40,4 %	348	42,6 %	25	3,1 %
3	Partai Politik	13	1,6 %	132	16,2 %	321	39,3 %	325	39,8 %	25	3,1 %
4	Pelayanan Publik	5	0,6 %	56	6,9 %	286	35,0 %	439	53,8 %	30	3,7 %
5	Pengadaan Publik	5	0,6 %	62	7,6 %	296	36,3 %	422	51,7 %	31	3,8 %
6	Pengadilan	0	0 %	44	5,4 %	261	32,0 %	463	56,7 %	48	5,9 %
7	Badan Pemeriksa Keuangan	3	0,4 %	22	2,7 %	203	24,9 %	511	62,6 %	77	9,4 %
8	Ombudsman	5	0,6 %	68	8,3 %	257	31,5 %	439	53,8 %	47	5,8 %
9	Media	1	0,1 %	28	3,4 %	211	25,9 %	489	59,9 %	87	10,7 %
10	Organisasi Masyarakat Sipil	11	1,3 %	75	9,2 %	281	34,4 %	395	48,4 %	54	6,6 %
11	Lembaga Anti Korupsi	0	0 %	26	3,2 %	237	29,0 %	443	54,3 %	110	13,5 %
12	Asosiasi Bisnis	6	0,7 %	52	6,4 %	286	35,0 %	433	53,1 %	39	4,8 %
13	Pemerintah Pusat	3	0,4 %	63	7,7 %	283	34,7 %	417	51,1 %	50	6,1 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer



Dari tabel 5.45, sistem integritas lokal kualitas tata kelola di atas, menunjukkan bahwa masyarakat sudah percaya dengan kualitas tata kelola pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Balikpapan. Hal ini sesuai dengan jawaban hasil survei dari responden yang memberikan penilaian "Baik" sangat banyak, dibandingkan dengan penilaian responden "sangat tidak baik". Bahkan tingkat kepercayaan yang mendapatkan penilaian tertinggi untuk kategori sangat baik ada pada lembaga anti korupsi sebanyak 110 responden (13,5%).

d. Kapasitas Pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota

Tabel 5.46. Sistem Integritas Lokal Kapasitas Lokal

No	OPD	Sangat Tidak Baik		Tidak Baik		Cukup Baik		Baik		Sangat Baik	
		Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase	Responden	Presentase
1	Kepala Daerah	2	0,2 %	65	8,0 %	316	38,7 %	409	50,1 %	24	2,9 %
2	DPRD	14	1,7 %	89	10,9 %	333	40,8 %	355	43,5 %	25	3,1 %
3	Partai Politik	16	2,0 %	121	14,8 %	308	37,7 %	349	42,8 %	22	2,7 %
4	Pelayanan Publik	0	0 %	57	7,0 %	273	33,5 %	466	57,1 %	20	2,5 %
5	Pengadaan Publik	0	0 %	63	7,7 %	293	35,9 %	431	52,8 %	29	3,6 %
6	Pengadilan	2	0,2 %	46	5,6 %	243	29,8 %	476	58,3 %	49	6,0 %
7	Badan Pemeriksa Keuangan	1	0,1 %	27	3,3 %	196	24,0 %	518	63,5 %	74	9,1 %
8	Ombudsman	5	0,6 %	63	7,7 %	263	32,2 %	434	53,2 %	51	6,3 %
9	Media	1	0,1 %	24	2,9 %	210	25,7 %	487	59,7 %	94	11,5 %
10	Organisasi Masyarakat Sipil	10	1,2 %	75	9,2 %	254	31,1 %	427	52,3 %	50	6,1 %
11	Lembaga Anti Korupsi	0	0 %	32	3,9 %	221	27,1 %	475	58,2 %	88	10,8 %
12	Asosiasi Bisnis	6	0,7 %	53	6,5 %	283	34,7 %	431	52,8 %	43	5,3 %
13	Pemerintah Pusat	1	0,1 %	58	7,1 %	278	34,1 %	439	53,8 %	40	4,9 %

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Dari tabel 5.46, menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kapasitas pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penilaian yang mendapatkan penilaian tertinggi untuk kategori sangat baik ada pada media yakni sebanyak 94 responden (11,5%). Sedangkan penilaian terhadap kapasitas pilar dengan nilai terendah ada pada partai politik sebesar 16 responden (2,0%).

D. Interpretasi Hasil Survei Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1. Indeks Literasi Korupsi (U1)

Tabel 5. 47. Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	Jumlah	R	\bar{X}	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99	50	1,980	10
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	103	54	1,907	10
3	Dinas Perhubungan	94	50	1,880	10
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	97	51	1,902	10
5	Dinas Ketenagakerjaan	96	50	1,920	10
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	100	52	1,923	10
7	Kecamatan Balikpapan Barat	98	52	1,885	10
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	105	56	1,875	10
9	RSIA Sayang Ibu	97	50	1,940	10
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	79	42	1,881	10
Rata-rata Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD ZI					10,00

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 48. Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97	51	1,902	10
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	95	50	1,900	10
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	94	50	1,880	10
4	Kecamatan Balikpapan Kota	100	53	1,887	10
5	Kecamatan Balikpapan Timur	104	55	1,891	10
6	Kecamatan Balikpapan Utara	94	50	1,880	10
Rata-rata Indeks Literasi Korupsi (U1) OPD Non-ZI					10,00

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel 5.47, diketahui bahwa Indeks Literasi Korupsi (U1) dalam menghitung nilai indeks pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) dan tabel 5.48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non Zona Integritas (Non-ZI), dalam menilai sejauhmana responden/masyarakat pernah mendengar tentang adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sama-sama mencapai indeks 10. Hal ini dapat diartikulasikan peran sumber informasi telah berhasil sampai kepada responden yang mewakili. Bahkan terjadinya kondisi tersebut dapat diinterpretasikan dari sisi pemerintah aktif mensosialisasikan di beberapa media dan dari sisi masyarakat memiliki peran aktif untuk mengupdate informasi.

2. Indeks Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan

Korupsi (U2)

Tabel 5. 49. Indeks Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	50	1,640	7
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	88	54	1,630	7
3	Dinas Perhubungan	82	50	1,640	7
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	83	51	1,627	7
5	Dinas Ketenagakerjaan	82	50	1,640	7
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	85	52	1,635	7
7	Kecamatan Balikpapan Barat	79	52	1,519	6
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	94	56	1,679	7
9	RSIA Sayang Ibu	82	50	1,640	7
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	69	42	1,643	7
Rata-rata Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) OPD ZI					6,90

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 50. Indeks Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83	51	1,627	7
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	82	50	1,640	7
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	82	50	1,640	7
4	Kecamatan Balikpapan Kota	82	53	1,547	6
5	Kecamatan Balikpapan Timur	90	55	1,636	7
6	Kecamatan Balikpapan Utara	82	50	1,640	7
Rata-rata Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) OPD Non-ZI					6,83

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.49**, diketahui bahwa Indeks Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) telah menghasilkan rata-rata mencapai indeks **7**. Adapun nilai terendah dari indeks strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (U2), telah dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Barat dengan indeks **6**. Hal ini dapat diinterpretasikan kurangnya responden/masyarakat yang mewakili menerima informasi tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah tersebut. Jika dilihat dari sumber informasi yang disampaikan pemerintah melalui beberapa media, sudah cukup diterima oleh responden/masyarakat di kota Balikpapan. Adapun cara peningkatannya, yaitu dapat dilakukan melalui Kecamatan Balikpapan Barat sebagai rekomendasi program kerja kepada universitas yang melakukan KKN di daerah tersebut.

Berdasarkan **tabel 5.50**, diketahui bahwa rata-rata Nilai Indeks Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (U2) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Zona Non Integritas (OPD Non-ZI) telah menghasilkan rata-rata mencapai indeks **7**. Adapun nilai terendah dari indeks strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (U2), telah dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Kota dengan indeks **6**. Hal ini dapat diinterpretasikan kurangnya responden/masyarakat yang mewakili menerima informasi tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah tersebut. Jika dilihat dari sumber informasi yang disampaikan pemerintah melalui beberapa media, sudah cukup diterima oleh responden/masyarakat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) kota Balikpapan. Adapun cara peningkatannya, yaitu dapat dilakukan melalui Kecamatan Balikpapan Kota sebagai rekomendasi program kerja kepada universitas yang melakukan KKN di daerah tersebut.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **6,90** dibandingkan Non Zona Integritas (ZI) sebesar **6,83**.

3. Indeks Daya Saing Lokal (U3)

Tabel 5. 51. Indeks Daya Saing Lokal (U3) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2043	50	40,860	7
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	2179	54	40,352	7
3	Dinas Perhubungan	2013	50	40,260	7
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2094	51	41,059	7
5	Dinas Ketenagakerjaan	2070	50	41,400	7
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	2231	52	42,904	8
7	Kecamatan Balikpapan Barat	1981	52	38,096	6
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	2217	56	39,589	7
9	RSIA Sayang Ibu	2268	50	45,360	8
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	1668	42	39,714	7
Rata-rata Indeks Daya Saing Lokal (U3) OPD ZI					7,10

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 52. Indeks Daya Saing Lokal (U3) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2368	51	46,431	9
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	2121	50	42,420	8
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	2029	50	40,580	7
4	Kecamatan Balikpapan Kota	2091	53	39,453	7
5	Kecamatan Balikpapan Timur	2426	55	44,109	8
6	Kecamatan Balikpapan Utara	1841	50	36,820	6
Rata-rata Indeks Daya Saing Lokal (U3) OPD Non-ZI					7,50

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.51**, diketahui bahwa indeks Daya Saing Lokal (U3) dalam menghitung pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) telah menghasilkan

indeks tertinggi sebesar **8** yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Selatan dan RSIA Sayang Ibu. Sebaliknya indeks terendah pada unsur indeks daya saing (U3) yaitu Kecamatan Balikpapan Barat mencapai indeks **6**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa daya saing lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan cara meningkatkan ketersediaan lapangan kerja sesuai **tabel 5.7** (daya saing lokal). Jika terjadinya penilaian sangat buruk pada unsur ketersediaan lapangan kerja, maka pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam meningkatkan kepercayaan pada pihak investor. Dari sisi pemerintah dapat meningkatkan kemudahan dalam kemampuan birokrasi dengan syarat yang tidak terlalu memberatkan pihak investor, sementara dari masyarakat terus berupaya meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki khususnya untuk meningkatkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Barat.

Berdasarkan **tabel 5.52**, diketahui bahwa indeks Daya Saing Lokal (U3) dalam menghitung pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) telah menghasilkan indeks tertinggi sebesar **9** yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini diasumsikan, dampak dari salah satu implementasi berdasarkan zonasi. Sehingga layanan/kesempatan yang diterima oleh masyarakat, berdasarkan tempat operasional dimana sekolah beroperasi mampu mengurangi atas komplain atau ketidakpuasan masyarakat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sebaliknya indeks terendah pada unsur indeks daya saing (U3) yaitu

Kecamatan Balikpapan Utara mencapai indeks **6**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa daya saing lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan cara meningkatkan ketersediaan lapangan kerja sesuai **tabel 5.7** (daya saing lokal).. Jika terjadinya penilaian sangat buruk pada unsur ketersediaan lapangan kerja, maka pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam meningkatkan kepercayaan pada pihak investor. Dari sisi pemerintah dapat meningkatkan kemudahan dalam kemampuan birokrasi dengan syarat yang tidak terlalu memberatkan pihak investor, sementara dari masyarakat terus berupaya meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki khususnya untuk meningkatkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Utara.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Daya Saing (U3), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar 7,50 dibandingkan Zona Integritas (ZI) sebesar 7,10.

4. Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4)

Tabel 5. 53. Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1677	50	33,540	6
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	1879	54	34,796	6
3	Dinas Perhubungan	1752	50	35,040	7
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1761	51	34,529	6
5	Dinas Ketenagakerjaan	1717	50	34,340	6
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	1898	52	36,500	7
7	Kecamatan Balikpapan Barat	1636	52	31,462	6
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	1891	56	33,768	6
9	RSIA Sayang Ibu	2056	50	41,120	8
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	1420	42	33,810	6
Rata-rata Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4) OPD ZI					6,40

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 54. Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	Jumlah	R	X	Indeks+
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2133	51	41,824	8
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	1870	50	37,400	7
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	1708	50	34,160	6
4	Kecamatan Balikpapan Kota	1888	53	35,623	7
5	Kecamatan Balikpapan Timur	2063	55	37,509	7
6	Kecamatan Balikpapan Utara	1650	50	33,000	6
Rata-rata Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4) OPD Non-ZI					6,83

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.53**, diketahui bahwa indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4) pada masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (OPD ZI) telah menghasilkan indeks tertinggi sebesar **8** yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSIA Sayang Ibu. Hal ini diasumsikan responden yang telah menerima layanan publik agak sedikit yang mengalami faktor hambatan kemudahan berusaha, sesuai dengan **tabel 5.8** (penghambat kemudahan berusaha) yang telah memberikan interpretasi penilaian sangat baik dari faktor akses infrastruktur kota Balikpapan. Sebaliknya terdapat 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berada pada indeks **6**. Hal ini dapat diinterpretasikan berdasarkan **tabel 5.8** (penghambat kemudahan berusaha), bahwa faktor penghambat kemudahan berusaha yaitu faktor korupsi. Adapun kegiatan korupsi berdasarkan alasan di lapangan adalah pemberian tambahan biaya, artinya bukan dari pihak pemberi layanan publik yang meminta tetapi dari inisiatif pihak yang menerima layanan publik. Untuk mengurangi kejadian seperti diatas, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut mengurangi layanan yang bersifat tatap muka.

Berdasarkan **tabel 5.54**, diketahui bahwa indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (OPD ZI) telah menghasilkan indeks tertinggi sebesar **8** yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini diasumsikan responden yang telah menerima layanan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agak sedikit yang mengalami faktor hambatan kemudahan berusaha, sesuai dengan **tabel 5.8** (penghambat kemudahan berusaha) yang telah memberikan interpretasi penilaian

sangat baik dari faktor akses infrastruktur kota Balikpapan. Sebaliknya terdapat 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berada pada indeks **6** yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara. Hal ini dapat diinterpretasikan berdasarkan **tabel 5.8** (penghambat kemudahan berusaha), bahwa faktor penghambat kemudahan berusaha yaitu faktor korupsi. Adapun kegiatan korupsi berdasarkan alasan di lapangan adalah pemberian tip, artinya bukan dari pihak pemberi layanan publik yang meminta tetapi dari inisiatif pihak yang menerima layanan publik. Untuk mengurangi kejadian seperti diatas, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut mengurangi layanan yang bersifat tatap muka. Salah satunya meningkatkan layanan publik berbasis *online*.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Penghambat Kemudahan Berusaha (U4), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **6,83** dibandingkan Zona Integritas (ZI) sebesar **6,40**.

5. Indeks Potensi Korupsi (U5)

Tabel 5. 55. Indeks Potensi Korupsi (U5) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	Jumlah	R	\bar{X}	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5025	50	100,500	6
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	6060	54	112,222	7
3	Dinas Perhubungan	5270	50	105,400	6
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5325	51	104,412	6
5	Dinas Ketenagakerjaan	5142	50	102,840	6
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	5928	52	114,000	7
7	Kecamatan Balikpapan Barat	5676	52	109,154	7
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	6424	56	114,714	7
9	RSIA Sayang Ibu	7284	50	145,680	10
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	4381	42	105,454	6
Rata-rata Indeks Potensi Korupsi (U5) OPD ZI					6,80

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 56. Indeks Potensi Korupsi (U5) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	Jumlah	R	\bar{X}	Indeks+
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6842	51	134,157	9
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	4755	50	95,100	5
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	5522	50	110,440	7
4	Kecamatan Balikpapan Kota	6864	53	129,509	9
5	Kecamatan Balikpapan Timur	5308	55	96,509	6
6	Kecamatan Balikpapan Utara	5631	50	112,620	7
Rata-rata Indeks Potensi Korupsi (U5) OPD Non-ZI					7,17

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.55**, diketahui bahwa Indeks Potensi Korupsi (U5) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Zona Integritas (OPD ZI) telah menghasilkan indeks tertinggi sebesar **10** yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSIA Sayang Ibu. Hal ini diasumsikan responden yang telah menerima layanan publik di RSIA Sayang Ibu tidak memiliki adanya potensi korupsi, yang mengindikasikan para penerima layanan publik menggunakan jasa asuransi dan pembayaran yang cukup ekonomis. Bahkan jika diintegrasikan dengan **tabel 5.9** (prevalensi korupsi), membuktikan bahwa korupsi oleh pegawai publik di tingkat lokal penilaian terbesar adalah tidak pernah, serta terlihat di **tabel 5.12** (frekuensi korupsi) jika frekuensi korupsi di pelayanan kesehatan dengan penilaian sangat sering terkategori rendah. Sebaliknya terdapat 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berada pada indeks **6** . Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, masih sering atau banyak berinteraksi antara pemberi layanan dan penerima layanan publik. Bahkan jika diintegrasikan dengan tabel terkait yaitu **tabel 5.9** (prevalensi korupsi), bahwa kejadian suap dan korupsi dengan penilaian sangat sering paling tinggi sebesar **4,78%** dibanding faktor prevalensi yang lain. Serta motivasi dari korupsi pada **tabel 5.11** (motivasi korupsi) bahwa korupsi dilakukan karena faktor akibat adanya perlakuan istimewa sebesar **6,25%**.

Berdasarkan **tabel 5.56**, diketahui bahwa Indeks Potensi Korupsi (U5) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (OPD ZI) telah menghasilkan indeks tertinggi sebesar **9** yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kecamatan Balikpapan Kota . Hal ini diasumsikan responden yang telah menerima layanan publik

tersebut, kurang memiliki adanya potensi korupsi yang mengindikasikan para penerima layanan publik cukup puas dari layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Sebaliknya terdapat 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berada pada indeks terendah yaitu **5**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD), masih sering atau banyak berinteraksi antara pemberi layanan dan penerima layanan publik. Bahkan jika diintegrasikan dengan tabel terkait yaitu **tabel 5.9** (prevalensi korupsi) bahwa kejadian suap dan korupsi dengan penilaian sangat sering paling tinggi sebesar **4,78%** dibanding faktor prevalensi yang lain. Serta motivasi dari korupsi pada tabel **5.11** (motivasi korupsi) bahwa korupsi dilakukan karena faktor akibat adanya perlakuan istimewa sebesar **6,25%**.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Potensi Korupsi (U5), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **7,17** dibandingkan Zona Integritas (ZI) sebesar **6,80**.

6. Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6)

Tabel 5. 57. Jumlah Skor Per Indikator Penilaian Integritas Bisnis (U6)

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Responden	Jumlah Skor Per Indikator					
			A	B	C-	D	E	F
			Kendala Dalam Mendapatkan Pelayanan	Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi Di Kota Balikpapan	Keterlibatan Pribadi Untuk Melawan Korupsi	Kode Etik Yang Tegas Melarang Korupsi	Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat / Perusahaan Swasta	Kegiatan Paling Efektif Dalam Upaya Melawan Korupsi
OPD ZI								
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	93	829	420	558	842	885
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	54	83	1241	352	544	1049	950
3	Dinas Perhubungan	50	91	851	307	415	693	883
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	51	85	1003	367	460	945	946
5	Dinas Ketenagakerjaan	50	81	613	298	531	784	868
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	52	98	767	379	294	912	920
7	Kecamatan Balikpapan Barat	52	98	1149	323	239	450	1099
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	56	109	1220	335	368	1020	957
9	RSIA Sayang Ibu	50	99	1240	205	580	1194	1096
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	42	70	749	338	515	659	729
OPD Non-ZI								
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51	102	646	518	474	542	857
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	50	91	538	344	585	950	945
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	50	85	787	334	415	662	930
4	Kecamatan Balikpapan Kota	53	105	705	414	474	584	1025
5	Kecamatan Balikpapan Timur	55	60	728	380	319	943	802
6	Kecamatan Balikpapan Utara	50	66	547	362	312	619	717

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 58. Rata-rata Per Indikator Penilaian Integritas Bisnis
(U6)

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Responden	Rata-Rata Per Indikator (\bar{X})					
			A	B	C-	D	E	F
			Kendala Dalam Mendapatkan Pelayanan	Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi Di Kota Balikpapan	Keterlibatan Pribadi Untuk Melawan Korupsi	Kode Etik Yang Tegas Melarang Korupsi	Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat / Perusahaan Swasta	Kegiatan Paling Efektif Dalam Upaya Melawan Korupsi
OPD ZI								
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	1,860	16,580	8,400	11,160	16,840	17,700
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	54	1,537	22,981	6,519	10,074	19,426	17,593
3	Dinas Perhubungan	50	1,820	17,020	6,140	8,300	13,860	17,660
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	51	1,667	19,667	7,196	9,020	18,529	18,549
5	Dinas Ketenagakerjaan	50	1,620	12,260	5,960	10,620	15,680	17,360
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	52	1,885	14,750	7,288	5,654	17,538	17,692
7	Kecamatan Balikpapan Barat	52	1,885	22,096	6,212	4,596	8,654	21,135
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	56	1,946	21,786	5,982	6,571	18,214	17,089
9	RSIA Sayang Ibu	50	1,980	24,800	4,100	11,600	23,880	21,920
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	42	1,860	16,580	8,400	11,160	16,840	17,700
OPD Non-ZI								
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51	2,000	12,667	10,157	9,294	10,627	16,804
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	50	1,820	10,760	6,880	11,700	19,000	18,900
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	50	1,700	15,740	6,680	8,300	13,240	18,600
4	Kecamatan Balikpapan Kota	53	1,981	13,302	7,811	8,943	11,019	19,340
5	Kecamatan Balikpapan Timur	55	1,091	13,236	6,909	5,800	17,145	14,582
6	Kecamatan Balikpapan Utara	50	1,320	10,940	7,240	6,240	12,380	14,340

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 59. Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6) OPD ZI

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Responden	Nilai Indeks Per Indikator						Rata-Rata Indeks
			A	B	C-	D	E	F	
			Kendala Dalam Mendapatkan Pelayanan	Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi Di Kota Balikpapan	Keterlibatan Pribadi Untuk Melawan Korupsi	Kode Etik Yang Tegas Melarang Korupsi	Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat / Perusahaan Swasta	Kegiatan Paling Efektif Dalam Upaya Melawan Korupsi	
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	9	6	8	6	5	7	6,83
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	54	7	10	9	7	5	7	7,50
3	Dinas Perhubungan	50	8	6	9	8	4	7	7,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	51	7	8	8	7	5	7	7,00
5	Dinas Ketenagakerjaan	50	6	4	10	6	5	7	6,33
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	52	10	5	9	5	5	7	6,83
7	Kecamatan Balikpapan Barat	52	10	9	9	5	5	9	7,83
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	56	10	9	10	5	5	6	7,50
9	RSIA Sayang Ibu	50	10	10	10	5	8	9	8,67
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	42	7	7	8	5	4	7	6,33
Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6) ZI									7,18

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 60. Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6) OPD Non-ZI

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Responden	Nilai Indeks Per Indikator						Rata-Rata Indeks
			A	B	C-	D	E	F	
			Kendala Dalam Mendapatkan Pelayanan	Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi Di Kota Balikpapan	Keterlibatan Pribadi Untuk Melawan Korupsi	Kode Etik Yang Tegas Melarang Korupsi	Persepsi Terhadap Perilaku Masyarakat / Perusahaan Swasta	Kegiatan Paling Efektif Dalam Upaya Melawan Korupsi	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51	10	4	6	7	5	6	6,33
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	50	9	3	9	5	6	7	6,50
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	50	7	5	9	5	5	8	6,50
4	Kecamatan Balikpapan Kota	53	10	4	8	5	5	8	6,67
5	Kecamatan Balikpapan Timur	55	8	4	9	5	5	5	6,00
6	Kecamatan Balikpapan Utara	50	5	3	9	10	5	5	6,17
Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6) OPD Non-ZI									6,36

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.57**, diketahui bahwa Penilaian Integritas Bisnis (U6) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (OPD ZI) telah menghasilkan indeks tertinggi sebesar **8,67** yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSIA Sayang Ibu. Hal ini diinterpretasikan jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSIA Sayang Ibu, memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu faktor kendala dalam mendapatkan pelayanan, penghambat pemberantasan korupsi, dan keterlibatan secara pribadi melawan korupsi mencapai indeks **10**. Indeks tersebut mengindikasikan bahwa, penerima layanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSIA Sayang Ibu mendukung dalam peningkatan integritas bisnis kota Balikpapan. Namun rendahnya kode etik yang melarang

korupsi dikarenakan banyak responden tidak memiliki perusahaan sesuai pertanyaan di kuisioner. Sebaliknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terendah berada pada indeks **6,33** yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan SMPN 1 Kota Balikpapan. Hal ini diinterpretasikan jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketenagakerjaan dan SMPN 1 Kota Balikpapan, memiliki persepsi terhadap upaya melawan korupsi cukup rendah. Hal ini dapat diintegrasikan dengan **tabel 5.19** (persepsi terhadap perilaku masyarakat/perusahaan dalam upaya melawan korupsi) bahwa rendahnya pelatihan anti korupsi yang kontinu. Hal ini dapat di tingkatkan dengan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketenagakerjaan dan SMPN 1 Kota Balikpapan.

Berdasarkan **tabel 5.59**, diketahui bahwa Penilaian Integritas Bisnis (U6) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (OPD ZI) telah menghasilkan indeks tertinggi sebesar **6,67** yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Kota. Hal ini diinterpretasikan jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Kota, memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu faktor kendala dalam mendapatkan pelayanan yaitu **10**. Indeks tersebut mengindikasikan bahwa, penerima layanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Kota cukup berperan dalam peningkatan integritas bisnis kota Balikpapan. Namun rendahnya faktor penghambat pemberantasan korupsi sesuai **tabel 5.15** (faktor penghambat pemberantasan korupsi di Kota Balikpapan) penilaian sangat setuju mencapai **17,2%** dengan statement korupsi tidak dipidana dengan tegas. Sebaliknya Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang terendah berada pada indeks **6,00** yaitu Kecamatan Balikpapan Timur. Hal ini dapat diinterpretasikan jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, memiliki persepsi terhadap upaya melawan korupsi rendah. Hal ini dapat diintegrasikan dengan **tabel 5.15** (faktor penghambat pemberantasan korupsi di Kota Balikpapan), bahwa rendahnya faktor penghambat pemberantasan korupsi lebih banyak memiliki persepsi korupsi tidak dipidana dengan tegas.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Penilaian Integritas Bisnis (U6), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **7,18** dibandingkan non Zona Integritas (ZI) sebesar **6,36**.

7. Indeks Resiko Suap (U7)

Tabel 5. 61. Indeks Resiko Suap (U7) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	Jml	R	X	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11366	50	227,320	8
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	13692	54	253,556	10
3	Dinas Perhubungan	12396	50	247,920	10
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12501	51	245,118	9
5	Dinas Ketenagakerjaan	12036	50	240,720	9
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	13330	52	256,346	10
7	Kecamatan Balikpapan Barat	13986	52	268,962	10
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	14312	56	255,571	10
9	RSIA Sayang Ibu	13427	50	268,540	10
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	10220	42	243,333	9
Rata-rata Indeks Resiko Suap (U7) OPD ZI					9,50

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 62. Indeks Resiko Suap (U7) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	Jml	R	X	Indeks+
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12251	51	240,216	9
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	12938	50	258,760	10
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	12249	50	244,980	9
4	Kecamatan Balikpapan Kota	12861	53	242,660	9
5	Kecamatan Balikpapan Timur	14376	55	261,382	10
6	Kecamatan Balikpapan Utara	12612	50	252,240	10
Rata-rata Indeks Resiko Suap (U7) OPD Non-ZI					9,50

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel **5.61**, nilai indeks tertinggi pada OPD ZI Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT); Dinas Perhubungan; Kecamatan Balikpapan Selatan; Kecamatan Balikpapan Barat; RSUD Beriman Kota Balikpapan; RSIA Sayang Ibu sebesar 10, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD ZI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 8. Hal ini berarti bahwa hampir semua responden / masyarakat memberikan respon terbaik terhadap Resiko Suap (U7) di Kota Balikpapan khususnya pada masing-masing OPD ZI, semakin baik (positif) responden memberikan penilaian tentang Resiko Suap (U7) di Kota Balikpapan khususnya pada masing-masing OPD ZI maka nilai indeks semakin tinggi (baik). Berdasarkan lapangan usaha yang diintegrasikan dengan **tabel 5.22** (pengalaman relasi bisnis) bahwa melakukan penyuaipan untuk mengamankan bisnis merupakan jawaban yang paling banyak dari semua jenis lapangan usaha. Hal ini dapat diasumsikan perusahaan yang memiliki modal besar dapat melakukan penyuaipan.

Berdasarkan **tabel 5.62**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD Non-ZI Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD); Kecamatan Balikpapan Timur; Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 10, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD Non-ZI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kecamatan Balikpapan Tengah; dan Kecamatan Balikpapan Kota sebesar 9,00. Hal ini berarti bahwa hampir semua responden / masyarakat memberikan respon terbaik terhadap Resiko Suap (U7) di Kota Balikpapan khususnya pada masing-masing OPD Non-ZI, semakin baik (positif) responden memberikan penilaian tentang Resiko Suap (U7) di Kota Balikpapan khususnya pada masing-masing OPD Non-ZI maka nilai indeks semakin tinggi (baik). Berdasarkan lapangan usaha yang diintegrasikan dengan **tabel 5.22** (pengalaman relasi bisnis) bahwa melakukan penyuapan untuk mengamankan bisnis merupakan jawaban yang paling banyak dari semua jenis lapangan usaha. Hal ini dapat diasumsikan perusahaan yang memiliki modal besar dapat melakukan penyuapan.

Berdasarkan keseluruhan bahwa rata-rata Nilai Indeks Resiko Suap (U7) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas (OPD ZI) dan Organisasi Perangkat Daerah Zona Non Integritas (OPD Non-ZI) sama-sama mencapai indeks sebesar **9,50**.

8. Indeks Integritas Layanan Kota (U8)

Tabel 5. 63. Indeks Integritas Layanan Kota (U8) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1843	2964	50	36,860	59,280	8	7	7,50
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	2313	2899	54	42,833	53,685	7	6	6,50
3	Dinas Perhubungan	1624	3230	50	32,480	64,600	9	9	9,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1897	3040	51	37,196	59,608	8	7	7,50
5	Dinas Ketenagakerjaan	2024	2462	50	40,480	49,240	7	5	6,00
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	2366	2707	52	45,500	52,058	6	6	6,00
7	Kecamatan Balikpapan Barat	1408	3599	52	27,077	69,212	10	10	10,00
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	1880	3563	56	33,571	63,625	9	8	8,50
9	RSIA Sayang Ibu	1706	3160	50	34,120	63,200	9	8	8,50
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	1789	2246	42	42,595	53,476	7	6	6,50
Rata-rata Indeks Integritas Layanan Kota (U8) OPD ZI									7,60

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 64. Indeks Integritas Layanan Kota (U8) OPD ZI

No	Nama OPD Non-ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2113	2804	51	41,431	54,980	7	6	6,50
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	1784	3004	50	35,680	60,080	8	7	7,50
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	1908	2375	50	38,160	47,500	8	5	6,50
4	Kecamatan Balikpapan Kota	2460	2786	53	46,415	52,566	6	6	6,00
5	Kecamatan Balikpapan Timur	1943	3257	55	35,327	59,218	9	7	8,00
6	Kecamatan Balikpapan Utara	1671	3149	50	33,420	62,980	9	8	8,50
Rata-rata Indeks Integritas Layanan Kota (U8) OPD Non-ZI									7,17

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.63**, Nilai indeks tertinggi pada OPD ZI Kecamatan Balikpapan Barat sebesar **10**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD ZI Dinas Ketenagakerjaan, dan Kecamatan Balikpapan Selatan sebesar **6,00**. Hal ini berarti bahwa tidak semua responden/masyarakat memberikan respon terbaik terhadap Integritas Layanan Kota (U8) di Kota Balikpapan khususnya pada masing-masing OPD ZI. Hal ini tergambar pada **tabel 5.26** (alasan tidak melapor jika tidak terjadi kesesuaian) responden yang paling sedikit menjawab lapor adalah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Hal ini mengindikasikan dari sisi penerima layanan/masyarakat tidak terbebani adanya ketidaksesuaian.

Berdasarkan **tabel 5.64**, diketahui Nilai indeks tertinggi pada OPD Non-ZI Kecamatan Balikpapan Utara sebesar **8,50**, sedangkan



nilai indeks terendah pada OPD Non-ZI Kecamatan Balikpapan Kota sebesar **6,00**. Hal ini berarti bahwa tidak semua responden / masyarakat memberikan respon terbaik terhadap Integritas Layanan Kota (U8) di Kota Balikpapan khususnya pada masing-masing OPD Non-ZI. Hal ini tergambar pada **tabel 5.26** (alasan tidak melapor jika tidak terjadi kesesuaian) responden yang paling sedikit menjawab lapor adalah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Hal ini mengindikasikan dari sisi penerima layanan/masyarakat tidak terbebani adanya ketidaksesuaian.

Berdasarkan secara keseluruhan bahwa rata-rata Nilai Indeks Integritas Layanan Kota (U8) pada Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas (OPD ZI) sebesar **7,60**, sementara nilai terendah rata-rata Nilai Indeks Integritas Layanan Kota (U8) pada Organisasi Perangkat Daerah Zona Non Integritas (OPD Non-ZI) sebesar **7,17**.

9. Indeks Integritas Layanan Provinsi (U9)

Tabel 5. 65. Indeks Integritas Layanan Provinsi (U9) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	502	581	50	10,040	11,620	7	5	6,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	579	597	54	10,722	11,056	6	4	5,00
3	Dinas Perhubungan	440	607	50	8,800	12,140	8	6	7,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	500	662	51	9,804	12,980	7	6	6,50
5	Dinas Ketenagakerjaan	540	771	50	10,800	15,420	6	8	7,00
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	612	729	52	11,769	14,019	5	7	6,00
7	Kecamatan Balikpapan Barat	431	774	52	8,288	14,885	9	8	8,50
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	578	930	56	10,321	16,607	7	10	8,50
9	RSIA Sayang Ibu	516	830	50	10,320	16,600	7	10	8,50
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	483	558	42	11,500	13,286	6	6	6,00
Rata-rata Indeks Integritas Layanan Provinsi (U9) OPD ZI									6,90

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 66. Indeks Integritas Layanan Provinsi (U9) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	547	714	51	10,725	14,000	6	7	6,50
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	520	619	50	10,400	12,380	7	6	6,50
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	579	754	50	11,580	15,080	5	9	7,00
4	Kecamatan Balikpapan Kota	670	791	53	12,642	14,925	4	8	6,00
5	Kecamatan Balikpapan Timur	514	688	55	9,345	12,509	8	6	7,00
6	Kecamatan Balikpapan Utara	455	818	50	9,100	16,360	8	9	8,50
Rata-rata Indeks Integritas Layanan Provinsi (U9) OPD Non-ZI									6,92

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.65**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD ZI Kecamatan Balikpapan Barat; RSUD Beriman Kota Balikpapan; dan RSIA Sayang Ibu sebesar **8,50**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD ZI Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPPT) sebesar **5,00**.

Berdasarkan **tabel 5.66**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD Non-ZI Kecamatan Balikpapan Utara sebesar

8,50, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD Non-ZI Kecamatan Balikpapan Kota sebesar **6,00**.

Hal ini tergambar pada **tabel 5.29** (alasan tidak melapor jika tidak terjadi kesesuaian) responden yang paling sedikit menjawab lapor adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan pada **tabel 5.30** (Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian) responden yang paling banyak menjawab menyuap adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. Hal ini mengindikasikan dari sisi penerima layanan/masyarakat cukup terbebani adanya ketidaksesuaian.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Integritas Layanan Provinsi (U9), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **6,92** dibandingkan Zona Integritas (ZI) sebesar **6,90**.

10. Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10)

Tabel 5. 67. Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10)
OPD ZI

No	Nama OPD ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	587	935	50	11,740	18,700	7	9	8,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	872	775	54	16,148	14,352	6	5	5,50
3	Dinas Perhubungan	574	957	50	11,480	19,140	7	9	8,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	610	750	51	11,961	14,706	7	6	6,50
5	Dinas Ketenagakerjaan	614	726	50	12,280	14,520	6	6	6,00
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	618	597	52	11,885	11,481	7	3	5,00
7	Kecamatan Balikpapan Barat	720	693	52	13,846	13,327	5	4	4,50
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	1131	1137	56	20,196	20,304	0	10	5,00
9	RSIA Sayang Ibu	1016	1000	50	20,320	20,000	0	10	5,00
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	723	706	42	17,214	16,810	2	7	4,50
Rata-rata Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10) OPD ZI									5,80

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 68. Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10) OPD Non-ZI

No	Nama OPD ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	764	801	51	14,980	15,706	5	6	5,50
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	745	735	50	14,900	14,700	4	6	5,00
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	728	686	50	14,560	13,720	5	5	5,00
4	Kecamatan Balikpapan Kota	882	792	53	16,642	14,943	3	6	4,50
5	Kecamatan Balikpapan Timur	905	894	55	16,455	16,255	3	7	5,00
6	Kecamatan Balikpapan Utara	935	899	50	18,700	17,980	1	8	4,50
Rata-rata Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10) OPD Non-ZI									4,92

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.67**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD ZI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan Dinas Perhubungan sebesar **8,00**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD ZI Kecamatan Balikpapan Barat; dan SMPN 1 Kota Balikpapan sebesar **4,50**.

Berdasarkan **tabel 5.68**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD Non-ZI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar **5,50**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD Non-ZI

Kecamatan Balikpapan Kota; dan Kecamatan Balikpapan Utara sebesar **4,50**.

Hal ini tergambar pada **tabel 5.32** (alasan tidak melapor jika tidak terjadi kesesuaian) responden yang paling sedikit menjawab lapor adalah Kejaksaan Negeri. Dan pada **tabel 5.33** (Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian) responden yang paling banyak menjawab menyuap adalah Kejaksaan Negeri. Hal ini mengindikasikan dari sisi penerima layanan/masyarakat cukup terbebani adanya ketidaksesuaian.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Integritas Layanan Vertikal Daerah (U10), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **5,80** dibandingkan Non Zona Integritas (ZI) sebesar **4,92**.

11. Indeks Integritas Layanan Pusat (U11)

Tabel 5. 69. Indeks Integritas Layanan Pusat (U11) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1705	1476	50	34,100	29,520	2	8	5,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	1029	1640	54	19,056	30,370	7	8	7,50
3	Dinas Perhubungan	1600	1532	50	32,000	30,640	1	8	4,50
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1560	1356	51	30,588	26,588	4	6	5,00
5	Dinas Ketenagakerjaan	1014	1431	50	20,280	28,620	7	7	7,00
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	1118	1386	52	21,500	26,654	6	6	6,00
7	Kecamatan Balikpapan Barat	1126	1326	52	21,654	25,500	6	6	6,00
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	1783	1633	56	31,839	29,161	1	9	5,00
9	RSIA Sayang Ibu	1606	1416	50	32,120	28,320	1	9	5,00
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	1336	1182	42	31,810	28,143	1	7	4,00
Rata-rata Indeks Integritas Layanan Pusat (U11) OPD ZI									5,50

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 70. Indeks Integritas Layanan Pusat (U11) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1575	1474	51	30,882	28,902	2	8	5,00
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	1395	1419	50	27,900	28,380	3	7	5,00
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	1309	1404	50	26,180	28,080	4	7	5,50
4	Kecamatan Balikpapan Kota	1674	1381	53	31,585	26,057	1	6	3,50
5	Kecamatan Balikpapan Timur	1690	1574	55	30,727	28,618	2	7	4,50
6	Kecamatan Balikpapan Utara	1605	1455	50	32,100	29,100	1	9	5,00
Rata-rata Indeks Integritas Layanan Pusat (U11) OPD Non-ZI									4,75

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.69**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD ZI Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) sebesar **7,50**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD ZI SMPN 1 Kota Balikpapan sebesar **4,00**.

Berdasarkan **tabel 5.70**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD Non-ZI Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar **5,50**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD Non-ZI Kecamatan Balikpapan Kota sebesar **3,50**.

Hal ini tergambar pada **tabel 5.35** (alasan tidak melapor jika tidak terjadi kesesuaian) responden yang paling sedikit menjawab



lapor adalah Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM. Dan pada **tabel 5.36** (Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian) responden yang paling banyak menjawab menyuap adalah Kepolisian. Hal ini mengindikasikan dari sisi penerima layanan/masyarakat cukup terbebani adanya ketidaksesuaian.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Integritas Layanan Pusat (U11), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **5,50** dibandingkan Non Zona Integritas (ZI) sebesar **4,75**.

12. Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12)

Tabel 5. 71. Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1952	2024	50	39,040	40,480	1	9	5,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	1335	1445	54	24,722	26,759	7	4	5,50
3	Dinas Perhubungan	1867	2055	50	37,340	41,100	3	9	6,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1807	1791	51	35,431	35,118	3	7	5,00
5	Dinas Ketenagakerjaan	1637	1778	50	32,740	35,560	4	7	5,50
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	1467	1613	52	28,212	31,019	6	5	5,50
7	Kecamatan Balikpapan Barat	1792	1793	52	34,462	34,481	3	7	5,00
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	2140	2251	56	38,214	40,196	2	9	5,50
9	RSIA Sayang Ibu	1930	2022	50	38,600	40,440	2	9	5,50
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	1371	1431	42	32,643	34,071	4	7	5,50
Rata-rata Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12) OPD ZI									5,40

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 72. Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12) OPD
ZI

No	Nama OPD Non-ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1667	1716	51	32,686	33,647	4	6	5,00
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	1299	1460	50	25,980	29,200	7	5	6,00
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	1634	1914	50	32,680	38,280	4	8	6,00
4	Kecamatan Balikpapan Kota	1729	1984	53	32,623	37,434	4	8	6,00
5	Kecamatan Balikpapan Timur	1753	2052	55	31,873	37,309	4	8	6,00
6	Kecamatan Balikpapan Utara	1754	1884	50	35,080	37,680	3	7	5,00
Rata-rata Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12) OPD Non-ZI									5,67

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.71**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD ZI Dinas Perhubungan sebesar **6,00**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD ZI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan Kecamatan Balikpapan Barat sebesar **5,00**.

Berdasarkan **tabel 5.72**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD Non-ZI Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD); Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Kota; dan Kecamatan Balikpapan Timur sebesar **6,00**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD Non-ZI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kecamatan Balikpapan Utara sebesar **5,00**.

Hal ini tergambar pada **tabel 5.38** (alasan tidak melapor jika tidak terjadi kesesuaian) responden yang paling sedikit menjawab lapor adalah PELINDO. Dan pada **tabel 5.39** (Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian) responden yang paling banyak menjawab menyuap adalah TELKOM. Hal ini mengindikasikan dari sisi penerima layanan/masyarakat cukup terbebani adanya ketidaksesuaian.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **5,67** dibandingkan OPD Zona Integritas (ZI) sebesar **5,40**.

13. Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13)

Tabel 5. 73. Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13) OPD
ZI

No	Nama OPD ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	357	851	50	7,140	17,020	10	10	10,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	761	622	54	14,093	11,519	6	5	5,50
3	Dinas Perhubungan	362	879	50	7,240	17,580	10	10	10,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	412	768	51	8,078	15,059	9	8	8,50
5	Dinas Ketenagakerjaan	532	757	50	10,640	15,140	6	8	7,00
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	609	631	52	11,712	12,135	5	6	5,50
7	Kecamatan Balikpapan Barat	314	730	52	6,038	14,038	10	7	8,50
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	469	961	56	8,375	17,161	8	10	9,00
9	RSIA Sayang Ibu	427	859	50	8,540	17,180	8	10	9,00
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	462	630	42	11,000	15,000	6	8	7,00
Rata-rata Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13) OPD ZI									8,00

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 74. Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	-	+	R	X-	X+	Indeks-	Indeks+	X_Indeks
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	567	760	51	11,118	14,902	6	8	7,00
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	376	739	50	7,520	14,780	9	8	8,50
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	557	809	50	11,140	16,180	6	9	7,50
4	Kecamatan Balikpapan Kota	595	947	53	11,226	17,868	6	10	8,00
5	Kecamatan Balikpapan Timur	444	977	55	8,073	17,764	9	10	9,50
6	Kecamatan Balikpapan Utara	407	890	50	8,140	17,800	9	10	9,50
Rata-rata Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13) OPD Non-ZI									8,33

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.73**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD ZI Dinas Perhubungan sebesar **10,00**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD ZI Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT); dan Kecamatan Balikpapan Selatan sebesar **5,50**.

Berdasarkan **tabel 5.74**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD Kecamatan Balikpapan Timur; dan Kecamatan Balikpapan Utara sebesar **9,50**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD Non-ZI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar **7,00**.

Hal ini tergambar pada **tabel 5.41** (alasan tidak melapor jika tidak terjadi kesesuaian) responden yang paling sedikit menjawab

lapor adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. Dan pada **tabel 5.42** (Kemungkinan Membayar Suap Jika Terjadi Ketidaksesuaian) responden yang paling banyak menjawab menyuap adalah Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi. Hal ini mengindikasikan dari sisi penerima layanan/masyarakat tidak terbebani adanya ketidaksesuaian.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Integritas Asosiasi Pengusaha (U13), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **8,33** dibandingkan OPD Zona Integritas (ZI) sebesar **8,00**.

14. Indeks Integritas Lokal (U14)

Tabel 5. 75. Indeks Integritas Lokal (U14) OPD ZI

No	Nama OPD ZI	Jml	R	X	Indeks+
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9187	50	183,740	7
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	10074	54	186,556	7
3	Dinas Perhubungan	9835	50	196,700	7
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10130	51	198,627	7
5	Dinas Ketenagakerjaan	9899	50	197,980	7
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	10150	52	195,192	7
7	Kecamatan Balikpapan Barat	9723	52	186,981	7
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	12402	56	221,464	9
9	RSIA Sayang Ibu	11035	50	220,700	9
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	7788	42	185,429	7
Rata-rata Indek Integritas Lokal (U14) OPD ZI					7,40

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Tabel 5. 76. Indeks Integritas Lokal (U14) OPD Non-ZI

No	Nama OPD Non-ZI	Jml	R	X	Indeks+
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9585	51	187,941	7
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	10369	50	207,380	8
3	Kecamatan Balikpapan Tengah	9643	50	192,860	7
4	Kecamatan Balikpapan Kota	10619	53	200,358	8
5	Kecamatan Balikpapan Timur	10934	55	198,800	7
6	Kecamatan Balikpapan Utara	8751	50	175,020	7
Rata-rata Indeks Integritas Lokal (U14) OPD Non-ZI					7,33

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan **tabel 5.75**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD ZI RSUD Beriman Kota Balikpapan; dan RSIA Sayang Ibu sebesar **9,00**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD ZI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT); Dinas Perhubungan; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Dinas Ketenagakerjaan; Kecamatan Balikpapan Selatan; Kecamatan Balikpapan Barat; dan SMPN 1 Kota Balikpapan sebesar **7,00**.

Berdasarkan **tabel 5.76**, diketahui bahwa nilai indeks tertinggi pada OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD; dan Kecamatan Balikpapan Kota sebesar **8,00**, sedangkan nilai indeks terendah pada OPD Non-ZI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Timur; dan Kecamatan Balikpapan Utara sebesar **7,00**.

Hal ini tergambar pada **tabel 5.43** (Tabel 5.43. Sistem Integritas Lokal Pentingnya Pilar) responden yang paling sedikit menjawab tidak penting, dan sangat tidak penting adalah Partai

Politik. Pada **tabel 5.44** (Sistem Integritas Lokal Peran Pilar Saat Ini) responden yang paling banyak menjawab tidak baik, dan sangat tidak baik adalah Partai Politik. Pada **tabel 5.45** (Sistem Integritas Lokal Kualitas Tata Kelola) responden yang paling banyak menjawab tidak baik, dan sangat tidak baik adalah Partai Politik. Pada **tabel 5.46** (Sistem Integritas Lokal Kapasitas Lokal) responden yang paling banyak menjawab tidak baik, dan sangat tidak baik adalah Partai Politik. Hal ini mengindikasikan dari sisi penerima layanan/masyarakat tidak terbebani adanya ketidaksesuaian.

Namun secara perbandingan keseluruhan dalam point Indeks Integritas Lokal (U14), lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI) yang mencapai nilai indeks sebesar **7,40** dibandingkan OPD Non Zona Integritas (Non ZI) sebesar **7,33**.

15. Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan 2021

Tabel 5. 77. Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan 2021

N O	INDIKATOR /UNSUR		IPK Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Literasi Korupsi	U1	5,00	6,32	6,00	7,00	10,00
2	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	U2	6,00				6,88
3	Daya Saing Lokal	U3	7,00	7,66	7	7,00	7,25
4	Penghambat Kemudahan Berusaha	U4	6,00	7,52	8	8,00	6,56
5	Potensi korupsi	U5	5,00	7,33	4,73	6,93	6,94
6	Penilaian Integritas Bisnis	U6	7,00	7,01	6,83	7,80	6,88
7	Risiko Suap	U7	6,00	6,57	7	7,00	9,50
8	Integritas Layanan Kota	U8	8,00	6,06	7	7,00	7,44
9	Integritas Layanan Provinsi	U9	7,00		8	6,00	6,91
10	Integritas Layanan vertikal daerah	U10	7,00		7	6,00	5,47
11	Integritas layanan Pusat	U11	7,00		7	7,00	5,22
12	Integritas Layanan BUMN/BUMD	U12	8,00	6,47	7	7,00	5,50
13	Integritas Asosiasi Pengusaha	U13	6,00	7,02	7	6,00	8,13
14	Sistem integritas Lokal	U14	8,00	6,75	7	7,25	7,38
Jumlah			93,00	68,71	89,56	89,98	100,03
Realisasi IPK Kota Balikpapan (Rata-Rata)			6,64	6,87	6,89	6,38	7,15
Target IPK Kota Balikpapan			6,62	6,70	6,75	6,80	6,90

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Tabel 5. 78. IPK OPD Zona Integritas Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		IPK Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		6,83	6,85	6,86	7,10
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)	2		6,92	6,94	6,93	6,93
3	Dinas Perhubungan	3		7,02	7,01	7,08	7,54
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4		6,52	7,09	7,28	7,00
5	Dinas Ketenagakerjaan	5		6,72	6,73	6,69	6,92
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	6		6,97	6,87	6,82	6,92
7	Kecamatan Balikpapan Barat	7		6,82	6,79	6,73	7,31
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	8		6,84	6,93	6,91	7,50
9	RSIA Sayang Ibu	9		6,85	6,95	6,93	8,01
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	10		7,02	7,02	6,99	6,56
Realisasi IPK Kota Balikpapan (Rata-Rata)			6,64	6,85	6,92	6,92	7,18

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Tabel 5.79. IPK OPD Zona Non Integritas Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)		IPK Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
11	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD-RD)	11					7,14
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12					7,20
13	Kecamatan Balikpapan Tengah	13					6,93
14	Kecamatan Balikpapan Kota	14					6,90
15	Kecamatan Balikpapan Timur	15					7,21
16	Kecamatan Balikpapan Utara	16					7,15
Realisasi IPK Kota Balikpapan (Rata-Rata)							7,09

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Berdasarkan tabel 5.78, bahwa Nilai IPK 2021 tertinggi pada OPD ZI RSIA Sayang Ibu sebesar **8,01** mengalami kenaikan **1,08** poin jika dibandingkan dengan nilai IPK OPD ZI yang sama pada tahun 2020 sebesar **6,93**, sedangkan nilai IPK 2021 terendah pada OPD ZI SMPN 1 Kota Balikpapan sebesar **6,56** mengalami penurunan **0,43** poin jika dibandingkan dengan nilai IPK OPD ZI yang sama pada tahun 2020 sebesar **6,99**.

Jika nilai IPK tahun 2021 jika dibandingkan dengan IPK Kota Balikpapan tahun 2020 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas (OPD ZI) yang mengalami **kenaikan** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar **0,24** poin; Dinas Perhubungan sebesar **0,46** poin; Dinas Ketenagakerjaan sebesar **0,23** poin; Kecamatan Balikpapan Selatan sebesar **0,10** poin;

Kecamatan Balikpapan Barat sebesar **0,58** poin; RSUD Beriman Kota Balikpapan sebesar **0,59** poin; dan RSIA Sayang Ibu mengalami kenaikan **1,08** poin.

Jika nilai IPK tahun 2021 jika dibandingkan dengan IPK Kota Balikpapan tahun 2020 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas (OPD ZI) yang **tidak** mengalami kenaikan (*stagnan*) adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) sebesar **0,00** poin.

Jika nilai IPK tahun 2021 jika dibandingkan dengan IPK Kota Balikpapan tahun 2020 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas (OPD ZI) yang mengalami **penurunan** adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar **0,28** poin (IPK tahun 2020 sebesar **7,28** sedangkan IPK tahun 2021 menjadi sebesar **7,00**); dan SMPN 1 Kota Balikpapan sebesar **0,43** poin (IPK tahun 2020 sebesar **6,99** sedangkan IPK tahun 2021 menjadi sebesar **6,56**).

Namun realisasi IPK Kota Balikpapan tahun 2021 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas (OPD ZI) sebesar **7,18** mengalami kenaikan sebesar **2,55** poin jika dibandingkan dengan IPK Kota Balikpapan tahun 2020, dan hal ini lebih besar dari target IPK Kota Balikpapan tahun 2021 sebesar **6,90**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, respon masyarakat pada tingkat pelayanan terhadap Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021 di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Zona Integritas (OPD ZI) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tingkat pelayanan terhadap Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020, sehingga kedepannya dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan.

15. ANALISA INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA 10 OPD ZI

MATRIK IPK KOTA BALIKPAPAN 2021			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	Jumlah	Rata-rata IPK 2021 (OPD)
NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	Responden	Literasi Korupsi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	Daya Saing Lokal	Penghambat Kemudahan Berusaha	Potensi korupsi	Penilaian Integritas Bisnis	Risiko Suap	Integritas Layanan Kota	Integritas Layanan Provinsi	Integritas Layanan vertikal daerah	Integritas layanan Pusat	Integritas Layanan BUM/BUMD	Integritas Asosiasi Pengusaha	Sistem integritas Lokal		
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	10,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,83	8,00	7,50	6,00	8,00	5,00	5,00	10,00	7,00	99,33	7,10
2	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPPT)	54	10,00	7,00	7,00	6,00	7,00	7,50	10,00	6,50	5,00	5,50	7,50	5,50	5,50	7,00	97,00	6,93
3	Dinas Perhubungan	50	10,00	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00	10,00	9,00	7,00	8,00	4,50	6,00	10,00	7,00	105,50	7,54
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	51	10,00	7,00	7,00	6,00	6,00	7,00	9,00	7,50	6,50	6,50	5,00	5,00	8,50	7,00	98,00	7,00
5	Dinas Ketenagakerjaan	50	10,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,33	9,00	6,00	7,00	6,00	7,00	5,50	7,00	7,00	96,83	6,92
6	Kecamatan Balikpapan Selatan	52	10,00	7,00	8,00	7,00	7,00	6,83	10,00	6,00	6,00	5,00	6,00	5,50	5,50	7,00	96,83	6,92
7	Kecamatan Balikpapan Barat	52	10,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,83	10,00	10,00	8,50	4,50	6,00	5,00	8,50	7,00	102,33	7,31
8	RSUD Beriman Kota Balikpapan	56	10,00	7,00	7,00	6,00	7,00	7,50	10,00	8,50	8,50	5,00	5,00	5,50	9,00	9,00	105,00	7,50
9	RSIA Sayang Ibu	50	10,00	7,00	8,00	8,00	10,00	8,67	10,00	8,50	8,50	5,00	5,00	5,50	9,00	9,00	112,17	8,01
10	SMPN 1 Kota Balikpapan	42	10,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,33	9,00	6,50	6,00	4,50	4,00	5,50	7,00	7,00	91,83	6,56
IPK Kota Balikpapan (OPD ZI)			10,00	6,90	7,10	6,40	6,80	7,18	9,50	7,60	6,90	5,80	5,50	5,40	8,00	7,40	100,48	7,18

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 sebesar 6,83 tahun 2019 sebesar 6,85 mengalami penurunan sebesar **-0,02** sedangkan tahun 2020 sebesar 6,86 mengalami kenaikan sebesar 0,01 sedangkan tahun 2021 sebesar 7,10 mengalami kenaikan sebesar **0,24**. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas

Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar **0,24** dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami kenaikan seperti pada unsur *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14)*.

Kenaikkan ini sebisa mungkin untuk dipertahankan, jika memungkinkan untuk ditingkatkan lagi, penyebab kenaikan indeks persepsi korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa ada beberapa unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengantisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14)*, sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah

Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12), sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) pada tahun 2018 sebesar 6,92 tahun 2019 sebesar 6,94 mengalami penurunan sebesar **-0,02** sedangkan tahun 2020 sebesar 6,93 mengalami penurunan sebesar **-0,01** sedangkan tahun 2021 sebesar 6,93 mengalami **stagnan (tidak ada perubahan) sebesar 0**. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami Stagnan (tidak ada perubahan) tahun 2021 sebesar 0 dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami stagnan (tidak ada perubahan) seperti pada unsur *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap*

(U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14).

Stagnan (tidak ada perubahan) ini sebisa mungkin untuk di pertahankan, jika memungkinkan untuk ditingkatkan lagi, penyebab Stagnan (tidak ada perubahan) pada indeks persepsi korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) bahwa ada beberapa unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengatisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas layanan Pusat (U11); dan Sistem integritas Lokal (U14).* Sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Daya Saing Lokal (U3); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); dan Integritas Asosiasi Pengusaha (U13),* sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

3. Dinas Perhubungan

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada Dinas Perhubungan pada tahun 2018 sebesar 7,02 tahun 2019 sebesar 7,01 mengalami kenaikan sebesar 0,01 sedangkan tahun 2020 sebesar 7,08 mengalami kenaikan sebesar 0,07 sedangkan tahun 2021 sebesar 7,54 mengalami kenaikan sebesar 0,46. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap Dinas Perhubungan dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14) mengalami kenaikan ditahun 2021 sebesar 0,46 dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami kenaikan seperti pada unsur *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14).*

Kenaikkan ini sebisa mungkin untuk di pertahankan, jika memungkinkan untuk ditingkatkan lagi penyebab kenaikan indeks persepsi korupsi pada Dinas Perhubungan bahwa ada beberapa unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih

baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengantisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14)*, sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Potensi korupsi (U5); Integritas layanan Pusat (U11); dan Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12)*, sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2018 sebesar 6,52 tahun 2019 sebesar 7,09 mengalami penurunan sebesar **-0,57** sedangkan tahun 2020 sebesar 7,28 mengalami kenaikan sebesar 0,19 sedangkan tahun 2021 sebesar 7,00 mengalami penurunan sebesar **-0,28**. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan

Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami penurunan tahun 2021 sebesar **-0,28** dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami penurunan seperti pada unsur *Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12)*.

Penurunan ini sebisa mungkin untuk ditingkatkan lagi penyebab penurunan indeks persepsi korupsi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah bahwa ada beberapa unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengatisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14)*, sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Penghambat*

Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12), sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

5. Dinas Ketenagakerjaan

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2018 sebesar 6,72 tahun 2019 sebesar 6,73 mengalami penurunan sebesar **-0,01** sedangkan tahun 2020 sebesar 6,69 mengalami penurunan sebesar **-0,04** sedangkan tahun 2021 sebesar 6,92 mengalami kenaikan sebesar 0,23. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0,23 dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami kenaikan seperti pada unsur *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Risiko Suap (U7); dan Sistem integritas Lokal (U14).*

Kenaikkan ini sebisa mungkin untuk di pertahankan, jika memungkinkan untuk ditingkatkan lagi penyebab kenaikan indeks persepsi korupsi pada Dinas Ketenagakerjaan bahwa beberapa

unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengantisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Risiko Suap (U7); dan Sistem integritas Lokal (U14)*, sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); dan Integritas Asosiasi Pengusaha (U13)*, sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

6. Kecamatan Balikpapan Selatan

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2018 sebesar 6,97 tahun 2019 sebesar 6,87 mengalami kenaikan sebesar 0,1 sedangkan tahun 2020 sebesar 6,82 mengalami penurunan sebesar **-0,05** sedangkan tahun 2021 sebesar 6,92 mengalami kenaikan sebesar 0,1. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap Kecamatan Balikpapan Selatan dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2);

Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0,1 dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami kenaikan seperti pada unsur *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Risiko Suap (U7); dan Sistem integritas Lokal (U14).*

Kenaikkan ini sebisa mungkin untuk di pertahankan, jika memungkinkan untuk ditingkatkan lagi, penyebab kenaikan indeks persepsi korupsi pada Kecamatan Balikpapan Selatan bahwa beberapa unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengantisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Risiko Suap (U7); dan Sistem integritas Lokal (U14)*, sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek

korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Penilaian Integritas Bisnis (U6); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); dan Integritas Asosiasi Pengusaha (U13)*, sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

7. Kecamatan Balikpapan Barat

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada Kecamatan Balikpapan Barat pada tahun 2018 sebesar 6,82 tahun 2019 sebesar 6,79 mengalami kenaikan sebesar 0,03 sedangkan tahun 2020 sebesar 6,73 mengalami penurunan sebesar **-0,06** sedangkan tahun 2021 sebesar 7,31 mengalami kenaikan sebesar 0,58. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap Kecamatan Balikpapan Barat dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar **0,58** dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami kenaikan seperti pada unsur *Literasi Korupsi (U1); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas*

Layanan Provinsi (U9); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14).

Kenaikkan ini sebisa mungkin untuk di pertahankan, jika memungkinkan untuk ditingkatkan lagi penyebab kenaikan indeks persepsi korupsi pada Kecamatan Balikpapan Barat bahwa ada beberapa unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengantisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14)*, sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); dan Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12)*, sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

8. RSUD Beriman Kota Balikpapan

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada RSUD Beriman Kota Balikpapan pada tahun 2018 sebesar 6,84 tahun

2019 sebesar 6,93 mengalami penurunan sebesar -0,09 sedangkan tahun 2020 sebesar 6,91 mengalami penurunan sebesar -0,02 sedangkan tahun 2021 sebesar 7,5 mengalami kenaikan sebesar 0,59. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap RSUD Beriman Kota Balikpapan dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar **0,59** dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami kenaikan seperti pada unsur *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14).*

Kenaikkan ini sebisa mungkin untuk di pertahankan, jika memungkinkan untuk ditingkatkan lagi penyebab kenaikan indeks persepsi korupsi pada RSUD Beriman Kota Balikpapan bahwa ada beberapa unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengantisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14)*, sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); dan Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12)*, sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

9. RSIA Sayang Ibu

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada RSIA Sayang Ibu pada tahun 2018 sebesar 6,85 tahun 2019 sebesar 6,95 mengalami penurunan sebesar **-0,10** sedangkan tahun 2020 sebesar 6,93 mengalami penurunan sebesar **-0,02** sedangkan tahun 2021 sebesar 8,01 mengalami kenaikan sebesar 1,08. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap RSIA Sayang Ibu dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas

Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar **1,08** dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami kenaikan seperti pada unsur *Literasi Korupsi (U1)*; *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2)*; *Daya Saing Lokal (U3)*; *Penghambat Kemudahan Berusaha (U4)*; *Potensi korupsi (U5)*; *Penilaian Integritas Bisnis (U6)*; *Risiko Suap (U7)*; *Integritas Asosiasi Pengusaha (U13)*; dan *Sistem integritas Lokal (U14)*.

Kenaikkan ini sebisa mungkin untuk di pertahankan, jika memungkinkan untuk ditingkatkan lagi penyebab kenaikan indeks persepsi korupsi pada RSIA Sayang Ibu bahwa semua unsur (indikator) layanan sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengatisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1)*; *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2)*; *Daya Saing Lokal (U3)*; *Penghambat Kemudahan Berusaha (U4)*; *Potensi korupsi (U5)*; *Penilaian Integritas Bisnis (U6)*; *Risiko Suap (U7)*; *Integritas Asosiasi Pengusaha (U13)*; dan *Sistem integritas Lokal (U14)*, sedangkan unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Integritas Layanan vertikal daerah (U10)*; *Integritas layanan Pusat (U11)*; dan *Integritas Layanan*

BUMN/BUMD (U12), sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

10. SMPN 1 Kota Balikpapan

Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) OPD ZI pada SMPN 1 Kota Balikpapan pada tahun 2018 sebesar 7,02 tahun 2019 sebesar 7,02 mengalami stagnan (tidak ada perubahan) sebesar 0 sedangkan tahun 2020 sebesar 6,99 mengalami penurunan sebesar **-0,03** sedangkan tahun 2021 sebesar 6,56 mengalami penurunan sebesar **-0,43**. Hal ini berarti bahwa penilaian Persepsi Korupsi Masyarakat terhadap SMPN 1 Kota Balikpapan dari 14 unsur, yaitu Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Penghambat Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Risiko Suap (U7); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14), mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar **-0,43** dipengaruhi pada beberapa unsur (indikator) yang mengalami penurunan seperti pada unsur Penghambat *Kemudahan Berusaha (U4)*; *Potensi korupsi (U5)*; *Penilaian Integritas Bisnis (U6)*; *Integritas Layanan Kota (U8)*; *Integritas Layanan Provinsi (U9)*; *Integritas Layanan vertikal daerah (U10)*; *Integritas layanan Pusat (U11)*; dan *Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12)*.

Penurunan ini sebisa mungkin untuk ditingkatkan lagi penyebab penurunan indeks persepsi korupsi pada SMPN 1 Kota Balikpapan bahwa ada beberapa unsur (indikator) layanan sudah

mengalami perubahan yang lebih baik, dalam proses pelayanan sehingga dapat mengatisipasi masyarakat pada indikasi-indikasi atau mencegah masyarakat pada peluang-peluang terjadinya tindak korupsi dalam proses pelayanan.

Unsur (indikator) yang perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan adalah *Literasi Korupsi (U1); Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (U2); Daya Saing Lokal (U3); Risiko Suap (U7); Integritas Asosiasi Pengusaha (U13); dan Sistem integritas Lokal (U14)*, unsur (indikator) yang mengalami penurunan (pelemahan) dan perlu lebih ditingkatkan agar lebih optimal dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi baik itu indikasi dari masyarakat maupun OPD itu sendiri, adalah *Kemudahan Berusaha (U4); Potensi korupsi (U5); Penilaian Integritas Bisnis (U6); Integritas Layanan Kota (U8); Integritas Layanan Provinsi (U9); Integritas Layanan vertikal daerah (U10); Integritas layanan Pusat (U11); dan Integritas Layanan BUMN/BUMD (U12)*, sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tengah masyarakat pada OPD tersebut.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada laporan akhir ini, berdasarkan pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan dari 8 April 2021 sampai 8 Mei 2021. Penggunaan metode pengambilan responden menggunakan *purposive sampling* yang telah menerima layanan publik sebesar 816 reponden pada periode survei tersebut. Adapun hasil dari survei sebagai berikut:

1. Data indeks persepsi korupsi berdasarkan indikator *Transparency International Indonesia* (TII), pencapaian pemahaman masyarakat tentang indeks persepsi korupsi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Adapun IPK di tahun 2020 mencapai 6.92, namun ditahun 2021 mencapai 7.18. Terjadinya kenaikan sebesar 0,255 ini menunjukkan perubahan dari sistem layanan publik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke arah positif, serta dukungan dari masyarakat secara umum berimplikasi mengalami peningkatan dalam komitmen mewujudkan bersih dari korupsi.
2. Perbandingan antara nilai Indeks Persepsi Korupsi kota Balikpapan antara 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk Zona Integritas (ZI) dan 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum termasuk dalam Zona Integritas (ZI) Kota Balikpapan Tahun 2021. Pencapaian realisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Balikpapan lebih tinggi dengan indeks 7.18 untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI),

sedangkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI) mencapai indeks 7.09. Dengan demikian perbedaan selisih indeks mencapai 0,09, lebih tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Zona Integritas (ZI). Namun pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non Zona Integritas (ZI), menjadi referensi bagi Kota Balikpapan jika meningkatkan jumlah lokasi survei untuk menjadi Zona Integritas.

3. Gambaran/alat ukur yang dapat digunakan untuk menera baseline resiko korupsi yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah Kota di tingkat daerah sesuai indicator sebagai berikut:
 - a) Literasi Korupsi

Sebagai salah satu indikator yang mengalami keberhasilan hingga mencapai 100% , jika responden mendengar adanya undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Serta diperkuat dengan hasil indikator Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) dengan terbukti 62.6% responden telah mengetahuinya. Artinya pengetahuan yang dimiliki oleh responden cukup memadai, untuk perbaikan dan peningkatan dalam mewujudkan kota yang bersih dari korupsi dapat terwujud. Pengetahuan merupakan salah satu pondasi yang berperan penting dalam proses percepatan meningkatkan perbaikan. Keberhasilan tersebut sebagai bukti adanya sinergi antar pemerintah kota dan masyarakat.

b) Daya Saing

Sebagai indikator yang menentukan keunggulan kompetitif suatu daerah dibandingkan daerah lain, telah mengalami peningkatan 0.25. Peningkatan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 7.00, namun di tahun 2021 mencapai 7.25. Adapun perbaikan dari indikator ini telah di buktikan dengan penilaian kualitas kesehatan dan kualitas pengendalian inflasi cukup memadai. Harapannya, pemerintah kota dapat mempertahankan atau ditingkatkan.

c) Penghambat Kemudahan Berusaha

Sebagai indikator penilaian yang ditujukan untuk mengetahui problematik saat menjalankan usaha di suatu daerah, telah mengalami penurunan mencapai sebesar 1.44. Penurunan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 8.00, sedangkan di tahun 2021 mencapai 6.56. Hal ini di karenakan presentase yang cukup tinggi untuk korupsi (pemberian biaya tambahan).

d) Potensi Korupsi

Sebagai indikator dalam menilai efektivitas program antikorupsi di daerah, telah mengalami kenaikan sebanyak 0.01. Peningkatan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 6.93, namun di tahun 2021 mencapai 6.94. Adapun kenaikan dari indikator ini telah dibuktikan dengan presentase responden yang tinggi terkait tanggapan prevalensi dan akuntabilitas. Serta motivasi korupsi dan frekuensi korupsi yang terus di kendalikan, maka dapat meningkatkan indeks melalui penurunan potensi korupsi.

e) Penilaian Integritas Bisnis

Sebagai indikator dalam penilaian terhadap infrastruktur pencegahan korupsi yang telah dikembangkan atau telah diterapkan di daerah, telah mengalami penurunan sebanyak 0.32. Penurunan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 7.80, namun di tahun 2021 mencapai 6.88. Hal ini menunjukkan peran serta keterlibatan pribadi dalam melawan korupsi perlu ditingkatkan.

f) Risiko Suap

Sebagai indikator penilaian terhadap risiko suap berdasarkan lapangan usaha, telah mengalami kenaikan 2.50. Peningkatan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 7.00, namun di tahun 2021 mencapai 9.50. Hal ini menunjukkan risiko suap semakin menurun, dibuktikan dengan hasil dari responden yang memiliki relasi yang cukup tinggi pada lapangan usaha di bidang pertambangan.

6.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi korupsi pada setiap indikator di kota Balikpapan 2021, diperoleh indeks persepsi korupsi yang meningkat. Namun dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat beberapa unsur yang dinilai masyarakat dapat ditingkatkan. Beberapa rekomendasi dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di tahun yang akan datang. Adapun beberapa rekomendasi masing –masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) zona integritas sebagai berikut:

I. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya mengalami kenaikan sebanyak 0,21. Kenaikan ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **6.86**, namun di tahun 2021 menjadi **7.10**. Jika diperhatikan beberapa perubahan dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai zona integritas telah meningkatkan layanan *online*. Implementasi layanan secara *online* yaitu pembuatan KTP, pengurusan KK, dsb. Adapun implikasi tersebut, sebuah strategi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan intensitas waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat/pengguna layanan publik. Artinya reformasi dalam peningkatan layanan publik, dalam mencapai peningkatan *good governance* salah satunya melalui teknologi. Jika teknologi informasi merupakan struktur baru yang lebih sesuai dengan tantangan global dalam mencapai nilai efisien, serta sebagai pengembangan pemerintah yang lebih demokratis (Dwiyanto, 2008: 31). Secara implisit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berorientasi pada nilai independensi menjadi searah dengan mewujudkan *good governance*, karena tidak melihat dari siapa yang dilayani namun lebih cenderung pada *output* yaitu peningkatan layanan.

Sebagai catatan hasil survei data dari responden yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 50 partisipan. Namun untuk mengetahui nilai dari beberapa pertanyaan sesuai di kuisisioner berdasarkan standar *Transparency International Indonesia* (TII) mengalami penilaian yang cukup rendah. Adapun yang menjadi

perhatian rendahnya unsur pertanyaan terkait statement 'faktor penghambat kemudahan berusaha' dengan pencapaian indeks 6, dimana responden yang mewakilinya pada penilaian **sangat buruk** terkait alasan "**pemberian tips/bea tambahan**". Makna dari statement ini berdasarkan wawancara yang mendalam, bahwa beberapa partisipan yang berusia di kisaran 41-65 tahun tidak mampu mengoperasikan *handphone* berteknologi tinggi, namun ada juga beralasan sibuk tidak ada waktu. Sehingga responden tersebut, cenderung memberikan tips/bea tambahan" kepada siapa saja yang bisa mengoperasikan sampai dokumen selesai/tuntas. Artinya langkah pemberian tips merupakan inisiatif di pihak responden/masyarakat, yang diberikan kepada siapa saja yang bisa (pihak ketiga).

Rekomendasi dalam peningkatan indeks melalui statement/pernyataan 'faktor penghambat kemudahan berusaha' dapat dilakukan, dengan penambahan layanan bagi masyarakat berusia kisaran 50 tahun keatas atau yang tidak mampu mengoperasikan *handphone* berteknologi tinggi. Hal ini selain dapat meningkatkan layanan terhadap publik yang kurang dapat mengikuti teknologi, namun dapat juga memperkecil ruang bagi pihak ketiga. Bahkan dapat juga menambahkan peraturan, tidak boleh di wakikan jika memang harus terpaksa datang ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika bagi yang tidak mampu datang secara langsung seorang diri dapat ditemani keluarga/pendamping, dengan catatan bersangkutan wajib ikut. Hal ini dapat berimplikasi responden/masyarakat menjadi enggan untuk memberikan bea

tambahan/tips kepada pihak ketiga. Harapannya hal ini sedikit mengurangi jumlah jawaban responden/masyarakat dengan pertanyaan di kuisisioner terkait 'penghambat kemudahan berusaha' di kota Balikpapan.

Namun pencapaian nilai rendah berdasarkan kuisisioner terkait statement/pernyataan tentang **potensi korupsi** dan **integritas layanan provinsi** mencapai nilai 6, artinya responden/masyarakat memberikan penilaian potensi korupsi di Kota Balikpapan dan penilaian integritas layanan di tingkat provinsi masih rendah. Sehingga meskipun layanan di area Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meningkat, harus diiringi dengan menurunnya **potensi korupsi** di tingkat Kota Balikpapan. Ketika meningkatnya penilaian atas pelayanan di tingkat layanan provinsi secara sinergi dalam mewujudkan indeks persepsi korupsi (IPK) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK) Kota Balikpapan menjadi lebih baik lagi.

II. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya tidak mengalami perubahan atau tetap. Pencapaian penilaian pada tahun 2020 mencapai **6.93**, namun di tahun 2021 pencapaian nilai yang sama yaitu **6.93**. Jika diperhatikan beberapa perubahan dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) sebagai zona integritas telah melakukan transformasi dalam pelayanan berbasis *online*. Kemajuan teknologi informasi menjadi pilihan dalam upaya peningkatan layanan publik secara efektif dan

efisien. Hal ini berimplikasi menurunnya ruang interaksi bertemunya pelanggan/masyarakat dengan pihak terkait secara langsung.

Sebagai catatan hasil survei data dari responden yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMT) sebanyak 54 partisipan. Namun untuk mengetahui nilai dari beberapa pertanyaan sesuai di kuisioner berdasarkan standar *Transparency International Indonesia* (TII) yang mengalami penilaian cukup rendah. Adapun yang menjadi perhatian rendahnya unsur pertanyaan terkait statement 'faktor penghambat kemudahan berusaha' dengan pencapaian skor 6, dimana responden yang mewakilinya pada penilaian sangat buruk terkait alasan "pemberian tips/bea tambahan". Makna dari statement ini berdasarkan wawancara yang mendalam, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMT) sudah bertransformasi menjadi pengurusan Perizinan *Online* (OSS) dengan tujuan efisien waktu. Namun pihak pelanggan/masyarakat masih terkendala dalam memahami prosedur tata cara yang telah di publish diweb, sehingga masih cenderung tingginya pelanggan/masyarakat datang berkunjung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, sehingga berimplikasi adanya ruang bagi pihak ketiga.

Rekomendasi, dalam peningkatan indeks melalui statement/pernyataan 'faktor penghambat kemudahan berusaha' dapat dilakukan, dengan menambahkan *contact person*/WA di masing-masing jenis perizinan. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMT) dapat mengetahui jenis perizinan mana yang intensitasnya paling tinggi disediakan 1 *contact person*, namun yang pengurusan dengan intensitas rendah dapat menyediakan 1

contact person dengan beberapa jenis perizinan. Hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan layanan pelanggan/masyarakat, sehingga mengurangi jumlah pelanggan/masyarakat yang bertatap muka secara konvensional. Selain dari peningkatan layanan dari informasi bagi pelanggan/masyarakat, sebaiknya ditambahkan didalam keterangan SOP di setiap jalur perizinan membutuhkan waktu berapa lama dalam pengurusannya. Harapannya terdapat simulasi dalam pengoperasian sistem layanan perizinan secara jelas dan perlahan-lahan, sebagai tutorial bagi pengguna layanan/masyarakat.

Namun pencapaian nilai yang rendah berdasarkan kuisisioner terkait statement/ Pernyataan tentang **layanan kota** mencapai nilai 5.00, artinya responden/masyarakat memberikan penilaian yang rendah pada layanan kota Balikpapan. Hal ini berdasarkan responden dilapangan jika terjadi ketidaksesuaian, maka responden/masyarakat lebih memilih '**tidak melapor**'. Penilaian yang cukup tinggi pada kuisisioner 'tidak melapor', mengindikasikan keberpihakan masyarakat/responden atas dasar inisiatif secara pribadi untuk tidak mengikuti SOP yang berlaku. Sementara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMT), telah berupaya meningkatkan gerakan anti korupsi dengan adanya *whistleblower system* serta logo yang bertuliskan 'Bersama Kita Tolak Gratifikasi'. Harapannya partisipasi dari responden/masyarakat ikut berkomitmen secara sinergi untuk sama-sama mewujudkan persepsi korupsi yang bersih.

III. Dinas Perhubungan

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya mengalami kenaikan sebanyak 0.46. Kenaikan ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **7.08**, namun di tahun 2021 menjadi **7.54**. Jika diperhatikan beberapa perubahan dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK), Dinas Perhubungan sebagai zona integritas telah meningkatkan layanan *daring*. Implementasi layanan *daring* yang sudah ada seperti layanan pengujian kendaraan bermotor, perubahan yang terjadi pendaftaran secara *online* beserta pembayaran via bank Kaltimtara. Dengan demikian, strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan intensitas waktu untuk berinteraksi dengan pengguna/masyarakat layanan publik. Artinya reformasi dalam peningkatan layanan publik terus ditingkatkan, dalam mewujudkan *good governance* Kota Balikpapan.

Sebagai catatan dari hasil survei data dari responden yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Perhubungan sebanyak 50 partisipan. Namun untuk mengetahui nilai dari beberapa pertanyaan sesuai kuisisioner berdasarkan standar *Transparency International Indonesia* (TII) yang mengalami nilai cukup rendah. Adapun unsur pertanyaan yang menjadi penyebab penilaian rendah mencapai indeks **6**, yaitu statement/pernyataan berhubungan dengan **potensi korupsi** di Kota Balikpapan. Makna dari statement/pernyataan ini, merupakan penilaian terhadap beberapa faktor (prevalensi, mekanisme akuntabilitas keuangan Negara, motivasi korupsi, frekuensi korupsi dan upaya pemberantasan korupsi) di tingkat Kota Balikpapan. Hasil dari wawancara dari

pendalaman kuisisioner, bahwa “frekuensi korupsi” penilaian dari responden yang menjawab “sangat sering” di layanan perijinan. Namun di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menyampaikan dari sisi biaya di web secara akuntabilitas, maka yang lebih ditingkatkan adalah memperkecil ruang pihak ketiga.

Rekomendasi, dalam peningkatan indeks di unsur **potensi korupsi** di Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan dapat menambahkan logo-logo “Bersama Kita Tolak Gratifikasi” di web terkait atau tercantum tampilan di *link registration*. Bahkan dapat menambahkan di tampilan *web*, tata cara *registration* dan tata cara pengurusan layanan di Dinas Perhubungan menggunakan gambar/*flow chart* yang mudah di pahami. Serta menambahkan *contact person* sesuai layanan, untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan/masyarakat yang bertujuan memperkecil ruang atau waktu interaksi secara konvensional. Harapannya hal ini mampu mengurangi jumlah jawaban ‘sangat sering’ dari responden/masyarakat di area survei Dinas Perhubungan yang berdampak adanya peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK) di Kota Balikpapan.

Namun pencapaian nilai rendah kuisisioner berikutnya terkait dengan statement/ Pernyataan tentang penyedia **layanan publik pusat** mencapai nilai 4.50, artinya responden/masyarakat memberikan penilaian layanan publik pusat masih rendah. Sehingga meskipun layanan di area Dinas Perhubungan di Kota Balikpapan mengalami peningkatan, harusnya diiringi dengan meningkatnya layanan publik di tingkat pusat. Adapun temuan dilapangan berdasarkan potensi kejadian suap, yang paling tinggi pada jawaban

“tidak melapor” adalah layanan publik pusat di instansi kepolisian. Sementara alasan dari responden/masyarakat memilih ‘tidak melapor’ , paling banyak memilih alasan “tidak merubah apapun”. Hal ini sebagai temuan yang dapat disikapi melalui peningkatan sosialisasi dimasyarakat, untuk terus berupaya ikut berpartisipasi menurunkan potensi kejadian suap. Dengan demikian adanya peningkatan layanan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bersinergi dengan peningkatan layanan publik di tingkat pusat, maka secara implisit dapat terakumulasi dalam peningkatan layanan publik di kota Balikpapan.

IV. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya mengalami penurunan sebanyak **0.28**. Penurunan nilai ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **7.28**, namun di tahun 2021 menjadi **7.00**. Jika diperhatikan penyelenggaraan dalam meningkatkan layanan literasi bagi warga Kota Balikpapan, berdasarkan dari sisi akuntabilitas layanan telah di sampaikan bahwa pelayanan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya. Artinya hal yang dilakukan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai zona integritas, merupakan layanan yang searah dengan perwujudan dari sisi *good governance*. Namun pada pelaksanaan indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2021, telah diperoleh penilaian yang berbanding terbalik atau mengalami penurunan. Oleh karenanya dibutuhkan eksplorasi yang mendalam, untuk mengetahui implikasi dari menurunnya penilaian di tahun ini.

Sebagai catatan dari hasil survei dari responden yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah sebanyak 51 responden. Namun untuk mengetahui nilai dari beberapa pertanyaan sesuai di kuisisioner berdasarkan standar *Transparency International Indonesia* (TII) yang mengalami penilaian cukup rendah. Adapun unsur pertanyaan yang menjadi penyebab penilaian rendah mencapai indeks **6**, yaitu statement/pernyataan yang berhubungan dengan faktor **penghambat kemudahan berusaha** di Kota Balikpapan. Artinya penilaian ini terkait dengan layanan publik di tingkat Kota Balikpapan, bukan layanan publik yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun statement/pernyataan dari responden telah memberikan jawaban yang **sangat buruk** dalam hal kriminalitas yang meningkat di Kota Balikpapan.

Rekomendasi, dalam meningkatkan indeks melalui statement/pernyataan **penghambat kemudahan berusaha** dapat dilakukan melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan lebih meningkatkan dari sisi layanannya yaitu agenda kegiatan. Misalnya meningkatkan koleksi-koleksi baik buku-buku maupun jurnal-jurnal *recomanded* sebagai peningkatan akses infrastuktur dari sisi fasilitas *terupdate* edukasi bagi masyarakat. Pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat meningkatkan budaya membaca dengan literatur yang cukup *up date*, dengan mengadakan lomba karya ilmiah yang berorientasi peningkatan cara berfikir yang ilmiah masyarakat dalam membangun di Kota Balikpapan. Sehingga peranan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) di tingkat internal yang berorientasi kenaikan juga di tingkat Kota Balikpapan.

V. Dinas Ketenagakerjaan

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya mengalami kenaikan sebanyak **0.23**. Kenaikan nilai ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **6.69**, namun di tahun 2021 menjadi **6.92**. Jika diperhatikan perubahan dalam meningkatnya indeks persepsi korupsi (IPK), Dinas Ketenagakerjaan sebagai zona terintegritas telah meningkatkan dari layanan informasi berbasis teknologi. Adapun implikasi tersebut, sebagai strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan intensitas waktu berinteraksi dengan masyarakat/pengguna layanan publik. Secara implisit Dinas Ketenagakerjaan berorientasi pada nilai independensi menjadi searah dengan mewujudkan *good governance*, karena tidak melihat dari siapa yang dilayani namun lebih cenderung pada *output* yaitu peningkatan layanan.

Sebagai catatan hasil survey data dari responden yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 50 responden. Namun untuk mengetahui nilai dari beberapa pertanyaan sesuai di kuisioner berdasarkan standar *Transparency International Indonesia* (TII) yang mengalami penilaian cukup rendah. Adapun yang menjadi perhatian rendahnya unsur pertanyaan terkait statement “faktor penghambat kemudahan berusaha” dengan pencapaian indeks 6, dimana responden yang mewakilinya pada penilaian sangat buruk terkait alasan “pemberian tips/bea tambahan” dan “kriminalitas” di wilayah Kota Balikpapan. Makna dari statement ini berdasarkan wawancara yang mendalam, bahwa responden memahami adanya transformasi Dinas

Ketenagakerjaan beralih ke layanan *daring* dengan tujuan layanan prima. Namun pihak pelanggan/masyarakat masih terkendala dengan budaya tidak puas, jika tidak bertemu langsung dengan layanan publik di Dinas Ketenagakerjaan, untuk menyampaikan kendala/permasalahan yang dirasa merugikan di lingkungan tempat bekerja pelanggan/masyarakat tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada, meningkatnya intensitas pertemuan secara langsung serta mempersulit mengimplementasikan nilai independen. Bahkan dapat berdampak pada meingkatnya ruang adanya pihak ketiga.

Rekomendasi, dalam peningkatan indeks melalui statement/pernyataan 'faktor penghambat kemudahan berusaha' dapat dilakukan dengan pengaduan secara *online (google form)*, namun semua pengaduan harapannya ditampilkan secara lengkap. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti apa ketidakadilan yang disampaikan. Harapannya dari masyarakat yang lain dapat digunakan sebagai referensi, dari sisi manajemen perusahaan juga dapat digunakan sebagai kontrol dalam menjalankan kebijakan perusahaan. Sehingga dalam jangka panjang akan terjadi perbaikan dalam pola bekerjasama baik dari sisi pekerja/masyarakat dengan pihak manajemen perusahaan/pemberi kerja. Terjadinya kerjasama dengan *win-win solution* tersebut, berdampak pada menurunnya penilaian sangat buruk dari masyarakat sehingga meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) di Dinas Ketenagakerjaan hingga indeks persepsi korupsi (IPK) di tingkat Kota Balikpapan.

VI. Kecamatan Balikpapan Selatan

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya mengalami kenaikan sebanyak **0.10**. Kenaikan nilai ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **6.82**, namun di tahun 2021 menjadi **6.92**. Jika menurut pengamatan dalam peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK) di Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai zona integritas telah berupaya dalam peningkatan sistem pelayanan publik, yaitu adanya informasi yang sangat membantu bagi masyarakat di webnya sipp.menpan.go.id. Adapun informasi baik berupa jenis layanan, persyaratan dokumen, waktu penyelesaiannya sampai informasi tidak adanya pemungutan biaya. Hal ini merupakan strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, dalam rangka mengurangi intensitas waktu bagi pelanggan/masyarakat untuk bertinteraksi langsung saat pengurusan dokumen. Artinya efektivitas dan efisiensi waktu sebagai cara dalam peningkatan *good governance*.

Sebagai catatan hasil survei data dari responden yang mewakili di Kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 52 responden. Namun untuk mengetahui nilai dari beberapa pertanyaan sesuai di kuisisioner berdasarkan standar *Transparency International Indonesia* (TII) yang mengalami penilaian cukup rendah. Diantaranya yang menjadi perhatian rendahnya unsur pertanyaan terkait statement “layanan kota” dengan pencapaian indeks 6.00, dimana responden yang mewakilinya pada penilaian ketika terjadi ketidaksesuaian dengan jawaban ‘**tidak melapor**’ cukup tinggi dibandingkan yang menjawab ‘**lapor**’. Bahkan alasan tidak melapor dari pihak responden paling banyak menjawab dengan alasan tidak tahu kemana harus

melapor (No.1) . Temuan atas jawaban di lapangan dengan wawancara mendalam, dapat di rumuskan ada 2 pandangan yaitu pihak responden/masyarakat tidak membuka/mengetahui di web Kecamatan Balikpapan Selatan jika sudah tersedia menu yang berlogo 'LAPOR' dan ada juga pihak responden/masyarakat tidak melakukan pengurusan dokumen secara mandiri tetapi dapat melalui perwakilan keluarga lainnya atau pihak ketiga dikarenakan kondisi kesibukkan pekerjaan.

Rekomendasi, dalam peningkatan indeks melalui *statement/ Pernyataan* '**tidak melapor**' di pihak Kecamatan Balikpapan Selatan dapat melakukan penambahan waktu untuk sosialisasi di masyarakat. Bahkan dalam proses pengurusan semua jenis layanan diwajibkan mengisi *form* di layanan *web* Kecamatan Balikpapan Selatan. Dengan demikian secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman/penggunaan layanan *online* yang diberikan kecamatan Balikpapan Selatan. Serta sebagai tambahan, harapannya di web balikpapan.selatan.go.id terintegrasi atau informasinya sama dengan di sipp.menpan.go.id. Sehingga menghindari adanya asimetri informasi layanan informasi

Hal ini akan berimplikasi pada perubahan persepsi masyarakat, ketika menilai tentang persepsi indeks korupsi (IPK) yang akan datang telah mengubah keputusan masyarakat menjadi "**Lapor**". Perbaikan yang dilakukan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, dapat berdampak pada peningkatan pencapaian indeks persepsi korupsi (IPK) di tingkat Kota Balikpapan.

VII. Kecamatan Balikpapan Barat

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya mengalami penurunan sebanyak **0.42**. Menurunnya nilai ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **6.73**, namun di tahun 2021 menjadi **6.31**. Jika diperhatikan upaya dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK), Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai zona integritas telah memberikan informasi terkait layanan yang di berikan di web Balikpapanbarat.go.id. Artinya peningkatan layanan dari informasi, untuk mengurangi responden/masyarakat datang secara langsung dalam pengurusan dokumen.

Sebagai catatan hasil survey data dari responden yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kecamatan Balikpapan Barat sebanyak 52 responden. Namun untuk mengetahui nilai dari beberapa pertanyaan sesuai kuisisioner berdasarkan standar *Transparency International Indonesia* (TII) yang mengalami penilaian cukup rendah. Adapun yang menjadi perhatian rendahnya unsur pertanyaan terkait statement "daya saing" dengan pencapaian indeks 6.00, dimana responden yang mewakilinya pada penilaian sangat buruk terkait dengan bidang 'ketersediaan lapangan pekerjaan" di Kota Balikpapan. Makna dari statement ini berdasarkan wawancara yang mendalam, bahwa kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di nilai oleh masyarakat masih kurang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan kurang memadai.

Rekomendasi, dalam meningkatkan indeks melalui statement/ Pernyataan 'daya saing' dengan menurunkan penilaian

kategori sangat buruk dari masyarakat. Adapun upaya untuk meningkatkan penilain indeks, Kecamatan Balikpapan Barat dapat meningkatkan dengan peningkatan baik dari sisi sistem informasi secara online serta layanan publik yang efisien. Jika dalam pengurusan dokumen dari layanan di tingkat Kecamatan Balikpapan Barat, harapannya terdapat form pengisi secara online. Hal ini bertujuan dapat diketahui tingkat pengunjung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Kemudian adanya informasi secara detail terkait informasi persyaratan dokumen yang harus disiapkan, masa waktu penyelesaian serta informasi biaya yang semuanya itu merupakan bagian dari layanan publik secara akuntabilitas. Keterkaitan antara peningkatan dari layanan public yang diberikan oleh Kecamatan Balikpapan Barat, maka secara tidak langsung meningkatkan kinerja masyarakat yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan. Hal ini dikarenakan, dengan layanan publik yang efektif dan efisien terhadap waktu, maka menurunkan kinerja karyawan untuk melakukan ijin ditempat kerjanya. Sehingga berimplikasi pada penurunan kejadian PHK, yang disebabkan menurunnya kedisiplinan masyarakat di Kota Balikpapan. Dengan demikian, dapat menurunkan penilaian sangat buruk dalam bidang ketersediaan lapangan kerja karena tidak menambah jumlah pencari kerja. Hal ini akan berimplikasi pada meningkatnya indeks di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Kecamatan Balikpapan Barat, serta mengarah pada peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK) di tingkat Kota Balikpapan.

VIII. RSUD Beriman Kota Balikpapan

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya mengalami kenaikan sebanyak **0.59**. Kenaikan nilai ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **6.91**, namun di tahun 2021 menjadi **7.50**. Jika diperhatikan terdapat upaya dalam peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK), yaitu peningkatan layanan sistem informasi di RSUD Beriman Balikpapan sebagai zona integritas cukup jelas dan *up date*. Seperti yang kita ketahui, bahwa di tampilan sistem informasi sudah terdapat nilai-nilai gerakan anti korupsi baik berupa logo ataupun kata-kata, serta terdapat layanan *whistleblowing system*. Adapun implikasi tersebut, sebagai strategi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan intensitas pasien/masyarakat berkunjung secara manual dengan hanya bertanya/mencari informasi yang dibutuhkan. Artinya peningkatan layanan publik, searah dengan peningkatan dalam *good governance*. Jika diperhatikan melalui sistem layanan informasi www.rsud.balikpapan.go.id, terdapat pengembangan pendaftaran pasien secara *online*, dilengkapi nama-nama dokter yang hadir di RSUD Beriman Balikpapan, serta jumlah kuota yang *up date* dari pasien yang daftar hingga batasan kuotanya. Dimasa pandemi ini, informasi kuota menjadi informasi yang sangat dibutuhkan atau sangat membantu dalam efisiensi waktu bagi pasien/masyarakat.

Sebagai catatan hasil survei data dari responden yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari RSUD Beriman Balikpapan sebanyak 56 responden. Namun untuk mengetahui nilai dari beberapa pertanyaan sesuai di kuisisioner berdasarkan standar *Tranparency International Indonesia (TII)* mengalami penilaian yang

cukup rendah. Adapun yang menjadi perhatian rendahnya unsur pertanyaan terkait statement 'daya saing' dengan pencapaian indeks 6.00, dimana responden yang mewakilinya pada penilaian **sangat buruk** terkait di bidang 'ketersediaan lapangan pekerjaan' di Kota Balikpapan cukup tinggi. Makna dari statement ini berdasarkan wawancara yang mendalam, bahwa beberapa responden memberikan penilaian sangat buruk terkait kemampuan Kota Balikpapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam hal ketersediaan lapangan kerja yang kurang memadai.

Rekomendasi, dalam peningkatan indeks melalui statement/pernyataan "daya saing" dapat dilakukan dari peran serta pihak RSUD Beriman Balikpapan dengan terus meningkatkan sistem pelayanan yang efisien dan efektif dalam memberikan layanan publik. Dengan demikian, calon pasien/masyarakat dapat tetap menjaga kesehatan untuk berobat/periksa tanpa membutuhkan waktu lama hingga berdampak pada peningkatan ijin bagi masyarakat yang terkategori karyawan perusahaan. Sehingga secara tidak langsung RSUD Beriman Balikpapan dapat meningkatkan kinerja masyarakat khususnya karyawan, hingga berimplikasi pada penurunan terjadinya PHK dikarenakan kinerja sumber daya manusia yang kurang disiplin. Dengan demikian, dapat menurunkan jumlah pencari kerja di Kota Balikpapan yang berdampak menurunkan jawaban sangat buruk pada penilaian daya saing Kota Balikpapan. Hal ini akan berorientasi pada kenaikan indeks persepsi korupsi (IPK) di pihak RSUD Beriman Balikpapan, serta berdampak pada kenaikan indeks persepsi korupsi (IPK) di tingkat Kota Balikpapan.

IX. RSIA Sayang Ibu

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilainya mengalami kenaikan sebanyak **1.08**. Kenaikan nilai ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **6.93**, namun di tahun 2021 menjadi **8.01**. Jika diperhatikan upaya dalam peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK), RSIA Sayang Ibu sebagai zona integritas telah memberikan layanan sistem informasi yang *up date*. Adapun informasi yang di sampaikan melalui web rskbsi.balikpapan.go.id sangat sederhana, lengkap dan mudah dipahami. Adapun implikasi tersebut, sebagai strategi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengedepankan akuntabilitas yang tinggi. Artinya reformasi dalam peningkatan layanan publik dengan informasi yang akuntabilitas, dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju *good governance*. Salah satu informasi tentang Standar Pelayanan Publik milik RSIA Sayang Ibu, ketika informasi ini memang sesuai dilapangan maka nilai akuntabilitas telah terimplementasikan.

Sebagai catatan hasil survei data dari responden yang mewakili RSIA Sayang Ibu sebanyak 50 responden. Namun Pencapaian nilai indeks persepsi korupsi (IPK) ditahun 2021, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) zona terintegritas yang telah mencapai nilai paling tinggi. Sehingga pencapaian indeks oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, dapat digunakan sebagai percontohan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain yaitu nilai akuntabilitasnya. Beberapa pendapat dari wawancara yang mendalam, bahwa RSIA Sayang Ibu cukup fokus pada *core business* yaitu poli kandungan. Hal ini berimplikasi pada pendapat mayoritas

responden mendengar RSIA Sayang Ibu, mindset nya adalah poli kandungan. Namun dilihat dari persepsi korupsi yaitu nilai akuntabilitas informasi, RSIA Sayang Ibu telah memberikan informasi harga yang sangat terjangkau di setiap layanannya. Selain itu, persyaratan pelayanan juga disampaikan dengan sederhana dan mudah dipahami bagi pihak calon pasien/masyarakat. Bahkan terdapat layanan khusus bagi yang tidak puas dengan layanan di tingkat RSIA Sayang Ibu yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berfungsi untuk menyelesaikan jika terjadinya sengketa atas pelayanan informasi.

X. SMPN 1 Kota Balikpapan

Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2021, secara penilaiannya mengalami penurunan sebanyak 0.43. Penurunan ini merupakan perbandingan dari tahun 2020 mencapai **6.99** namun di tahun 2021 menjadi **6.56**. Jika diperhatikan beberapa perubahan dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK), SMPN 1 Kota Balikpapan sebagai zona integritas telah meningkatkan dari sisi pendaftaran peserta/anak didik melalui layanan *online*. Hal ini sebagai langkah implementasi dalam mewujudkan reformasi di sektor publik, dengan meningkatkan tingkat akuntabilitas.

Sebagai catatan hasil survei data dari responden yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari SMPN 1 Kota Balikpapan sebanyak 42 partisipan. Rendahnya jumlah responden/masyarakat yang mewakili, berdampak pada penilaian indeks persepsi korupsi menjadi turun. Adapun jumlah responden rata-rata di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya mencapai 50 responden. Selisih hilangnya hak jawab 8 responden yang mewakili, jika menjawab

dengan pernyataan yang baik maka dapat berimplikasi pada penilaian indeks persepsi korupsi di SMPN 1 Kota Balikpapan menjadi tinggi. Namun adapun kendala dari kurangnya respon dari para responden yang bersedia menjawab ada 2 hal. **Pertama**, tidak dapat dipungkiri karena kondisi *extra ordinary* yaitu masa pandemi covid-19. sehingga terbatasnya ruang dan waktu dalam menjelaskan tujuan dari indeks persepsi korupsi 2021. **Kedua**, adanya temuan dilapangan dengan responden mayoritas yaitu ibu rumah tangga dengan dilatarbelakangi sifat konservatis yang cukup tinggi terkait dengan kata-kata 'korupsi'. Sehingga dibutuhkan waktu yang agak panjang untuk menjelaskan makna dari kuisisioner, bahkan tidak dipungkiri setelah dijelaskan dengan detail namun responden tidak bersedia/mundur untuk tidak menjawab pertanyaan di kuisisioner hingga selesai.

Rekomendasi, untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi di wilayah survei SMP Negeri 1 Balikpapan, antara lain melakukan sosialisasi di masa penerimaan murid atau tahun ajaran baru dapat bersifat *offline* maupun *online*. Sehingga pada saat dilakukan survei tidak mengalami ketakutan yang berlebihan dikarenakan ada statement 'korupsi'. Hal ini sesuai beberapa temuan ketika dilakukan wawancara kepada responden di lapangan. Harapannya di SMP Negeri 1 Kota Balikpapan, meningkatkan edukasi persepsi korupsi baik dari sisi anak didik maupun dari sisi orang tua anak didik. Misalkan, terdapat tulisan/logo dari KPK di lembar pendaftaran yang *online*, sehingga pesan secara nasional lebih familiar di terima oleh orang tua wali sebagai responden kami. Jika di sekolah atau lokasi survei sudah melakukan sosialisasi pemahaman tentang nilai-nilai



korupsi, maka hal ini tersampaikan hanya sebatas pada anak didik/peserta saja. Namun sebaiknya pengembangan sosialisasi melalui orang tua wali juga, untuk peningkatan edukatif di lingkungan keluarga. Hal ini akan berimplikasi terciptanya keselarasan pemahaman dalam mewujudkan bersih dari persepsi korupsi baik dikeluarga maupun masyarakat di Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

Arimaviciute M. (2005), *Viesojo Sektoriaus Instituciju Valdymas: vodovelis, Vilnius*, p.72-79.

Babajani, J. (2010). "Challenges of publik sektor financial reporting". *Hesabras*, 8: 96-97.

Broadbent, J., Laughlin, R.C., dan Read, S.(1991), *Recenct Finacial and Administrative Changes in The NHS: Critical Theory Analysis, Critical Perspective On Accounting, Vol.2 No.I, pp. 1-29*.

Christeen, T., Laegreid , P., Roness, P. G., dan Rovik, K.A. 2007. *Organization Theory and The Publik Sektor: Instrument, Culture and Myth*. New York:Routledge.

Denhardt, Janet V, dan Denhardt, Robert B. James. (2007). *The New Public Service Expendid Edition Serving Not Steering*. Armonk, New York, M.E. Sharpe.

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ghobadian, A., Gallear, D., Viney, H. & O'Regan, N. (2007), 'Public sector performance improvement through private sector management practices: a satisfactory solution?', *International Journal of Business Performance Management*, Vol. 9, No. 4, pp. 363–79.

Gimzauskiene, E. (2006). *Veiklos Vertinimo Proceso Ypatumai Organizaciniy Vertybiu Aspektu. Organizaciju Vadyba: sisteminiai Tyrimai Management of Organization: systematic research*. Kaunas: Vytauto Didzoijo Inuversitetas. ISSN 1392-1142. Nr.39, 67-83.

- Golembiewski, R. T. & Kuhnert, K. W. (1994), 'Barnard on authority and zones of indifference: towards perspectives on the decline of managerialism', *International Journal of Publik Administration*, Vol. 17, No. 6, pp. 595–615.
- Isoraite, M. (2008). The Balanced Scorecard Method: from Theory to Practice. *Intelektine Ekonomika*, 1, 18-28.
- Ittner, C.D. dan Larcker, D.F. (1998). Innovations in performance measurement: trends and research Implications, *Journal of Management Accounting Research*, Vol.10, Fall, pp. 205-238.
- J.E.Lane. (2005). Viesasis sektorius: savakos, modeliai ir pozuriai. *Vilnus: Margi rastai*. ISBN 9986-09-228-0.
- Koike, O. (2013). Institutionalizing Performance Management In Asia: Looking East or West?, *International Journal of Publik Sektor Management* Vol. 26 No. 5, pp. 347-360.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moxham, C.(2009). Performance Measurement. Examining the Applicability of The Existing Body of Knowlegde to Nonprofit Organization. *International Journal of Operation & Production Management*, 29,740-763.
- Osborne, S. (2006). The new public goverment?, *Publik Management Review*, Vol.8 No. 3, pp. 377-387.
- Power,M.(1999),*TheAuditSociety:RitualsofVerification*,2nd edn, Oxford: Oxford University Press.
- R. Wiyono, (2005), *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Ridwan Zachrie Wijayanto, 2010, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, Gramedia.



Smalsky,V. (2010). *Viesasis valdymas: vadovelis. Vilnus:Mykolo Riomerio* Universitas.

Sugiyono (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Alfabeta

Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011., *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zeithalm, V.A., dan Bitner, M.J. (2003). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across The Firm.* Irwin, McGraw-Hill, pp.282.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%2005.pdf, Diakses pada tanggal 22 Februari 2021, Pukul 15.55 WITA. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13724/BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses tanggal 22 Februari 2021, Pukul 15.04 Wita.

<https://balikpapankota.bps.go.id/publikation/2021/02/26/995ad56da7168d041f2cbbd8/kota-balikpapan-dalam-angka-2021.html>, diakses tanggal 17 Mei 2021, Pukul 11.00 Wita.

<https://smpn1bpn.sch.id/2019-2020/ptk/> , diakses tanggal 17 Mei 2021, Pukul 11.05 Wita.



LAMPIRAN

DOKUMEN KAJIAN SURVEI INDEKS PERSEPSI (IPK) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

Balikpapan

Nyaman

KERJA SAMA



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan



TIM SWAKELOLA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Balikpapan